

**Implementasi *Community Policing* Polresta Pekanbaru, Riau**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Komunikasi  
pada Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia**

**Oleh**

**TITIN SAKINAH**

**13321050**

**Program Studi Ilmu Komunikasi**

**Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya**

**Universitas Islam Indonesia**

**2018**

Skripsi

**Implementasi Community Policing Polresta Pekanbaru, Riau**

Disusun oleh

**TITIN SAKINAH**



Telah disetujui dosen pembimbing skripsi untuk diujikan dan dipertahankan

dihadapan tim penguji skripsi.

Tanggal: 25 MAY 2018

Dosen Pembimbing Skripsi

الجامعة الإسلامية  
الاندونيسية

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'SR'.

**Sumekar Tanjung, S.Sos., MA.**

**NIDN 0514078702**

**Skripsi**

**Implementasi *Community Policing* Polresta Pekanbaru, Riau**

Disusun oleh

**TITIN SAKINAH**

**13321050**

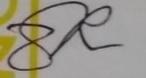
Telah dipertahankan dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi

Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia

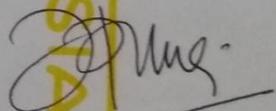
Tanggal: .... 25 MAY 2018 .....

Dewan Penguji:

1. Penguji 1: Sumekar Tanjung, S.Sos., MA.  
NIDN 0514078702

  
(.....)

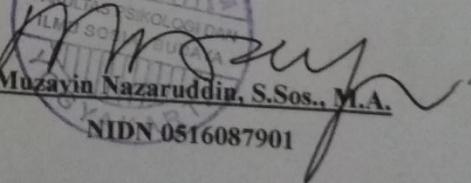
2. Penguji 2: Puji Hariyanti, S.Sos., M.I.Kom.  
NIDN 0529098201

  
(.....)



Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

  
  
**Muzayin Nazaruddin, S.Sos., M.A.**  
NIDN 0516087901

## PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : TITIN SAKINAH

Nomor Mahasiswa : 13321050

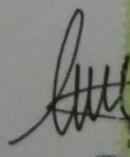
Melalui surat ini saya menyatakan bahwa:

1. Selama menyusun skripsi ini saya tidak melakukan tindak pelanggaran akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia.
2. Karena itu, skripsi ini merupakan karya ilmiah saya sebagai penulis, bukan karya jiplakan atau karya orang lain.
3. Apabila di kemudian hari, setelah saya lulus dari Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia, ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang telah ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya setuju dengan sesungguhnya.

Yogyakarta, 8 Juli 2018

Yang menyatakan,


(Titin Sakinah 13321050)

# SURAT KETERANGAN MELAKUKAN PENELITIAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH RIAU  
RESOR KOTA PEKANBARU



**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : SK / 11 / XI / 2017 / Sat Binmas

Kepala Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Menerangkan :

Nama : Titin Sakinah  
Nomor Mahasiswa : 13321050  
Prodi./ Fak./ Univ. : Ilmu Komunikasi/ FPSB/ Universitas Islam Indonesia  
Judul Penelitian : Implementasi Pelaksanaan *Community Policing* oleh  
Polresta Pekanbaru Riau

Mahasiswi tersebut diatas telah melakukan Penelitian / Riset di Sat Binmas Polresta Pekanbaru pada bulan November 2017 untuk bahan Skripsi yang berjudul :

**"Implementasi Pelaksanaan *Community Policing* oleh Polresta Pekanbaru Riau"**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 29 November 2017

PS KASAT BINMAS POLRESTA PEKANBARU



## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto:

Q.S. Al-Mujadilah (58), Ayat 11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانْشُزُوا يَرَفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

---

Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

### Persembahan:

Skripsi ini saya persembahkan untuk Bapak Mawardi, Mamah Istiqomah, Abang Fahmi, dan Kakak Ipar Ayu.

## KATA PENGANTAR



*Assalammu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.*

*Alhamdulillahirabbil'alamiin*, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada peneliti. Shalawat serta salam tidak lupa peneliti sampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Atas izin dari Allah SWT, peneliti dapat melaksanakan amanah berupa Tugas Akhir Tahun Akademik 2017/2018 sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan lancar sampai adanya penyusunan tugas akhir ini.

Tugas akhir merupakan upaya untuk mendidik mahasiswa agar dapat menerapkan ilmu dan kemampuan yang diperoleh dari masa perkuliahan, serta upaya agar mahasiswa dapat belajar untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Tugas akhir ini disusun berdasarkan hasil bimbingan dengan dosen pembimbing skripsi, serta hasil observasi dan wawancara di Kantor Polresta Pekanbaru Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 11, Senapelan, Pekanbaru, Riau.

Dalam melaksanakan penelitian tugas akhir ini, peneliti banyak memperoleh bantuan baik yang berupa materi maupun non materi, sehingga penelitian yang telah direncanakan ini dapat terealisasi dengan baik dan dapat diselesaikan dengan tepat pada waktunya. Oleh karena itu dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan syukur dan terima kasih kepada:

1. **Orang Tua** (Bapak Mawardi dan Ibu Istiqomah) serta keluarga besar, yang peneliti hormati dan sayangi atas seluruh dukungan, do'a, dan bantuan pada saat peneliti melaksanakan penelitian tugas akhir.
2. **Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D**, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian tugas akhir saat ini.
3. **Bapak Dr. rer. nat Arief Fahmie, S.Psi., MA., Psi.**, selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia beserta seluruh jajaran staf dan dosen.

4. **Bapak Muzayin Nazaruddin S.Sos., MA.,** selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia beserta seluruh jajaran staf dan dosennya.
5. **Ibu Sumekar Tanjung, S.Sos., MA.,** selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membantu peneliti dalam melakukan bimbingan dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.
6. **Bapak AKBP Drs. Ramlan Rasyid,** selaku Kasubbid PID Humas Polda Riau yang telah memberikan informasi kepada peneliti.
7. **Ibu Kopol Yeni Rahayu,** selaku Kasi Polmas Polda Riau yang telah memberikan bimbingan peneliti dalam penelitian tugas akhir ini.
8. **Ibu AKP Sunarti,** selaku Kasat Binmas Polresta Pekanbaru beserta jajarannya yang telah membantu peneliti dalam memberikan informasi kepada peneliti.
9. **Bapak Iptu Saptono,** selaku Kanit Binmas Polsek Sukajadi beserta jajaran **Bhabinkamtibmas Polsek Sukajadi** yang telah membantu peneliti dalam memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.
10. **Ibu Bripda Shinta Zamelia,** selaku Banit I Polsek Bukit Raya beserta jajaran **Bhabinkamtibmas Polsek Bukit Raya** yang telah membantu peneliti dalam memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.
11. **Bapak Iptu Samin Tampubolon,** selaku Kanit Binmas Polsek Tampan beserta jajaran **Bhabinkamtibmas Polsek Tampan** yang telah membantu peneliti dalam memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.
12. **Bapak Iptu HR. Panjaitan,** selaku Kanit Binmas Polsek Tenayan Raya beserta jajaran **Bhabinkamtibmas Polsek Tenayan Raya** yang telah membantu peneliti dalam memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.
13. **Bapak Iptu Soepriyanto,** selaku Kanit Binmas Polsek Lima Puluh beserta jajaran **Bhabinkamtibmas Polsek Lima Puluh** yang telah membantu peneliti dalam memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.
14. **Bapak Iptu Zainal Arifin,** selaku Kanit Binmas Polsek Pekanbaru Kota beserta jajaran **Bhabinkamtibmas Polsek Pekanbaru Kota** yang telah membantu peneliti dalam memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.
15. **Bapak Suherman,** selaku Ketua FKPM Tangkerang Tengah yang telah membantu peneliti dalam memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

16. **Para sahabat-sahabat Riau dan Yogyakarta** (Kanzun, Faiz, Nia, Sabrina, Nawang, Norina, Afifia, Nurfitriani, Riza, Windy, Rafiq, Danil, dan Syukron) yang telah memberikan dukungan dan do'a kepada peneliti.
17. **Teman-teman seperantauan Keluarga Bahagia Riau** (Veany, Fifah, Ricky, Andi, Ikhwanul, Ikmal, Endo, Ridho, Isya, Amin, Gunanda, dan Rohmad) yang telah mengingatkan peneliti untuk mengerjakan tugas akhir.
18. **Teman-teman Ilmu Komunikasi UII Angkatan 2013, 2014, dan 2015** yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan laporan tugas akhir.
19. Dan **semua pihak** yang telah ikut membantu kesuksesan penelitian tugas akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari bahwa dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan laporan tugas akhir ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu saran serta kritik yang membangun sangat peneliti harapkan. Semoga laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

*Wassalammu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh*

Yogyakarta, 8 Juli 2018

Peneliti,

Titin Sakinah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT KETERANGAN MELAKUKAN PENELITIAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Tinjauan Pustaka.....	5
1. Penelitian Terdahulu.....	5
2. Landasan Teori.....	10
(a) Implementasi dalam Organisasi.....	10
(b) Relasi Organisasi dan Masyarakat dalam <i>Community Relation</i> .....	16
F. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	20
2. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	20
3. Narasumber Penelitian.....	20
4. Pengumpulan Data.....	21

5. Tahap Penelitian.....	22
--------------------------	----

## **BAB II. GAMBARAN UMUM KEPOLISIAN RESORT KOTA PEKANBARU**

A. Sejarah Polresta Pekanbaru.....	25
B. Tribata, Catur Prasetya, Dan Logo Polresta Pekanbaru.....	26
C. Visi dan Misi Polresta Pekanbaru.....	28
D. Satuan Binmas Polresta Pekanbaru.....	29
E. Visi dan Misi Satuan Binmas Polresta Pekanbaru.....	29
F. Tugas Pokok Satuan Binmas Polresta Pekanbaru.....	30
G. Struktur Organisasi, Pangkat, serta Tugas Satuan Binmas Polresta Pekanbaru	31
H. Deskripsi Pekerjaan Binmas Polsek.....	34
I. Standar Operasional Prosedur Bhabinkamtibmas (Buku Pintar Bhabinkamtibmas, Edisi 2 Tahun 2015).....	34
J. Tugas Pokok, Fungsi, dan Peranan Bhabinkamtibmas.....	35
K. Data Bhabinkamtibmas Jajaran Polresta Pekanbaru.....	37

## **BAB III. TEMUAN PENELITIAN**

A. Program Kerja Anggota Bhabinkamtibmas.....	40
1. Kegiatan DDS ( <i>Door To Door System</i> ).....	40
2. Kegiatan <i>Problem Solving</i> .....	41
3. Kegiatan Kreativitas Bhabinkamtibmas.....	44
B. Implementasi <i>Community Policing</i> Polresta Pekanbaru, Riau.....	47
1. Komunikasi.....	47
2. Sumber Daya.....	50
(a) Penempatan Bhabinkamtibmas Di Kelurahan.....	50
(b) Pemilihan Anggota Bhabinkamtibmas.....	52
(c) Pelatihan Khusus Anggota Bhabinkamtibmas.....	57
(d) Sumber Daya Yang Dibutuhkan Bhabinkamtibmas.....	58
(e) Masa Jabatan Bhabinkamtibmas.....	61
3. Struktur Organisasi.....	63
Bhabinkamtibmas Yang Melanggar Peraturan UU Bhabinkamtibmas	
4. Sikap Pelaksana.....	65
(a) Aktifitas Bhabinkamtibmas.....	65
(b) Partisipasi Masyarakat.....	66
(c) Pelatihan Bagi FKPM.....	67
(d) Kebutuhan FKPM.....	68
(e) Penilaian Bhabinkamtibmas.....	68

## **BAB IV. PEMBAHASAN**

A. Program Kerja Anggota Bhabinkamtibmas.....	70
---	----

1.	Kegiatan DDS ( <i>Door To Door System</i> ).....	70
2.	Kegiatan <i>Problem Solving</i> .....	70
3.	Kegiatan Kreativitas Bhabinkamtibmas.....	71
B.	Implementasi <i>Community Policing</i> Polresta Pekanbaru, Riau.....	72
1.	Komunikasi.....	72
2.	Sumber Daya.....	75
3.	Struktur Birokrasi.....	77
4.	Sikap Pelaksana.....	80
C.	Analisis SWOT.....	81

**BAB V. PENUTUP**

A.	Kesimpulan.....	85
B.	Keterbatasan Penelitian.....	91
C.	Saran.....	92

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>94</b>
----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>97</b>
----------------------	-----------

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Struktur Organisasi dan Pangkat Satuan Binmas Polresta Pekanbaru...	31
Table 2.2. Data Bhabinkamtibmas Jajaran Polresta Pekanbaru.....	37

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Logo Polresta Pekanbaru Riau.....	27
Gambar 2.2. Logo Binmas Polresta Pekanbaru Riau.....	29
Gambar 3.1. Kunjungan DDS oleh Bhabinkamtibmas Polsek Bukit Raya.....	41
Gambar 3.2. <i>Problem solving</i> oleh Bhabinkamtibmas Polsek Tampan.....	42
Gambar 3.3. Penyelesaian masalah oleh FKPM dan Bhabinkamtibmas Polsek Bukit Raya .....	44
Gambar 3.4. Pembangunan MCK Kamtibmas oleh Bripka Ilham Nur di Wilayah Kelurahan Sidomulyo Timur.....	45
Gambar 3.5. Perenovasian Rumah Masyarakat Kurang Mampu oleh Bripka Ilham Nur di Wilayah Kelurahan Sidomulyo Timur.....	46
Gambar 3.6. Sinergitas 3 Pilar Kebangsaan Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai mendapatkan Penghargaan dari Kapolda Riau dan Polresta Pekanbaru .....	47
Gambar 3.7. Kartu Nama Bripka Febri Rossalim, S.H. (Bhabinkamtibmas Kelurahan Simpang Baru, Polsek Tampan).....	48
Gambar 3.8. Himbauan Kamtibmas dibelakang Kartu Nama Anggota Bhabinkamtibmas	48
Gambar 3.9. Penyuluhan ke SPBU dan Sekolah Dasar oleh Bhabinkamtibmas Polsek Tampan .....	49
Gambar 3.10. Polisi Jepang mendatangi Polsek Sukajadi.....	58

## DAFTAR LAMPIRAN

A.	Lampiran Dokumentasi.....	97
B.	Lampiran Wawancara.....	102

## ABSTRAK

**Titin Sakinah. 13321050. Implementasi *Community Policing* Polresta Pekanbaru, Riau. Skripsi Sarjana. Program Studi Ilmu Komunikasi , Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia 2018.**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji implementasi *community policing* yang dilakukan Polresta Pekanbaru, Riau. Kehadiran *community policing* sebagai alternatif gaya kepolisian yang merupakan pilihan strategi yang dilakukan oleh Anggota Polri baik sebagai konsep maupun dalam aktivitasnya. Dengan adanya kegiatan ini dapat menjalin kerjasama yang harmonis dengan masyarakat dalam kegiatan keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga citra Polri di masyarakat semakin bagus. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif melalui observasi dan wawancara dengan pemilihan narasumber penelitian menggunakan *purposive sampling* yakni Binmas Polresta Pekanbaru dan delapan Anggota Bhabinkamtibmas Jajaran Polresta Pekanbaru. Hasil penelitian ini adalah Komunikasi sebagai media untuk melaksanakan seluruh kegiatan Bhabinkamtibmas, Sumber Daya sebagai seleksi bagi Anggota Bhabinkamtibmas dan penempatannya disetiap kelurahan, Struktur Birokrasi sebagai landasan Anggota Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugas kamtibmas sesuai dengan UU, dan Sikap Pelaksana sebagai penilaian FKPM kepada Anggota Bhabinkamtibmas terhadap pelaksanaan kamtibmas yang telah dilakukan oleh Anggota Bhabinkamtibmas. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan pencitraan yang baik dari masyarakat kepada Anggota Polri khususnya Anggota Bhabinkamtibmas agar selalu percaya kepada Anggota Bhabinkamtibmas dalam menangani permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat.

**Kata Kunci: Impelementasi, *Community Policing*, Bhabinkamtibmas, Polri, Masyarakat**

## ABSTRACT

**Titin Sakinah. 13321050. *Implementation Community Policing Of Polresta Pekanbaru, Riau. Bachelor's Thesis. Communication Studies Program, Faculty of Psychology and Social Cultural Sciences, Islamic University of Indonesia 2018.***

*The purpose of this study was to describe the implementation of community policing is done by the Polresta of Pekanbaru Riau. The presence of community policing as an alternative style of policing that is an option strategy carried out by the national police as both a concept and in its activities. The existence of these activities can establish a harmonious collaboration with society in the activities of the security and order of the community so that the image of the Police in the community is getting a good deal. This research uses descriptive qualitative research methods through observation and interviews with the selection of interviewees research using purposive sampling namely Binmas Polresta Pekanbaru and eight members of the Bhabinkamtibmas Range Polresta Pekanbaru. The results of this research are Communication as a medium to carry out all activities Bhabinkamtibmas, resources as the selection for the members of Bhabinkamtibmas and its placement in every neighborhood, bureaucratic structure as a foundation member Bhabinkamtibmas in carrying out the task of kamtibmas in accordance with the Law, and the attitude of the Executor as FKPM assessment to members of Bhabinkamtibmas against carrying out of kamtibmas has been done by members of the Bhabinkamtibmas. It is intended to create a good image of a society to members of the police and in particular the members of the Bhabinkamtibmas to always believe in Member Bhabinkamtibmas in dealing with existing problems in the society environment.*

**Keywords: *Implementation, Community Policing, Bhabinkamtibmas, Police, Society***

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan instansi pemerintahan negara yang memiliki fungsi sebagai pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan masyarakat, pengayoman masyarakat serta pelayanan masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, guru besar pengamat ilmu polisi menyebutkan bahwa anggota kepolisian adalah polisi sipil dalam perubahan sosial di Indonesia. Maksudnya ialah masyarakat masih menganggap profesi anggota kepolisian sebagai media penyelesaian masalah kejahatan. Hal ini dikarenakan berbagai faktor seperti atribut atau seragam yang digunakan dan segala sesuatu yang melekat pada diri anggota kepolisian akan menimbulkan persepsi masyarakat terhadap anggota polisi menjadi sangar dan garang (Azhari, *Jurnal Hukum*, No. 2, Agustus 2011, hal. 654 – 666).

Anggota kepolisian dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, bukan hanya harus tunduk pada hukum yang berlaku sebagai aspek luar, tetapi anggota kepolisian itu sendiri juga diberi pembekalan berupa etika kepolisian sebagai aspek dalam kepolisian. Etika kepolisian adalah norma tentang perilaku anggota kepolisian untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi penegakan hukum, ketertiban umum dan keamanan masyarakat (Kunarto dalam Rahajo dan Angkasa, *Jurnal Dinamika Hukum*, No. 3, September 2011, hal. 389 – 401). Banyaknya aktifitas yang dilakukan kepolisian terhadap masyarakat ini membuat citra kepolisian dari masyarakat semakin berkembang. Dalam hal ini, anggota kepolisian perlu melakukan berbagai cara agar masyarakat dapat mempercayai tugas kepolisian dalam memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat salah satunya ialah program *community policing*. Hal ini pula dapat menjadikan keberadaan anggota kepolisian dalam membantu, berperan aktif, menjalankan serta menyosialisasikan semua kebijakan serta peraturan yang berhubungan dengan masyarakat.

Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang “Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri” memberikan pengertian dari *community relations* yakni sebuah filosofi, strategi

operasional, dan organisasional yang mendukung terciptanya suatu kemitraan baru antara masyarakat dengan polisi dalam mencegah kejahatan dan tindakan-tindakan proaktif sebagai landasan terciptanya kemitraan (Humberto, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 7, Mei 2010: 46 - 66). Kebijakan ini muncul tentang Polri yang menyadari bahwa tugas keamanan dan ketertiban tidak cukup dilakukan oleh polisi saja, tapi harus menjadi kesadaran bersama seluruh elemen bangsa yang bersinergi dalam suatu pola hubungan yang saling menghargai dan saling mempercayai antara masyarakat dan polisi. Kebijakan ini dapat mengubah pola hubungan antara polisi dan masyarakat yang selama ini selalu berada di dua pendapat yang berbeda-beda. Kehadiran *community policing* sebagai alternatif gaya kepolisian yang merupakan pilihan strategi yang dilakukan oleh Polri baik sebagai konsep maupun dalam aktivitasnya dan dengan adanya kegiatan ini dapat menjalin kerjasama yang harmonis dengan masyarakat dalam kegiatan keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga citra Polri di masyarakat semakin bagus.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008, menjelaskan bahwa penerapan *community policing* sebagai falsafah dan strategi merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat melalui kemitraan dengan warga masyarakat untuk mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam era demokrasi dan penegakan hak asasi manusia. *Community policing* yang menekankan pada pentingnya peran dan keterlibatan masyarakat sebagai sasaran kepolisian untuk mendukung terciptanya polisi yang professional dan bertanggung jawab dalam hal ini merupakan suatu bentuk dukungan yang strategi terhadap program reformasi Kepolisian di Indonesia. Dalam pelaksanaan *community policing* semua instansi kepolisian yang berperan dalam menyukseskan program ini, baik tingkat pusat maupun tingkat kewilayahan (Polda, Polwil, dan Polres).

Bhabinkamtibmas sebagai program *community policing* yang dapat menciptakan hubungan dan memberikan layanan terhadap masyarakat. Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang bertugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dan juga merupakan pengemban Pemolisian Masyarakat (Polmas) di desa atau kelurahan. Bhabinkamtibmas sebagai perwakilan anggota kepolisian dilingkungan masyarakat memiliki tanggung jawab dalam membina masyarakat atau komunitas dengan cara memberikan penyuluhan dan pembimbingan dalam rangka menumbuhkan perubahan sikap, perilaku, dan

terbentuknya kesadaran atau ketaatan hukum guna menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif sehingga Anggota Bhabinkamtibmas dapat meminimalisir kasus kejahatan yang ada di lingkungan masyarakat. Implementasi *community policing* Bhabinkamtibmas ini di berbagai wilayah diwujudkan dengan terbentuknya FKPM dan BKPM. FKPM (Forum Komunikasi Polisi Masyarakat) merupakan forum yang terdiri dari elemen masyarakat setempat dan unsur lain yang terkait serta anggota kepolisian yang menjalankan tugas *community policing*. Forum ini digunakan sebagai media dalam melaksanakan musyawarah, membahas masalah-masalah yang ada serta mencari akar permasalahan sehingga dirumuskan suatu solusi pemecahan masalah dan kesepakatan bersama. BKPM (Balai Komunikasi Polisi Masyarakat) merupakan tempat untuk berlangsungnya musyawarah.

Binmas Polresta Pekanbaru sebagai salah satu instansi kepolisian yang juga melaksanakan kegiatan *community policing* bagi masyarakat Pekanbaru. Program *community policing* yang dilakukan oleh Binmas Polresta Pekanbaru diwakilkan oleh Bhabinkamtibmas Jajaran Polresta Pekanbaru ini melakukan kerjasama dengan komunitas untuk mempermudah kegiatan sosialisasi kebijakan atau pelayanan yang diberikan oleh Polresta Pekanbaru sehingga masyarakat mengetahui dan mendapatkan penjelasan dari hak dan kewajiban terhadap kebijakan tersebut. Pada penelitian ini, peneliti memilih Bhabinkamtibmas Jajaran Polresta Pekanbaru sebagai subjek penelitian dikarenakan adanya kegiatan kreativitas yang dilakukan oleh salah satu Anggota Bhabinkamtibmas Jajaran Polresta Pekanbaru yakni Bripka Ilham Nur yang bertugas sebagai Anggota Bhabinkamtibmas Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai.

Bripka Ilham melakukan kegiatan kreativitas seperti kegiatan Jumat Barokah Bhabinkamtibmas Peduli, Membuat MCK Kamtibmas yang berasal dari keluhan masyarakatnya, dan Merenovasi rumah keluarga yang kurang mampu (biaya renovasi berasal dari dana pribadi Bripka Ilham). Kegiatan-kegiatan kreativitas yang telah dilakukan oleh Bripka Ilham ini mendapatkan penghargaan dari Kapolda Riau sebagai Bhabinkamtibmas Terbaik Tahun 2017. Penghargaan tersebut tidak hanya diterima Bripka Ilham tetapi juga pihak-pihak terkait dalam menjaga kamtibmas yakni sinergitas 3 Pilar Kebangsaan Kelurahan Sidomulyo timur, Kecamatan Marpoyan Damai. Kelurahan Sidomulyo Timur mendapatkan Penghargaan Kelurahan/ Desa Teraman, Piala Bergilir Kategori Juara Umum Kelurahan Aman untuk Polresta Pekanbaru serta Penghargaan kepada Camat Marpoyan Damai atas kepeduliannya terhadap pos kamling. Dari kegiatan kreativitas dan penghargaan yang diterima, maka peneliti ingin

melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana implementasi *community policing* yang dilakukan oleh Polresta Pekanbaru Riau khususnya Bhabinkamtibmas Jajaran Polresta Pekanbaru dalam keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Sebagai salah satu institusi pemerintahan yakni Binmas Polresta Pekanbaru, maka dalam menjalankan setiap kegiatannya, Bhabinkamtibmas Jajaran Polresta Pekanbaru selalu mengajak masyarakat Pekanbaru untuk aktif ikut serta pada kegiatan tersebut. Untuk mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat dalam menciptakan serta menjaga keamanan dan ketertiban, tentunya Bhabinkamtibmas Jajaran Polresta Pekanbaru harus melakukan kegiatan yang dapat dibanggakan oleh masyarakat Pekanbaru. *Community policing* adalah salah satu kegiatan alternatif yang dilakukan oleh anggota Bhabinkamtibmas untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. *Community policing* juga dilakukan oleh Binmas Polresta Pekanbaru untuk menjalin adanya kerjasama yang harmonis dengan masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban sehingga citra Polresta Pekanbaru di mata masyarakat Pekanbaru dapat bernilai baik. Untuk itu dalam penelitian ini, peneliti akan mencoba melihat sebuah permasalahan yaitu:

Bagaimana implementasi *community policing* Polresta Pekanbaru Riau?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah dirumuskan, maka dapat ditetapkan bahwa tujuan penelitian ini adalah mengkaji implementasi *community policing* Polresta Pekanbaru Riau.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi teoritis bagi kajian Ilmu Komunikasi dalam studi tentang Bhabinkamtibmas sebagai sarana

penghubung antara masyarakat dan kepolisian dan juga membentuk citra positif kepolisian.

- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan landasan untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
- a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tugas dan fungsi pekerjaan Bhabinkamtibmas di lingkungan masyarakat yang tidak hanya dapat mengatasi masalah masyarakat tetapi juga masyarakat dapat merangkul Anggota Bhabinkamtibmas dalam setiap kegiatan masyarakat yang ada, serta masyarakat dapat meningkatkan kualitasnya dalam berpartisipasi secara lebih aktif pada pelaksanaan kamtibmas dengan maksud lingkungan tersebut aman dari kejahatan khususnya kejahatan kriminalitas.
  - b. Memberikan saran bagi Bhabinkamtibmas Jajaran Polresta Pekanbaru sebagai salah satu sarana untuk melaksanakan aktifitas *community relations* yang dimana tidak hanya melakukan kegiatan pokok Bhabinkamtibmas tetapi juga melakukan kegiatan non pokok atau kreativitas yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kehadiran anggota kepolisian di lingkungan masyarakat.

## **E. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Penelitian Terdahulu**

Adapun beberapa hasil penelitian yang menjadi rujukan bagi peneliti dalam pembuatan penelitian ini adalah;

- a. Skripsi yang berjudul “Peranan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring)” oleh Muhammad Guntur HS (2017) Mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menjelaskan peranan Bhabinkamtibmas Polri, proses penanganan tindak pidana ringan, dan kendala yang dihadapi oleh Bhabinkamtibmas Polri dalam menangani

tindak pidana ringan. Hasil dari penelitian ini adalah Bhabinkamtibmas Polri memiliki tugas pokok yakni menangani tindak pidana ringan maupun non pidana/ masalah sosial sesuai dengan Peraturan Kapolri. Peran Bhabinkamtibmas Polri sebagai mediator dan fasilitator dalam menyelesaikan setiap permasalahan di lingkungan masyarakat dapat menghemat anggaran penyelidikan kepolisian pada fungsi reserse kepolisian. Kendala yang dihadapi oleh Bhabinkamtibmas diantaranya: adanya pengaruh dari pihak yang bermasalah atau orang ketiga pada saat proses mediasi berlangsung, masyarakat kurang mengerti hukum dan aturan yang berlaku, serta Bhabinkamtibmas sendiri masih ada yang kurang memahami tentang teknik proses penyelesaian masalah (*problem solving*) terutama masalah administrasi.

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Muhammad Guntur ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Persamaannya ialah Menggunakan metode kualitatif sebagai metode penelitiannya, Anggota Bhabinkamtibmas sebagai subjek penelitian, dan peran Anggota Bhabinkamtibmas sebagai fasilitas dan mediasi dalam penyelesaian masalah.. Perbedaannya ialah penelitian ini berfokus pada penanganan yang dilakukan Anggota Bhabinkamtibmas dalam tindak pidana ringan, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan berfokus pada kegiatan pokok dan non pokok (kreativitas) yang dilakukan oleh Anggota Bhabinkamtibmas.

- b. Skripsi yang berjudul “Peranan Bhabinkamtibmas dalam Penanggulangan Kejahatan di Kota Metro” oleh Natalia Katherine Sitompul (2015) Mahasiswa Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif (peraturan perundang-undangan serta bahan hukum yang berhubungan dengan peraturan KUHP dan KUHPA, dan Bhabinkamtibmas) dan pendekatan yuridis empiris (pendekatan yang dilakukan dengan cara penelitian di lapangan). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peranan Bhabinkamtibmas selaku serta faktor-faktor yang menghambat peranan Bhabinkamtibmas dalam penanggulangan kejahatan di Kota Metro. Hasil dari penelitian ini adalah:

- (1) Peranan bhabinkamtibmas dalam penanggulangan kejahatan di Kota Metro:

- (a) Pembimbing masyarakat bagi terwujudnya kesadaran hukum dan kamtibmas serta meningkatkan partisipasi masyarakat.
  - (b) Pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat bagi terwujudnya rasa aman dan tentram di masyarakat.
  - (c) Mediator, negosiator, dan fasilitator dalam penyelesaian problema sosial yang terjadi di masyarakat.
  - (d) Dinamisator atau motivator aktivitas masyarakat yang bersifat positif dalam rangka menciptakan dan memelihara kamtibmas.
- (2) Faktor penghambat peranan Bhabinkamtibmas dalam penanggulangan kejahatan di Kota Metro:
- (a) Faktor aparat penegak hukum. Masih adanya arogansi oleh penegak hukum yang disebabkan oleh berbagai hal yang menyebabkan pihak kepolisian tidak bersinergi dengan masyarakat, masih adanya anggota kepolisian yang menganggap dirinya lebih hebat dari masyarakat biasa yang membuat masyarakat menjadi berpikir negatif, kurang percaya, takut, dan enggan bersosialisasi dengan anggota kepolisian.
  - (b) Faktor sarana dan fasilitas. Anggaran yang terbatas menyebabkan dalam melakukan kegiatan Bhabinkamtibmas dan juga masih kurangnya peralatan yang digunakan oleh anggota Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan penyuluhan di daerah binaannya.
  - (c) Faktor masyarakat. Masih adanya masyarakat yang beranggapan bahwa menciptakan kondisi yang aman adalah tanggung jawab anggota kepolisian, masyarakat hanya menerima hasil dari kegiatan polisi tersebut.
  - (d) Faktor kebudayaan. Kebudayaan masyarakat yang masih mengesampingkan tugas polisi, mereka lebih memilih tokoh adat ataupun perangkat desa untuk membantu menyelesaikan problema yang sedang terjadi.

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Natalie Katherine Sitompul ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Persamaannya ialah Anggota Bhabinkamtibmas sebagai subjek penelitian. Perbedaannya ialah

penelitian ini menggunakan peran Anggota Bhabinkamtibmas dalam menyelesaikan kejahatan di Kota Metro, Pendekatan penelitian yang digunakan berdasarkan peraturan perundang-undangan KUHP, KUHPA, dan Bhabinkamtibmas. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan ialah kegiatan Anggota Bhabinkamtibmas yang tidak hanya menyelesaikan masalah tetapi juga berkomunikasi dan merangkul masyarakat dalam kegiatan kamtibmas. Metode penelitian yang digunakan peneliti yakni metode penelitian kualitatif dan subjek penelitian yang peneliti lakukan yakni Anggota Bhabinkamtibmas Jajaran Polresta Pekanbaru, Riau.

- (c) Jurnal yang berjudul “Strategi Mengenal Khalayak Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) Polsekta Samarinda Utara dalam membangun Kemitraan dengan Masyarakat di Kelurahan Mugirejo” oleh Cinthia Ayu Azhari (2018) Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menjelaskan, dan mendeskripsikan Strategi Mengenal Khalayak Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) Polsekta Samarinda Utara dalam membangun Kemitraan dengan Masyarakat di Kelurahan Mugirejo. Hasil penelitian ini adalah:
- (1) Mengidentifikasi khalayak berupa riwayat pendidikan, bahasa yang digunakan serta pekerjaan mayoritas. Sebelum mengidentifikasi khalayak, terlebih dahulu melakukan sambang yang selanjutnya memberikan buku Monografi Kelurahan untuk pada akhirnya Bhabinkamtibmas dipelajari. Hal ini memanfaatkan partisipasi tokoh masyarakat serta tokoh agama menjadi target dari kegiatan Bhabinkamtibmas.
  - (2) Melaksanakan sambang dan tatap muka (*door to door system*). Sebelumnya melakukan koordinasi dengan pihak kelurahan serta tokoh yang berpengaruh di masyarakat.
  - (3) Membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam rangka pembinaan kamtibmas secara Swakarsa di desa/ kelurahan. Kegiatan ini berjalan baik namun pelaksanaannya masih kurang maksimal yang dirasakan oleh

masyarakat. Kurangnya kehadiran dari anggota Bhabinkamtibmas dan pihak kelurahan menyebabkan tidak adanya koordinasi langsung dengan anggota Bhabinkamtibmas terutama pada penjagaan Pos Kamling.

- (4) Melakukan kerjasama dan kemitraan dengan masyarakat dan kelompok atau forum kamtibmas guna mendorong peran sertanya dalam Bhabinkamtibmas. Bhabinkamtibmas melaksanakan rapat FKPM setiap bulan untuk bekerja sama dengan masyarakat serta tokoh masyarakat. FKPM adalah sebuah forum yang dapat dijadikan sebagai landasan untuk membangun kemitraan antara anggota Bhabinkamtibmas dengan masyarakat Kelurahan Mugirejo agar dapat berkoordinasi dengan baik serta dapat memecahkan permasalahan yang timbul di Kelurahan Mugirejo.

Penelitian yang dilakukan oleh Cinthia Ayu Azhari dengan penelitian yang peneliti lakukan memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya ialah menggunakan Anggota Bhabinkamtibmas sebagai subjek penelitian, melakukan kegiatan pokok DDS (*door to door system*) yang dilakukan Anggota Bhabinkamtibmas, dan metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian kualitatif. Perbedaannya ialah kegiatan yang dilakukan Anggota Bhabinkamtibmas tidak hanya membangun kemitraan tetapi juga melakukan penyelesaian masalah yang ada di lingkungan masyarakat.

- (d) Jurnal yang berjudul “Peranan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam Meningkatkan Pelayanan Keamanan Masyarakat di Polsek Sumoroto Kabupaten Ponorogo” oleh Nofta Wulan Sari, Winarti, dan Joko Suranto (2016). Metode penelitian yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Bhabinkamtibmas sebagai *figurehead* memberikan arahan kepada anggotanya untuk dekat masyarakat dan aktif disegala kegiatan di desa agar menjaga kepercayaan ke masyarakat, menyambung silaturahmi, tidak adanya jarak antara anggota Bhabinkamtibmas. Arahan yang diberikan yaitu tentang memimpin di lingkungan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan di desa, tetapi masih ada kekurangan tentang kunjungan Bhabinkamtibmas yang tidak dilaksanakan setiap hari. Bhabinkamtibmas sebagai pemimpin (*leader*),

mewakili organisasi bertugas, pokok, fungsi dan tujuan kepada masyarakat. Modal kepercayaan dan kedekatan dengan masyarakat anggota bisa melaksanakan segala tugas-tugasnya dan kewajiban masyarakatpun bisa mendapatkan pelayanan dari Bhabinkamtibmas. Akan tetapi masih ada anggota yang kurang fokus menjalankan tugasnya kepada masyarakat yaitu tentang sambang/ kunjungan. Bhabinkamtibmas sebagai pejabat perantara (*liasion manager*) menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat agar menjadikan situasi yang mantap dan dinamis di lingkungan masyarakat. Kekurangan pada pelayanan keamanan kepada masyarakat yang kurang maksimal dan memuaskan akan selalu dibenahi.

Penelitian yang dilakukan Nofta Wulan Sari, Winarti, dan Joko Suranto ini memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Persamaannya ialah peran Anggota Bhabinkamtibmas sebagai pemimpin, mengajak masyarakat dalam kegiatan kamtibmas, serta menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Metode penelitian yang digunakan memiliki persamaan yakni metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya ialah peneliti tidak hanya fokus pada kegiatan pokok Anggota Bhabinkamtibmas (DDS dan *Problem Solving*), tetapi juga kegiatan non pokok yakni kegiatan kreativitas yang dilakukan Anggota Bhabinkamtibmas.

## **2. Landasan Teori**

### **a. Implementasi dalam Organisasi**

Implementasi adalah suatu tindakan yang sudah direncanakan sebelumnya, terstruktur, dan memiliki tujuan dalam mencapai tindakan tersebut. Menurut Syauckani dkk (2004: 295), mengatakan implementasi merupakan kumpulan kegiatan dalam memberikan kebijakan kepada masyarakat luas, agar dapat menghasilkan suatu hal yang diharapkan. Kegiatan yang dilakukan ialah pertama, mempersiapkan peraturan lanjutan yang merupakan pemahaman terhadap kebijakan tersebut. Kedua mempersiapkan sumber daya untuk melaksanakan kegiatan, seperti sarana dan prasarana, keuangan dan menentukan yang akan bertanggungjawab dalam melakukan kebijakan tersebut. Ketiga bagaimana cara memberikan kebijakan secara nyata

kepada masyarakat umum. Ketiga pandangan tersebut menjelaskan proses pelaksanaan kebijakan yang tidak hanya menyinggung tentang perilaku badan administratif dalam melakukan program yang terjadi di komunitas, melainkan kebijakan yang melibatkan kekuatan politik negara, ekonomi, dan sosial yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terliba, agar tujuan kebijakan publik kepada komunitas ini sebagai hasil dari kegiatan pemerintah yang dijalankan secara maksimal.

Implementasi yang efektif membutuhkan kepemimpinan yang baik untuk mengoordinasikan dan mengontrol yang baik pula. Lima kondisi atau syarat untuk implementasi yang sempurna (*Parsons* dalam Amrullah, Skripsi, 2008: 23):

- (a) Bahwa implementasi ideal itu adalah produk organisasi yang padu.
- (b) Bahwa norma-norma akan ditegakkan dan tujuan ditentukan.
- (c) Bahwa orang akan melaksanakan apa yang diminta dan diperintah.
- (d) Bahwa harus ada komunikasi yang sempurna didalam dan diantara organisasi.
- (e) Bahwa tidak ada tekanan waktu.

### **(1) Pendekatan Implementasi Kebijakan**

Pendekatan yang sering digunakan oleh para ahli dalam menjelaskan aktivitas implementasi kebijakan publik dapat dibagi kedalam beberapa jenis pendekatan (Syarief, Skripsi, 2012: 36):

#### **(a) Pendekatan Politik**

Asumsi dasar pendekatan ini adalah pelaksanaan dari proses kekuasaan yang terjadi dalam keseluruhan perencanaan kebijakan publik. Berhasil atau tidaknya suatu kebijakan publik akan sangat bergantung pada partisipasi dan keahlian dari kelompok dominan, selain itu kebijakan publik juga memiliki pengaruh untuk memaksakan kehendak mereka.

#### **(b) Pendekatan Struktural**

Pendekatan ini memiliki sifat organis. Sifat organis ini sangat tepat untuk pelaksanaan yang memerlukan adanya desain dari struktur yang dapat melaksanakan kebijakan publik dan selalu berubah apabila dikaitkan

dengan rancangan yang langsung dilaksanakan dalam suatu struktur khusus.

(c) Pendekatan Prosedural dan Managerial

Pendekatan prosedur dilihat dari tahap proses penjadwalan (*scheduling*), perencanaan (*planning*), dan pengawasan (*controlling*). Sedangkan pendekatan manajerial dilihat dari perencanaan jaringan kerja dan pengawasan (*network planning and cotroling*) atau diistilahkan dengan NPC. Pendekatan ini menjelaskan suatu kerangka kerja dimana proyek dapat direncanakan dan pelaksanaannya diawasi dengan cara mengidentifikasi dan menyusun urutan tersebut dari berbagai tugas dan menyelesaikan tugas tersebut.

(d) Pendekatan Keperilakuan (*Behavioral Approach*)

Berawal dari kesadaran tentang terjadinya penolakan terhadap proses perubahan yang akan terlaksana. Karakter manusia dengan semua sikapnya akan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.

**(2) Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan**

Menurut Warmick (dalam Syarief, Skripsi, 2012: 19), pada implementasi terdapat dua kategori faktor yang bekerja dan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan proyek yaitu:

(a) Faktor Pendorong (*facilitating conditions*)

- 1) Komitmen pimpinan politik: pimpinan pemerintah yang memiliki komitmen merupakan pemimpin politik yang memiliki kekuasaan terhadap wilayahnya.
- 2) Kemampuan organisasi: kemampuan organisasi dalam tahap ini dapat diartikan sebagai keahlian organisasi menjalankan tugas.
- 3) Komitmen para pelaksana: pemikiran yang salah dapat diartikan apabila pemimpin telah siap melangkah, maka anggotanya pun telah siap juga.

(b) Faktor Penghambat (*impeding conditions*)

Banyaknya para pelaksana yang terlibat, semakin banyak pihak yang terlibat dan turut mempengaruhi pelaksanaan, makin rumit komunikasi makin besar kemungkinan terjadi 'delay' hambatan dalam proses pelaksanaan:

- 1) Terdapat komitmen atau loyalitas ganda. Banyaknya pihak yang terlibat yang seharusnya ikut berperan demi keberhasilan dalam menentukan atau menyetujui suatu proyek, namun dalam pelaksanaannya masih terjadi penundaan karena belum adanya komitmen terhadap proyek dan banyaknya waktu yang dipakai untuk tugas atau program lainnya.
- 2) Kerumitan yang melekat pada proyek itu sendiri. Dalam hal ini berupa faktor teknis, ekonomi, pengadaan bahan dan faktor perilaku pelaksana atau masyarakat.
- 3) Jenjang pengambilan keputusan yang terlalu banyak. Semakin banyak jenjang dan tempat pengambilan keputusan yang persetujuannya diperlukan sebelum rencana proyek dilaksanakan. Sama halnya dengan tahap operasi, penyaluran dana dan sumbangan yang diperlukan, akan memakan banyak waktu karena memerlukan persetujuan dari banyak pihak.
- 4) Faktor lain: waktu dan perubahan kepemimpinan. Semakin panjang waktu yang dibutuhkan dari saat penyusunan rencana dengan pelaksanaan, maka semakin besar kemungkinan pelaksanaan menghadapi hambatan, terlebih apabila terjadi perubahan kebijakan.

**(3) Model Implementasi Kebijakan**

Keberhasilan dari implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor yang memiliki keterikatan satu dengan yang lainnya. George C. Edwards III dalam buku *Implementing Public Policy* mengungkapkan komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi

antara lain: dimensi transformasi atau penyampaian informasi kebijakan publik, kejelasan, dan konsisten (Edwards III, 1980: 10-11). Edwards III juga mengemukakan: *In our approach to the study of policy implementation, we begin in the abstract and ask: What are the precondition for successful policy implementation? What are primary obstacles to successful policy implementation?.* Jawaban dari pertanyaan tersebut, Edwards menilai implementasi kebijakan melalui empat faktor:

(a) Komunikasi

Menurut Edwards, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan. Polresta Pekanbaru khususnya Binmas Polresta Pekanbaru beserta anggota Bhabinkamtibmas harus mengetahui apa yang harus ia lakukan agar implementasi kebijakan tersebut berhasil. Pengetahuan tentang apa yang akan dikerjakan dapat berjalan dengan baik bersamaan dengan komunikasi yang baik pula, sehingga setiap implementasi kebijakan harus dikomunikasikan kepada orang yang tepat. Binmas Polresta Pekanbaru harus menentukan tujuan dan sasaran kebijakan (kelompok sasaran) sehingga akan mengurangi nilai ketidakpahaman terhadap suatu implementasi. Apabila tujuan maupun target dari suatu kebijakan tidak spesifik atau tidak diketahui oleh kelompok target maka akan terjadi pertarungan dari kelompok target. Agar kebijakan yang diterapkan dalam kelompok sasaran dapat konsisten, maka dibutuhkan komunikasi oleh para pembuat kebijakan dan para pelaksana.

(b) Sumber daya

Sumber daya ialah faktor yang paling penting dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Hal-hal yang penting lainnya ialah: jumlah staf yang harus mempunyai kemahiran dan kemampuan yang dapat melaksanakan tugas, adanya kesamaan antara jumlah staf yang diperlukan dan kemahiran sesuai dengan tugas yang diberikan, pendanaan operasional implementasi kebijakan, fasilitas, dan informasi yang cukup mengenai

cara melaksanakan kebijakan dan kesanggupan dari banyak pihak yang terlibat dalam suatu implementasi kebijakan. Binmas Polresta Pekanbaru harus menentukan sumber daya apa yang akan ia digunakan. Apabila Binmas Polresta Pekanbaru kekurangan sumber daya dalam melaksanakan implementasi kebijakan meskipun kebijakan tersebut telah dikomunikasikan secara jelas, maka dampaknya ialah implementasi kebijakan tersebut tidak akan berjalan dengan efektif dan layanan terpadu tidak akan diberikan secara maksimal.

(c) Sikap pelaksana

Sikap pelaksana ini memberikan penilaian tentang watak dan karakteristik pada Binmas Polresta Pekanbaru. Sikap yang harus dimiliki oleh Binmas Polresta Pekanbaru dapat berupa sikap solidaritas, kekeluargaan, pengabdian, keagamaan, dan lain-lain. Jika ingin berhasil dalam melaksanakan implementasi kebijakan, Binmas Polresta Pekanbaru tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan tetapi Binmas Polresta Pekanbaru juga harus mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Apabila Binmas Polresta Pekanbaru memiliki sikap yang baik, maka implementasi kebijakan berjalan dengan baik sesuai dengan yang diinginkan oleh pembuat kebijakan (petinggi kepolisian). Ketika Binmas Polresta Pekanbaru memiliki sikap dan pendapat yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan tidak berjalan lancar.

(d) Struktur birokrasi

Struktur birokrasi adalah norma-norma pada organisasi dalam menjalankan tugas pokok. Struktur birokrasi yang harus dilakukan oleh Binmas Polresta Pekanbaru pada saat bertugas ialah dengan mengaplikasikan SOP (*standard operating procedures*). SOP menjadi pedoman bagi Binmas Polresta Pekanbaru khususnya anggota Bhabinkamtibmas dalam bertugas. Maksudnya adalah Struktur organisasi

yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang menyebabkan aktifitas organisasi tidak fleksibel.

**b. Relasi Organisasi dan Masyarakat dalam *Community Relations***

*Community relations* dipandang sebagai hubungan organisasi dengan komunitasnya di daerah organisasi tersebut beroperasi. Kegiatan ini sebagai bagian tanggung jawab organisasi. Hubungan dan memberikan informasi yang baik dengan komunitas merupakan modal yang penting bagi organisasi untuk membangun relasi dan menunjukkan tanggung jawab sosialnya terhadap komunitas karena dianggap sebagai investasi jangka panjang. Dalam rangka memenuhi tanggung jawab sosial tersebut tentu saja berkaitan dengan kode-kode etik, maupun sumbangan perusahaan terhadap program-program *community relations*, sehingga tidak heran kemudian organisasi bisnis dipandang dari dua sisi. Di satu sisi sebagai lembaga yang mencari keuntungan, organisasi bisnis dipandang sebagai lembaga ekonomi. Namun pada sisi lain, organisasi bisnis dipandang sebagai lembaga sosial yang memikul tanggung jawab bagi masyarakat atas dampak yang terjadi karena kehadirannya. Inilah kemudian menjadi landasan untuk organisasi menjalankan aktivitas *community relations*.

Menurut Wilbur J. Bill Peak dalam karyanya, “Community Relations” yang dimuat dalam Lesly Public Relations Handbook, mendefinisikan *hubungan dengan komunitas adalah hubungan dengan komunitas, sebagai fungsi hubungan masyarakat merupakan partisipasi suatu lembaga yang berencana, aktif, dan sinambung dengan dan didalam suatu komunitas untuk memelihara dan membina lingkungannya demi keuntungan kedua belah pihak, lembaga dan komunitas* (Effendy, 2002: 23). Dari definisi ini menunjukkan bahwa hubungan dengan komunitas berpengaruh pada kegiatan yang dilakukan oleh lembaga, dalam hal ini komunitas sebagai pelaksanaannya yang bersifat partisipatif. Dengan partisipasi tersebut, keuntungan tidak hanya pada organisasi atau lembaga saja, tetapi juga pada lingkungan disekitarnya.

Menurut Moore (2004: 418), lima tujuan dari program *community relations* secara umum yaitu: (a) Memberikan informasi kepada komunitas tentang kebijaksanaan, kegiatan dan masalah organisasi atau perusahaan, (b) Memberikan penjelasan terhadap pertanyaan masyarakat di sekitar perusahaan, (c) Memberikan pertolongan kepada lingkungan melalui organisasi atau perusahaan setempat, (d) adanya kerjasama dalam bidang pendidikan seperti sekolah dan perguruan tinggi dengan cara memberikan sarana dan prasarana, dan (e) Mendukung program-program kesehatan, olahraga, budaya dan kreatifitas.

*Community relations* mengupayakan tidak hanya membina hubungan dengan komunitas melalui beberapa program bantuan ataupun hadiah, namun ada usaha untuk saling mendekati antara masyarakat dan organisasi atau kelompok. Semua pihak menjalin komunikasi, agar persoalan dan permasalahan dapat dipecahkan bersama dan juga ingin bergerak dari posisi demi menjaga kepentingan bersama namun tidak menghilangkan identitas dan tujuan masing-masing. Semakin jelas, bahwa *community relations* tidak hanya sekedar membangun hubungan baik dengan komunitas oleh organisasi melainkan hubungan organisasi dengan komunitas yang dibangun sesuai dengan perencanaan dan berkelanjutan demi kepentingan kedua belah pihak. Adapun manfaat dari menjalin hubungan baik dengan komunitas ini diantaranya:

- (a) Organisasi yang menjalin hubungan baik dengan komunitas, akan mendapatkan sikap positif dari komunitas kepada organisasi tersebut.
- (b) Sikap positif yang ditunjukkan oleh komunitas, sedikit banyaknya akan menularkan kepada karyawan yang bekerja pada organisasi sehingga menimbulkan kenyamanan dalam bekerja. Logika ini bersumber pada pendapat bahwa para pekerja atau karyawan mengidentifikasikan dirinya dengan sangat erat pada komunitas, dan secara tidak sadar para pekerja pun mengambil pola pikir sikap komunitas tadi.
- (c) Organisasi peka terhadap persoalan-persoalan sosial di sekitarnya.
- (d) Berkembangnya hubungan kemitraan antara organisasi dengan komunitasnya.

Masyarakat merupakan tempat atau wadah untuk membentuk karakter diri warga suku ataupun kelompok yang berbeda satu sama lain. Wadah tersebut juga warga turut serta dalam menjaga kebudayaan-kebudayaan yang terdapat dalam lingkungan masyarakat yang tentunya mempunyai ciri khas yang berbeda-beda. Adapun ciri-ciri masyarakat dalam satu bentuk kehidupan bersama menurut Soejono Soekanto (dalam Syani, 1995: 47), antara lain sebagai berikut:

- (a) Manusia yang hidup berdampingan dalam ilmu sosial tidak ditentukan dengan jumlah pasti manusia yang ada. Namun secara teori, jumlah minimum hidup bersama ialah dua orang.
- (b) Manusia berkumpul dalam waktu yang lama. Berkumpulnya manusia ini akan menambah beberapa manusia baru yang dapat berbicara, merasa, mengerti dan juga memiliki keinginan untuk menyampaikan kesan-kesan atau perasaannya. Hal ini mengakibatkan munculnya komunikasi yang kemudian membuat peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar kelompok.
- (c) Kesadaran manusia bahwa manusia itu dapat bersatu.
- (d) Manusia dalam hidup bersama akan membuat kebudayaan yang dapat menyebabkan manusia memiliki hubungan dengan manusia lainnya.

Menurut Thoha (2007: 33) bahwa *manusia berperilaku sebagai wujud dari hubungan perseorangan dengan lingkungannya*. Perilaku manusia berhubungan dengan perilaku organisasi. Ilmu perilaku melandasi dari perilaku organisasi. Manusia membangun organisasi bukan hanya sebagai target tapi sebagai fasilitas untuk kepentingan manusia itu sendiri. Dasar membangun organisasi ini ialah organisasi sebagai tempat untuk mencukupi keperluan masyarakat seperti materi dan ekonomis, dan juga keperluan bermasyarakat dan psikologis. Organisasi dan masyarakat merupakan elemen yang saling membutuhkan, karena tidak hanya memberikan bantuan yang baik kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasakan efek dari kehadiran organisasi, tetapi organisasi pun menerima manfaat dari hubungan tersebut.

Banyak kegiatan yang dilakukan oleh seorang *public relations*. Salah satunya adalah dengan mengadakan kegiatan *community policing* yang dilakukan oleh kepolisian. *Community policing* adalah suatu strategi perpolisian dimana masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilibatkan dalam berbagai kegiatan kepolisian untuk mencapai tujuan kepolisian yaitu mewujudkan *public safety*, dan pelaksanaannya dapat dilakukan bersama atau atas nama polisi. Polisi dalam paradigma *community policing* mendorong masyarakat untuk menyadari bahwa keamanan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama dan juga masyarakat didorong untuk aktif dalam upaya menjaga keamanan tersebut. *Community policing* juga memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa dalam menangani masalah keamanan ini akan lebih maksimal pelaksanaannya apabila dilakukan hubungan yang kolaboratif dan konsultatif antara polisi, berbagai kelompok masyarakat, dan institusi publik maupun swasta.

Friedman (1998: 30) merumuskan *konsep community policing sebagai sebuah kebijakan dan strategi yang untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal dalam mengatasi tindak kejahatan, mengurangi rasa takut terhadap ancaman kejahatan (fear of crime), mengubah kualitas kesejahteraan hidup, meningkatkan perbaikan dalam pelayanan polisi dan legitimasi melalui kebebasan proaktif yang tertuju pada sumber daya komunitas masyarakat untuk berusaha mengubah kondisi-kondisi yang menjadi penyebab dari adanya tindak kejahatan. Community policing merupakan kepentingan wajib dari anggota kepolisian dalam hal pengambilan keputusan serta perhatian terhadap hak-hak sipil dan kebebasan yang lebih besar.*

Program *community policing* ini telah lama dijalankan oleh anggota Bhabinkamtibmas Jajaran Polresta Pekanbaru. Hal ini terlihat pada akun media sosial Humas Polda Riau: [https://www.instagram.com/humaspolda\\_riau/](https://www.instagram.com/humaspolda_riau/). Berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh anggota Bhabinkamtibmas Jajaran Polresta Pekanbaru baik kegiatan program pokok maupun kegiatan program kreativitas dari anggota Bhabinkamtibmas. Kegiatan seperti ini dilakukan dengan tujuan dapat memberikan keamanan, kenyamanan, serta membangun kemitraan yang baik antara kepolisian dan masyarakat dari berbagai masalah yang terjadi.

## **F. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat. Penelitian ini menggunakan panca indera melihat dan panca indera mendengar. Dalam hal ini peneliti akan melakukan penelitian tentang implementasi *community policing* Polresta Pekanbaru Riau.

### **2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Pelaksanaan pada penelitian tentang Implementasi Aktivitas Polresta Pekanbaru khususnya Anggota Bhabinkamtibmas Jajaran Polresta Pekanbaru dalam Program *Community Policing* ini membutuhkan waktu selama empat bulan, yaitu September – Desember 2017. Penelitian ini dilakukan di Kantor Polresta Pekanbaru Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 11, Senapelan, Pekanbaru, Riau.

### **3. Narasumber Penelitian**

Dalam penelitian ini, narasumber tersebut yang didapatkan dengan menggunakan teknik pengambilan sampel yakni *purposive sampling*. Narasumber dalam penelitian ini adalah Kasat Binmas Polresta Pekanbaru (AKP Sunarti), Kanit Binmas Polsek Sukajadi (Iptu Saptono) beserta Bhabinkamtibmas Polsek Sukajadi (Aiptu Afrizal dan Bripka M. Syafruddin), Banit I Binmas Polsek Bukit Raya (Bripka Shinta Zamelia), Kanit Binmas Polsek Pekanbaru Kota (Iptu Zainal Arifin) beserta Bhabinkamtibmas Polsek Pekanbaru Kota (Aiptu Jayadi dan Bripka Jasman), Bhabinkamtibmas Polsek Tampan (Bripka Febri Rossalim, S.H. dan Aiptu T. Lingga), Panit I Binmas Polsek Tenayan Raya (Aiptu Hemamalini) beserta Bhabinkamtibmas Polsek Tenayan Raya (Bripka Zalman Harefa, Aiptu Indra Gunawan, dan Bripka S. Bagus Kuncoro), Bhabinkamtibmas Polsek Lima Puluh (Aiptu Susetio Supriadi dan Brigadir Robby Yulianto), dan Ketua FKPM Kelurahan Tangkerang Tengah (Bapak Suherman, S.T.)

#### 4. Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data online dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang digunakan penelitian dengan melakukan pengambilan data langsung ke lapangan. Pengambilan data penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012: 122). Peneliti memilih informan/ narasumber berdasarkan rujukan dari pimpinan kepolisian atas pekerjaan yang telah dilakukan Anggota Bhabinkamtibmas serta FKPM yang rujukannya berasal dari Anggota Bhabinkamtibmas. Peneliti memilih Anggota Bhabinkamtibmas dan FKPM yang mengetahui informasi dan masalah secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang lebih akurat. Berikut ini ada dua macam pengumpulan data yaitu:

- (1) Observasi

Observasi merupakan langkah awal yang dilakukan oleh peneliti terhadap lingkungan. Menurut Arikunto (2006: 124), observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan melakukan upaya pengamatan langsung ke lokasi yang akan diteliti. Kegiatan observasi dilakukan dengan menggunakan pancaindera peneliti untuk mendapatkan informasi dari permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, observasi yang peneliti lakukan ialah peneliti mendatangi lokasi penelitian. Peneliti melihat kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Anggota Bhabinkamtibmas.

- (2) Wawancara

Wawancara adalah dialog antara peneliti dan informan/ narasumber. Peneliti memberikan pertanyaan dan informan/ narasumber yang menjawab atas pertanyaan itu. Peneliti melakukan pertemuan dan dialog secara mendalam dengan Anggota Bhabinkamtibmas Jajaran Polresta Pekanbaru dan FKPM. Pertanyaan yang diberikan kepada Anggota

Bhabinkamtibmas seputar keseluruhan kegiatan kamtibmas. Sedangkan pertanyaan yang diberikan kepada FKPM seputar penilaian atas hasil kerja Anggota Bhabinkamtibmas terhadap masyarakat.

- b. Data sekunder adalah data yang digunakan peneliti yang diperoleh dari hasil perpustakaan dalam bentuk buku-buku dan tulisan ilmiah yang berkaitan dengan materi kegiatan *community policing* dan kegiatan *community relations* yang peneliti lakukan. Selain itu juga, peneliti juga menggunakan data online yakni data yang digunakan peneliti dalam penelitian diperoleh dari internet. Data online ini berbentuk jurnal dan skripsi tentang kegiatan *community policing* atau Bhabinkamtibmas berbasis online.

## **5. Tahap Penelitian**

- a. Membuat Proposal Penelitian

Hal pertama yang dilakukan oleh peneliti ialah mencari referensi melalui media online dan sosial media yang disesuaikan dengan permasalahan yang terjadi pada saat ini. Selain itu, peneliti juga melihat kumpulan judul-judul skripsi yang telah dibuat oleh penelitian lainnya. Setelah mencari referensi dari berbagai data, selanjutnya peneliti membuat proposal penelitian

- b. Membuat Surat Perizinan Penelitian

Setelah melakukan tinjauan awal, mengajukan judul penelitian dan disetujui oleh dewan skripsi dan juga membuat proposal penelitian, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan peneliti ialah menyelesaikan administrasi yang berhubungan dengan surat perizinan, berupa:

- Surat permohonan izin penelitian untuk Binmas Polresta Pekanbaru.
- Surat permohonan izin penelitian untuk Bhabinkamtibmas Polsek Pekanbaru Kota, Bhabinkamtibmas Polsek Sukajadi, Bhabinkamtibmas Polsek Bukit Raya, Bhabinkamtibmas Polsek Tampan, Bhabinkamtibmas Polsek Lima Puluh, dan Bhabinkamtibmas Polsek Tenayan Raya.

c. Menyusun Jadwal Observasi Penelitian

Ketika peneliti sudah mendapatkan izin penelitian di lokasi penelitian (kantor Polresta Pekanbaru), maka tahap selanjutnya ialah peneliti menyusun jadwal observasi penelitian. Jadwal observasi yang akan dilakukan oleh peneliti ialah pada bulan November 2017.

d. Melakukan Perjanjian Wawancara Penelitian

Pada saat peneliti akan melakukan observasi di lokasi penelitian, maka saat itu juga peneliti membuat perjanjian untuk melakukan wawancara kepada narasumber penelitian.

e. Membuat Naskah Wawancara Penelitian

Setelah peneliti membuat perjanjian untuk melakukan wawancara, peneliti juga membuat daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber penelitian. Daftar pertanyaan ini berhubungan dengan judul penelitian yakni Implementasi Aktivitas Bhabinkamtibmas Polresta Pekanbaru dalam Program *Community Policing*.

f. Menulis Hasil Wawancara

Pada saat peneliti melakukan wawancara langsung kepada narasumber penelitian, peneliti mencatat jawaban-jawaban yang diajukan oleh narasumber penelitian. Jawaban-jawaban ini menjadi data akurat pada penelitian ini.

g. Mengolah Data Hasil Wawancara

Setelah mendapatkan data-data yang diinginkan peneliti dan mengumpulkan data tersebut, langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah melakukan pengolahan data dengan mengategorikan data yang penting dan data yang tidak penting.

h. Melakukan Analisis Wawancara

Mengolah data yang telah peneliti lakukan. Langkah berikutnya ialah melakukan analisis data wawancara sesuai dengan aturan metode kualitatif.

i. Merefleksikan terhadap Teori

Peneliti telah melakukan pengolahan data wawancara dan analisis terhadap wawancara tersebut, tahapan lainnya ialah mengaitkan data wawancara dengan teori-teori yang peneliti gunakan. Tujuan ialah menentukan apakah data wawancara dengan teori-teori memiliki pernyataan yang sama atau tidak.

j. Penarikan Kesimpulan

Bagian ini merupakan tahap akhir dalam tahap penelitian. Peneliti melakukan pemberian makna untuk melihat sejauh mana peneliti memahami penelitian dan interpretasi yang dibuatnya. Penarikan kesimpulan ini telah menunjukkan bahwa peneliti telah mendapat jawaban atas pertanyaan penelitian yang dilakukan.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KEPOLISIAN RESORT KOTA PEKANBARU**

#### **A. SEJARAH POLRESTA PEKANBARU**

Penjelasan yang dilakukan peneliti mengenai Sejarah Polresta Pekanbaru ini bersumber dari dokumentasi Polresta Pekanbaru. Penjelasan tersebut merupakan dokumentasi asli dan tidak dapat diubah oleh peneliti.

Polresta Pekanbaru berdiri pada tahun 1975. Polresta merupakan kepanjangan dari Kepolisian Resort Kota Pekanbaru yang bermarkas di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 11 Pekanbaru. Di utara, wilayah hokum Polresta Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Siak, di selatan dengan Kampar, di barat dengan Kampar dan di timur dengan Kabupaten Pelalawan. Luas wilayah hokum Polresta Pekanbaru mencapai 632.26 km<sup>2</sup> atau paling kecil dari semua luas kesatuan wilayah di Polda Riau.

Polresta Pekanbaru ini dipimpin oleh Kapolresta dengan berpangkat Kombes Pol. (Komisaris Besar Polisi) serta Waka Polresta yang berpangkat AKBP (Ajun Komisaris Besar Polisi). Polresta Pekanbaru ini memiliki tugas pokok menjaga keamanan, ketertiban masyarakat serta penegakan hukum di Kota Pekanbaru. Pada jajaran Polresta Pekanbaru terdapat 11 Polsek (Kepolisian Sektor), antara lain: Polsek Kota Pekanbaru, Polsek Senapelan, Polsek Tampan, Polsek Bukit Raya, Polsek Sukajadi, Polsek Payung Sekaki, Polsek Lima Puluh, Polsek Rumbai, Polsek Rumbai Pesisir, Polsek Tenayan Raya, dan Polsek Kawasan Pelabuhan.

Polresta Pekanbaru berdiri sejak tahun 1975 dengan nama awal yaitu Poltabes (Kepolisian Kota Besar) Pekanbaru dan diganti menjadi Polresta Pekanbaru pada tanggal 30 September 2010. Pada tanggal 14 April 2000 juga Poltabes mengalami kebakaran karena arus pendek listrik. Polresta Pekanbaru sudah pernah dijabat oleh 27 pemimpin pertama hingga sekarang, yaitu:

- |                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| 1. LETKOL Drs BAMBANG DARUNRIO | 1975-1976 |
| 2. LETKOL Drs SUKARDI          | 1976-1977 |
| 3. LETKOL Drs SUMITRO          | 1977-1978 |
| 4. LETKOL Drs BURAYA SIDI      | 1978-1979 |
| 5. LETKOL Drs RAINAN DURAHMAN  | 1979-1980 |

6.	LETKOL Drs SYAHRIL ARIFIN	1980-1981
7.	LETKOL DrsMULYONO. S	1981-1985
8.	LETKOL Drs DWI PURWANTO	1985-1989
9.	LETKOL Drs BAGUS HARI SANJAYA	1989-1990
10.	LETKOL Drs YOSE RIZAL	1990-1992
11.	LETKOL Drs HASYIM IRIANTO	1992-1994
12.	LETKOL Drs RAHMAN NIANSYAH	1994-1996
13.	LETKOL Drs DIDI DITO	1996-1998
14.	LETKOL Drs SURO JAUHARI	1998-2000\
15.	KOMBES POL Drs RASYID RIDHO	2000-2001
16.	KOMBES POL Drs TOTOY JAUHARI, SH, MH	2001-2002
17.	KOMBES POL Drs SURO JAUHARI, MM	2002-2005
18.	KOMBES POL Drs ELAN SUBILAN, SH, MM	2005-2006
19.	KOMBES POL Drs JAMES UMBOH	2006-2006
20.	KOMBES POL Drs SYAFRIL NURSAL, SH,MM	2006-2008
21.	KOMBES POL Drs MOEGIARTO SH,M.HUM	2008-2008
22.	KOMBES POL Drs BERTY DK SINAGA	2008-2009
23.	KOMBES POL Drs MUJIYONO SH, M.HUM	2009-2010
24.	KOMBES POL Drs BAMBANG HS, M.Si	2010-2011
25.	KOMBES POL Drs R.ADANG GINANJAR S,MM	2011-2013
26.	KOMBES POL Drs ROBERT HARYANTO W.,S.H.,S.SOS.,M.H	2013-2015
27.	KOMBES POL Drs ARIES SYARIEF HIDAYAT, MM	2015-2016
28.	KOMBES POL TONNY HERMAWAN R., S.I.K.	2016-2017
29.	KOMBES POL SUSANTO, S.I.K., S.H., M.H.	2017-sekarang

**(Sumber: Dokumentasi Polresta Pekanbaru)**

## **B. TRIBATA, CATUR PRASETYA, dan LOGO POLRESTA PEKANBARU**

Penjelasan yang dilakukan peneliti mengenai Tribata, Catur Prasetya, dan Logo Polresta Pekanbaru ini bersumber dari dokumentasi Polresta Pekanbaru. Penjelasan tersebut merupakan dokumentasi asli dan tidak dapat diubah oleh peneliti.

**1. Tribata:**

- (a) Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (b) Menjunjung tinggi kebenaran keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.
- (c) Senantiasa melindungi mengayomi dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.

**2. Catur Prasetya:**

Sebagai insan bhayangkara kehormatan saya adalah berkorban demi masyarakat bangsa dan negara untuk:

- (a) Meniadakan segala bentuk gangguan keamanan
- (b) Menjaga keselamatan jiwa raga harta benda dan hak asasi manusia
- (c) Menjamin kepastian berdasarkan hukum
- (d) Memelihara perasaan tenteram dan damai.

**3. Logo:**



Gambar 2.1. Logo Polresta Pekanbaru Riau

Sumber: Dokumentasi Polresta Pekanbaru Riau

**(Sumber: Dokumentasi Polresta Pekanbaru)**

## **C. VISI DAN MISI POLRESTA PEKANBARU**

Penjelasan yang dilakukan peneliti mengenai Visi dan Misi Polresta Pekanbaru ini bersumber dari dokumentasi Polresta Pekanbaru. Penjelasan tersebut merupakan dokumentasi asli dan tidak dapat diubah oleh peneliti.

### **1. Visi**

Polantas yang mampu menjadi pelindung, pengayom pelayanan masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama dengan masyarakat serta sebagai aparat penegak hukum yang professional dan proporsional yang selalu menjunjung tinggi supermasi hukum dan hak asasi manusia memelihara keamanan dan ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

### **2. Misi:**

- (a) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan para pemakai jalan sehingga para pemakai jalan aman selama dalam perjalanan selamat sampai tujuan.
- (b) Memberikan bimbingan kepada masyarakat lalu lintas melalui upaya preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan ketaatan serta kepatuhan kepada ketentuan peraturan lalu lintas.
- (c) Menegakkan peraturan lalu lintas secara professional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supermasi hukum dan HAM.
- (d) Memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dengan memerhatikan norma-norma dan nilai hukum yang berlaku.
- (e) Meningkatkan upaya konsolidasi ke dalam upaya menyamakan misi polantas.

**(Sumber: Dokumentasi Polresta Pekanbaru)**

## **D. SATUAN BINMAS POLRESTA PEKANBARU**



Gambar 2.2. Logo Satuan Binmas Polresta Pekanbaru Riau  
Sumber: Dokumentasi Satuan Binmas Polresta Pekanbaru Riau

## **E. VISI DAN MISI SATUAN BINMAS POLRESTA PEKANBARU**

Penjelasan yang dilakukan peneliti mengenai Visi dan Misi Satuan Binmas Polresta Pekanbaru ini bersumber dari dokumentasi Satuan Binmas Polresta Pekanbaru. Penjelasan tersebut merupakan dokumentasi asli dan tidak dapat diubah oleh peneliti.

### **1. Visi**

Terwujudnya kesadaran hukum dan kepatuhan hukum kepada masyarakat Pekanbaru guna meningkatkan peran serta masyarakat dan instansi terkait melalui kegiatan Perpolisian Masyarakat agar tercipta situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.

### **2. Misi**

- (a) Melaksanakan operasional Polri secara profesional, transparan dan akuntabel.
- (b) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar taat dan patuh pada hukum.
- (c) Melaksanakan upaya internalisasi di lingkungan seluruh anggota Polri.
- (d) Penguasaan dan pemahaman Perpolisian Masyarakat.

- (e) Menggiatkan secara terus menerus siskamling.
- (f) Meningkatkan pemberdayaan potensi masyarakat.
- (g) Meningkatkan jalinan kerjasama dan kemitraan.
- (h) Meningkatkan pembinaan kepada PPNS, Polsus, Satpam, dan lain-lain.
- (i) Mendimanisir Sat. Pol. PP selaku Pemerintah Daerah.
- (j) Pemberdayaan dan pengembangan FKPM.

**(Sumber: Dokumentasi Satuan Binmas Polresta Pekanbaru)**

## **F. TUGAS POKOK SATUAN BINMAS POLRESTA PEKANBARU**

Penjelasan yang dilakukan peneliti mengenai Tugas Pokok Satuan Binmas Polresta Pekanbaru ini bersumber dari dokumentasi Satuan Binmas Polresta Pekanbaru. Penjelasan tersebut merupakan dokumentasi asli dan tidak dapat diubah oleh peneliti.

1. Memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi binmas pada tingkat Polresta.
2. Menyelenggarakan pembinaan swakarsa untuk memelihara dan menciptakan suasana aman dan tertib di lingkungan masyarakat melalui usaha pengamanan yang tumbuh dan berkembang atas kehendak dan kemampuan masyarakat itu sendiri termasuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
3. Menyelenggarakan pembinaan potensi masyarakat untuk memelihara serta meningkatkan situasi dan kondisi masyarakat yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas kepolisian serta mencegah timbulnya faktor kriminogen.
4. Menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan terhadap remaja, anak-anak, pelajar dan pemuda terutama dalam rangka mencegah dan menanggulangi kenakalan remaja.
5. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan organisasi/ badan/ instansi di dalam dan di luar Polri pada tingkat Mapoltabes dalam rangka pelaksanaan fungsi tersebut butir 2 sampai dengan 4 ayat ini.
6. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama serta mengawas dan memberikan bimbingan teknis kepada alat kepolisian khusus yaitu aparat yang berdasarkan

undang-undang atau atas kuasa undang-undang mempunyai kewenangan kepolisian terbatas dalam bidangnya masing-masing.

**(Sumber: Dokumentasi Satuan Binmas Polresta Pekanbaru)**

## **G. STRUKTUR ORGANISASI, PANGKAT, serta TUGAS SATUAN BINMAS POLRESTA PEKANBARU**

Penjelasan yang dilakukan peneliti mengenai Struktur Organisasi, Pangkat, serta Tugas Satuan Binmas Polresta Pekanbaru ini bersumber dari dokumentasi Satuan Binmas Polresta Pekanbaru. Penjelasan tersebut merupakan dokumentasi asli dan tidak dapat diubah oleh peneliti.

### **1. Struktur Organisasi dan Pangkat Satuan Binmas Polresta Pekanbaru**

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>PANGKAT / NRP</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KET</b>
1	SUNARTI	AKP / 67010333	PS.KASAT BINMAS	
2	AMRU HUTAURUK, SH	AKP / 73100490	WAKASAT BINMAS	
3	UDAYAT RUSDANI	AKP / 60060952	KANIT BINTIBMAS	
4	RUSPEL SIMATUPANG	IPTU / 61030001	PS. KANIT BINPOLMAS	
5	SULASTRI	IPTU / 66060264	PS. KANIT BINKAMSA	
6	HENDRI	IPDA / 64110599	KAUR BIN OPS	
7	HARFIRMAN	AIPTU / 63100219	ANGGOTA SAT BINMAS	
8	OJAHAN SINAGA, SE	AIPTU/ 68110330	PS. PANIT BINPOLMAS	
9	LINTONG SIANTURI	AIPTU / 64120099	ANGGOTA	

			SAT BINMAS	
10	SRI KOMALA SARI	AIPTU/74020113	Ps. KAUR MINTU	
11	OSKAR DOLOK SARIBU	AIPTU / 71110083	ANGGOTA SAT BINMAS	
12	RUSMAN P.SIREGAR	AIPTU / 76050174	PS. PANIT BINTIBMAS	
13	SUPRATMIN	AIPTU / 75100693	ANGGOTA	
14	ERIKSON	BRIPKA/80040258	ANGGOTA	
15	RISKY SURYA DARMA	BRIPKA / 83020806	ANGGOTA	
16	CANDRA TUMPAK HARIANJA	AIPDA / 78070608	ANGGOTA	
17	DONI SATRIA	BRIPKA / 85100616	ANGGOTA	
18	DADI CAHYONO, SH	BRIGADIR / 86061885	ANGGOTA	
19	OMAS APRIANI	BRIGADIR / 86041896	ANGGOTA	
20	SURTY JULIANA	PENGATUR TK. I / 197008071992012002	ANGGOTA	

Tabel 2.1. Struktur Organisasi dan Pangkat Satuan Binmas Polresta Pekanbaru  
Sumber: Dokumentasi Binmas Pekanbaru Riau

## 2. Tugas Satuan Binmas Polresta Pekanbaru

Kasat Binmas yang dijabat oleh AKP Sunarti bertugas dibidang satbinmas setiap harinya yang bertanggung jawab kepada Kapolres KOMBES Polsusanto, S.I.K., S.H., M.H. dibawah kendali Wakapolres Edy Sumardi Priadinata, S.I.K. Dalam melaksanakan tugasnya, kasat binmas dibantu oleh:

### (a) Kaur Binops

Kepala Urusan Pembinaan Operasional (Kaurbinopsnal), bertugas melakukan pembinaan administrasi di bidang operasional kegiatan pembinaan, keamanan,

ketertiban masyarakat, pam swakarsa dan Polmas serta melaksanakan anev atas pelaksanaan tugas pembinaan masyarakat di lingkungan Polresta Pekanbaru. Kaur Binops Polresta Pekanbaru dijabat oleh Iptu Hendri.

(b) Kaur Mintu

Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Kaurmintu), bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan Satuan Binmas Polresta Pekanbaru. Kaur Mintu Polresta Pekanbaru dijabat oleh Aiptu Sri Komalasari.

(c) Kanit Binpolmas

Kepala Unit Pembinaan Perpolisian Masyarakat (Kanitbinpolmas), bertugas membina dan mengembangkan kemampuan peran serta masyarakat melalui Polmas dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Kanit Binpolmas Polresta Pekanbaru dijabat oleh Iptu Ruspel Simatupang.

(d) Kanit Bintibmas

Kepala Unit Pembinaan Ketertiban Masyarakat (Kanitbintibmas), bertugas melakukan pembinaan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita, dan anak-anak. Kanit Bintibmas Polresta Pekanbaru dijabat oleh AKP Udayat Rusdani.

(e) Kanit Binkamsa

Kepala Unit Pembinaan Keamanan Swakarsa (Kanitbinkamsa), bertugas melakukan pembinaan dan mengembangkan bentuk-bentuk pamswakarsa dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melakukan pembinaan teknis, pengoordinasian dan pengawasan Polsus dan Satpam. Kanit Binkamsa Polresta Pekanbaru dijabat oleh Iptu Sulastri.

**(Sumber: Dokumentasi Satuan Binmas Polresta Pekanbaru)**

## **H. DESKRIPSI PEKERJAAN BINMAS POLSEK**

Penjelasan yang dilakukan peneliti mengenai Deskripsi Pekerjaan Binmas Polsek ini bersumber dari dokumentasi Polsek Bukit Raya, Pekanbaru. Penjelasan tersebut merupakan dokumentasi asli dan tidak dapat diubah oleh peneliti.

1. Membantu pelaksanaan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
2. Membantu pembinaan dan penyuluhan dibidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita dan anak-anak.
3. Membantu memperdayaan peran serta masyarakat dalam kegiatan Polmas yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerjasama antara polsek dengan masyarakat dan pemerintah tingkat kecamatan/ kelurahan serta organisasi non pemerintahan.

**(Sumber: Dokumentasi Polsek Bukit Raya, Pekanbaru)**

## **I. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BHABINKAMTIBMAS**

Penjelasan yang dilakukan peneliti mengenai Standar Operasional Prosedur Bhabinkamtibmas ini bersumber dari Buku Pintar Bhabinkamtibmas, edisi 2 tahun 2015. Penjelasan tersebut merupakan dokumentasi asli dan tidak dapat diubah oleh peneliti. Bhabinkamtibmas merupakan singkatan dari Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang bertugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dan juga merupakan pengembang Pemolisian Masyarakat (Polmas) di desa/ kelurahan.

**(Sumber: Buku Pintar Bhabinkamtibmas, edisi 2 Tahun 2015)**

## **J. TUGAS POKOK, FUNGSI, dan PERANAN BHABINKAMTIBMAS**

Penjelasan yang dilakukan peneliti mengenai Tugas Pokok, Fungsi, dan Peranan Bhabinkamtibmas ini bersumber dari Buku Pintar Bhabinkamtibmas, edisi 2 tahun 2015. Penjelasan tersebut merupakan dokumentasi asli dan tidak dapat diubah oleh peneliti.

### **1. Tugas Pokok Bhabinkamtibmas**

- (a) Melakukan pembinaan terhadap warga masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- (b) Melakukan upaya kegiatan kerjasama yang baik dan harmonis dengan aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat dan para sesepuh yang ada di desa/ kelurahan.
- (c) Melakukan pendekatan dan membangun kepercayaan terhadap masyarakat.
- (d) Melakukan upaya pencegahan tumbuhnya kepercayaan penyakit masyarakat dan membantu menangani rehabilitasi yang terganggu.
- (e) Melakukan upaya peningkatan daya tangkal dan daya cegah warga masyarakat terhadap timbulnya gangguan Kamtibmas.
- (f) Membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam rangka pembinaan Kamtibmas secara Swakarsa di desa/ kelurahan.
- (g) Memberikan bantuan dalam rangka penyelesaian masalah, petunjuk dan melatih masyarakat, dan pelayanan terhadap kepentingan warga untuk sementara waktu dalam rangka pengamanan dan ketertiban umum lingkungan.

### **2. Fungsi Bhabinkamtibmas**

- (a) Membimbing dan menyaluh dibidang hukum dan Kamtibmas.
- (b) Melayani masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas.
- (c) Membina ketertiban masyarakat terhadap norma-norma yang berlaku.
- (d) Memediasi dan memfasilitasi upaya pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat.

- (e) Mendinamisir aktivitas masyarakat yang bersifat positif.
- (f) Mengoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat desa/ kelurahan, Babinsa dan pihak-pihak terkait lainnya.

### **3. Peranan Bhabinkamtibmas**

- (a) Menerima laporan dan/atau pengaduan.
- (b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dengan mengedepankan musyawarah untuk mufakat yang dituangkan dalam surat kesepakatan bersama.
- (c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan tokoh masyarakat setempat.
- (d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa dengan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya.
- (e) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dan sesuai dengan lingkup tugas yang diembankan kepada Bhabinkamtibmas.

**(Sumber: Buku Pintar Bhabinkamtibmas, edisi 2 Tahun 2015)**

## K. DATA BHABINKAMTIBAS JAJARAN POLRESTA PEKANBARU

Penjelasan yang dilakukan peneliti mengenai Data Bhabinkamtibmas Jajaran Polresta Pekanbaru ini bersumber dari Dokumentasi Satuan Binmas Polresta Pekanbaru. Penjelasan tersebut merupakan dokumentasi asli dan tidak dapat diubah oleh peneliti.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH RIAU  
RESORT KOTA PEKANBARU

### DATA BHABINKAMTIBMAS JAJARAN POLRESTA PEKANBARU

NO URUT	NAMA	PANGKAT / NRP	KELURAHAN	KEP BHABINKAMTIBMAS	TMT	STATUS RANMOR		KET
						DINAS	PRIBADI	
1	2	3	4	5	6			7
<b>I</b>	<b>POLSEK PEKANBARU KOTA</b>							
1.	JASMAN	BRIPKA / 62100077	KEL.SUKARAMAI		11-01-2017			
2.	SAPTA PUTRA JAYA	AIPTU/75030102	KEL.SUMAHILANG	NO : KEP / 01 / 1 / 2017	11-01-2017			
3.	JAYADI	AIPTU/ 62020019	KEL.TANAH DATAR	NO : KEP / 01 / 1 / 2017	11-01-2017	√		
4.	ARIF RAHMAN CANIAGO,SH	BRIGADIR/ 84101555	KEL.KOTA TINGGI	NO : KEP / 01 / 1 / 2017	11-01-2017			
5.	KASNAN	AIPDA / 64070107	KEL.KOTA BARU	NO : KEP / 01 / 1 / 2017	11-01-2017			
6.	MUKHTARUDDIN	BRIGADIR /88070324	KEL.SIMP EMPAT	NO : KEP / 01 / 1 / 2017	11-01-2017	√		
<b>II</b>	<b>POLSEK SENAPELAN</b>							
7.	NIKOYAMA	AIPTU /67120198	KEL.PDNG BULAN	NO : KEP / 01 / 1 / 2017	11-01-2017			
8.	JIMMI FARMA	AIPDA/77060541	KEL.KP BANDAR	NO : KEP / 01 / 1 / 2017	11-01-2017	√		
9.	ANTHON.B,SH	AIPDA/76080825	KEL.KP BARU	NO : KEP / 01 / 1 / 2017	11-01-2017	√		
10.	WAWAN ARIFANDI	AIPTU/76100345	KEL.KP DALAM	NO : KEP / 01 / 1 / 2017	11-01-2017			
11.	HERLI ARISTA D	BRIGADIR/77030770	KEL.PD TERUBUK	NO : KEP / 01 / 1 / 2017	11-01-2017			
12.	AZHAR HABIBIE	BRIGADIR/85031113	KEL.SAGO	NO : KEP / 01 / 1 / 2017	11-01-2017			
<b>III</b>	<b>POLSEK SUKAJADI</b>							
13.	H. SYAFRUDDIN	AIPDA / 60010334	KEL.JADIREJO	NO : KEP / 01 / 1 / 2017	11-01-2017			
14.	INDRA SYAMSU	AIPTU / 72070588	KEL.PULAU KARAM	NO : KEP / 01 / 1 / 2017	11-01-2017			
15.	M.GURSI	AIPTU / 72040262	KEL.KAMP MELAYU	NO : KEP / 01 / 1 / 2017	11-01-2017			
16.	M.FAKHRUL	AIPDA/ 79060314	KEL. HARJO SARI	NO : KEP / 01 / 1 / 2017	11-01-2017			
17.	INDRA SAPUTRA	AIPTU/73080378	KEL. SUKAJADI	NO : KEP / 01 / 1 / 2017	11-01-2017			
18.	PITOYO	AIPTU /65110044	KEL.KAMP TENGAH	NO : KEP / 01 / 1 / 2017	11-01-2017	√		
19.	ALFIAN RIEL, SH	BRIPKA /80061153	KEL.KEDUNG SARI	NO : KEP / 01 / 1 / 2017	11-01-2017	√		
<b>IV</b>	<b>POLSEK TAMPAN</b>							
20.	ARISMAN,SH, MH	BRIPKA / 81020312	KEL. DELIMA	NO : KEP / 01 / 1 / 2017	11-01-2017	√		
			KEL. TOBEK GODANG	NO : KEP / 01 / 1 / 2017	11-01-2017			
21.	FEBRI ROSSALIM	BRIPKA/85020265	KEL. SIMP.BARU	NO : KEP / 01 / 1 / 2017	11-01-2017	√		
			KEL. BINA WIDYA	NO : KEP / 01 / 1 / 2017	11-01-2017			
			KEL. AIR PUTIH BARAT	NO : KEP / 01 / 1 / 2017	11-01-2017			
22.	RICO GEVRITAMA ,SH	BRIPKA/85071029	KEL.TUAH KARYA	NO : KEP / 01 / 1 / 2017	11-01-2017			
			KEL. SIALANG MUNGGU	NO : KEP / 01 / 1 / 2017	11-01-2017			
23.	T.LINGGA	AIPTU/60040627	KEL.SDM BARAT	NO : KEP / 01 / 1 / 2017	11-01-2017			
			KEL. TUAH MADANI	NO : KEP / 01 / 1 / 2017	11-01-2017			
<b>V</b>	<b>POLSEK RUMBAL PESIR</b>							

24.	PONIRAN	AIPTU/61090578	KEL.LMBAH DAMAI	NO : KEP / 01 / I / 2017	11-01-2017	√		
25.	DERI EKA PUTRA	BRIGADIR / 86071051	KEL TB TG OKURA	NO : KEP / 02 / IV / 2017	28-04-2017			
26.	SAHALA PANGGABEAN	AIPDA /63040317	KEL. SUNGAI UKAI	NO : KEP / 02 / IV / 2017	28-04-2017			
27.	SAIFUDIN LUBIS	AIPTU/73070574	KEL. LIMB BARU	NO : KEP / 01 / I / 2017	11-01-2017	√		
28.	BAMBANG RIKARDO	AIPTU / 78010049	KEL. LEMBAH SARI		11-01-2017	√		
29.	ISMERIANTO	AIPDA/76060752	KEL. SUNGAI AMBANG		28-04-2017			
30.	MAHMUDI	AIPDA/ 78050880	KEL. LIMBUNGAN	NO : KEP / 01 / I / 2017	11-01-2017			
31.	HAMKA	AIPTU/ 73060444	KEL.MRANTI PANDAK	NO : KEP / 01 / I / 2017	11-01-2017			
<b>VI</b>	<b>POLSEK RUMBAI</b>							
32.	HEBRON K. SE	BRIGADIR/86010899	KEL. PALAS KEL. AGRO WISATA	NO : KEP / 01 / I / 2017 NO : KEP / 01 / I / 2017	11-01-2017 11-01-2017			
33.	SAHAT AFRIANTO	AIPDA/77040042	KEL.SRI MERANTI	NO : KEP / 01 / I / 2017	11-01-2017	√		
34.	ZIO ALRAMOS	AIPDA/80080078	KEL.MUARA FAJAR KEL. MUARA FAJAR BARAT	NO : KEP / 01 / I / 2017 NO : KEP / 01 / I / 2017	11-01-2017 11-01-2017	√		
35.	ROGANDA EXAUDI NABABAN	BRIGADIR/85051900	KEL.RUMBAI BUKIT KEL. MAHARANI KEL. RANTAU PANJANG	NO : KEP / 01 / I / 2017 NO : KEP / 01 / I / 2017 NO : KEP / 01 / I / 2017	11-01-2017 11-01-2017 11-01-2017			
36.	SYOFYANUS	AIPDA/76090519	KEL.UMBAN SARI	NO : KEP / 01 / I / 2017	11-01-2017			
<b>VII</b>	<b>POLSEK PAYUNG SEKAKI</b>							
37.	ALIP SUKRISTİYONO	AIPTU/ 67090326	KEL. LB BARU TIMUR		11-01-2017			
38.	LARDSON DEAN, SH	BRIGADIR/86040768	KEL. AIR HITAM KEL. SUNGAI SIBAM	NO : KEP / 01 / I / 2017 NO : KEP / 01 / I / 2017	11-01-2017 11-01-2017	√		
39.	SUBAGYO	AIPTU/68090172	KEL. LB BARU BARAT KEL. BANDAR RAYA	NO : KEP / 01 / I / 2017 NO : KEP / 01 / I / 2017	11-01-2017 11-01-2017			
40.	JULI WALUYO	BRIGADIR/79070894	KEL. TAMPAN KEL. TIRTA SIAK	NO : KEP / 01 / I / 2017 NO : KEP / 01 / I / 2017	11-01-2017 11-01-2017	√		
<b>VIII</b>	<b>POLSEK TENAYAN RAYA</b>							
41.	SYAFWAN	AIPTU / 72120351	KEL.KULIM KEL. SIALANG RAMPAI KEL. PEBATUAN	NO : KEP / 01 / I / 2017 NO : KEP / 01 / I / 2017 NO : KEP / 01 / I / 2017	11-01-2017 11-01-2017 11-01-2017			
42.	ZALMAN HAREFA	BRIPKA / 84101219	KEL. REJO SARI KEL. SIALANG SAKTI KEL. BAMBU KUNING	NO : KEP / 01 / I / 2017 NO : KEP / 01 / I / 2017 NO : KEP / 01 / I / 2017	11-01-2017 11-01-2017 11-01-2017	√		
43.	INDRA GUNAWAN	AIPTU/76010192	KEL.BENCAH LESUNG KEL. MELEBUNG KEL. INDUSTRI TENAYAN KEL. TUAH NEGERI	NO : KEP / 01 / I / 2017 NO : KEP / 01 / I / 2017 NO : KEP / 01 / I / 2017 NO : KEP / 01 / I / 2017	11-01-2017 11-01-2017 11-01-2017 11-01-2017	√		
44.	BAGUS KUNCORO	BRIPKA /78091117	KEL. BUKIT BARISAN KEL. MENTANGOR KEL. PEMATANG KAPAU	NO : KEP / 01 / I / 2017 NO : KEP / 01 / I / 2017 NO : KEP / 01 / I / 2017	11-01-2017 11-01-2017 11-01-2017	√		
<b>IX</b>	<b>POLSEK BUKIT RAYA</b>							
45.	KHAIRULLAH AL ADDAURI, S.Sos, M.Si	BRIGADIR/ 88010262	KEL.TKRG SELATAN	NO : KEP / 01 / I / 2017	11-01-2017	√		
46.	H. ASRUL HIDAYAT, SH	AIPDA / 77080463	KEL.TKRG UTARA	NO : KEP / 01 / I / 2017	11-01-2017			
47.	WAHONO	AIPTU / 75080076	KEL.TKRG LABUAI	NO : KEP / 01 / I / 2017	11-01-2017			
48.	MAHYUDI SIREGAR	AIPTU / 77080165	KEL. SIMP TIGA	NO : KEP / 01 / I / 2017	11-01-2017			
49.	ANTONI SIREGAR	AIPTU/72010062	KEL. AIR DINGIN		11-01-2017			
50.	ILHAM NUR NG	BRIGADIR / 80080912	KEL.SDM TIMUR	NO : KEP / 01 / I / 2017	11-01-2017	√		
51.	DESRIIL ARIFIN	AIPDA / 77070376	KEL.TKRG BARAT	NO : KEP / 01 / I / 2017	11-01-2017			
52.	MARWAN, SH	BRIPKA / 81050765	KEL.TKRG TENGAH	NO : KEP / 01 / I / 2017	11-01-2017			
53.	GUSRIL	AIPTU/75060995	KEL.MAHARATU					
54.	JONS PUTERA	BRIGADIR / 78060180	KEL. PERHENTIAN MARPOYAN		28-04-2017	√		
55.	ANGGA NOVRIANDA, SH	BRIGADIR / 85111184	KEL.WONOREJO	NO : KEP / 01 / I / 2017	11-01-2017			
<b>X</b>	<b>POLSEK LIMAPULUH</b>							
56.	RUDY GUNAWAN	BRIPKA / 81030314	KEL.RINTIS	NO : KEP / 01 / I / 2017	11-01-2017			
57.	M. HATTA	AIPTU / 64050419	KEL.PESISIR	NO : KEP / 01 / I / 2017	11-01-2017			
58.	M. YUHERMAN	BRIGADIR / 86120860	KEL.SKIP	NO : KEP / 01 / I / 2017	11-01-2017	√		
59.	ROBBY YULLIANTO	BRIGADIR / 8671373	KEL.TJ RHU	NO : KEP / 05 / I / 2017	31-01-2017	√		
60.	ANDI AZHAR	AIPDA / 78110073	KEL.SUKAMAJU	NO : KEP / 01 / I / 2017	11-01-2017	√		

61.	SUSETIO	AIPTU / 72010145	KEL.CINTA RAJA	NO : KEP / 01 / 1 / 2017	11-01-2017			
62	RONY MARDANUS	AIPTU / 63030503	KEL.SUKAMULYA	NO : KEP / 01 / 1 / 2017	11-01-2017			

Table 2.2. Data Bhabinkamtibmas Jajaran Polresta Pekanbaru

Sumber: Dokumentasi Binmas Polresta Pekanbaru

**(Sumber: Dokumentasi Binmas Polresta Pekanbaru)**

## BAB III

### TEMUAN PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai temuan penelitian berupa implementasi pelaksanaan *community policing* oleh Polresta Pekanbaru Riau, khususnya pada pelaksanaan Bhabinkamtibmas Jajaran Polresta Pekanbaru Riau. Pelaksanaan Bhabinkamtibmas Jajaran Polresta Pekanbaru Riau ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III.

#### A. PROGRAM KERJA ANGGOTA BHABINKAMTIBMAS

##### 1. Kegiatan DDS (*Door to Door System*)

Kegiatan DDS (*Door to Door System*) merupakan kegiatan wajib yang berupa mengunjungi rumah-rumah masyarakat, menghadiri kegiatan-kegiatan masyarakat seperti gotong royong, dan penyuluhan ke area tempat-tempat seperti sekolah, kantor, maupun tempat hiburan yang berada dilingkungan Bhabinkamtibmas itu sendiri. Pelaksanaan tersebut dilakukan wajib dengan mengunjungi 2 - 4 rumah masyarakat perharinya tergantung dari anggaran dan keputusan oleh pimpinan. Hal ini diungkapkan oleh Aiptu Susetio Supriadi (Bhabinkamtibmas Kelurahan Cinta Raja, Polsek Lima Puluh), sebagai berikut:

*“Sebagai Bhabinkamtibmas kami ada program namanya DDS, Door To Door System yang diwajibkan berkunjung ke rumah masyarakat minimal 4 rumah satu hari yang dimana dalam DDS itulah kita berinteraksi dengan masyarakat untuk memberikan pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat kamtibmas berupa penyuluhan, ajakan yang berhubungan dengan keamanan dan ketentraman.”*  
(Aiptu Susetio Supriadi, wawancara 4 Desember 2017).



Gambar 3.1. Kunjungan DDS oleh Bhabinkamtibmas Polsek Bukit Raya  
Sumber: Dokumentasi Binmas Polsek Bukit Raya

## 2. **Kegiatan *Problem Solving***

*Problem solving* merupakan penyelesaian masalah-masalah (tindak pidana ringan) diluar jalur hukum. Anggota Bhabinkamtibmas menjembatani atau menyelesaikan permasalahan antar kedua pihak yang bermasalah. Proses dalam menyelesaikan *problem solving* ini dengan melakukan pemanggilan terhadap saksi atau tersangka. Penyelesaian masalah juga dibantu oleh petinggi masyarakat seperti RT, RW, dan tokoh agama sebagai saksi. Penyelesaian masalah akan selesai dengan cara kedua pihak yang bermasalah sepakat untuk berdamai dan selanjutnya membuat surat perjanjian untuk tidak mengulangnya lagi. Apabila masalah tersebut terbilang masalah kecil, maka dapat diselesaikan dengan cara musyawarah atau mufakat. Dikarenakan masalah tersebut tidak harus diselesaikan melalui jalur hukum. Namun apabila permasalahan menyangkut kriminal, maka akan diserahkan ke bagian serse untuk diproses selanjutnya. Seperti pernyataan Aiptu Susetio Supriadi (Bhabinkamtibmas Kelurahan Cinta Raja, Polsek Lima Puluh), sebagai berikut:

*“Ada program problem solving. Penyelesaian masalah diluar jalur hukum. Itu hanya bisa masalah-masalah kecil. Tindak pidana ringan. Misalnya anaknya masalah perkelahian, kita selesaian antar warga dibantu oleh pemuka masyarakat setempat sebagai saksi bisa RT RW atau tokoh agama. Karena itulah gunanya bhabinkamtibmas. Karena semua persoalan dimuarakan ke proses hukum kan tentu akan apa*

*banyak perkara yang harus dikerjakan, akhirnya kedua belah pihak akan terganggu aktivitasnya. Nanti dipanggil sebagai saksi atau tersangka, dipanggil sidangkan berulang-ulang kali. Kalau masalah kecil tu sebaiknya dimusyawarahkan ajalah misalnya mufakat supaya kayak budaya Indonesia dulukan kita gali. Sama problem solving, penyelesaian masalah. Suatu masalah itu tidak harus diselesaikan melalui jalur hukum. Tapi tidak semua masalah bisa di problem solving kan, seperti narkoba tidak, pembunuhan tidak, kayak-kayak tindak pidana ringan.” (Aiptu Susetio Supriadi, wawancara 4 Desember 2017).*



Gambar 3.2. *Problem solving* oleh Bhabinkamtibmas Polsek Tampan  
Sumber: Dokumentasi Binmas Polsek Tampan

Dalam prosedur pengaduan *problem solving* yang ada di lingkungan masyarakat, masyarakat dapat mengadukan permasalahan tersebut melalui RT (Rukun Tetangga), RW (Rukun Warga), anggota FKPM ataupun dapat langsung mengadukan ke Anggota Bhabinkamtibmas terkait, karena pada dasarnya pengaduan masyarakat yang telah di terima RT atau RW akan dilaporkan ke Anggota Bhabinkamtibmas terkait. Seperti pernyataan Bripta Zalman Harefa (Bhabinkamtibmas Kelurahan Rejosari, Bambu Kuning, dan Sialang Sakti, Polsek Tenayan Raya), sebagai berikut:

*“Boleh langsung ke Bhabinkamtibmasnya. Nanti kita undang dulu yang punya masalah, kita denger permasalahannya apa, kita bisa*

*menyelesaikannya disitu secara mediasi. Itu tidak perlu menunggu-menunggu dari FKPM. Dan FKPM biasanya akan melapor juga ke bhabinkamtibmas dulu. Dilibatkan. Pasti dilibatkan.”* (Bripka Zalman Harefa, wawancara 22 November 2017).

### **FKPM dan BKPM Bhabinkamtibmas**

FKPM (Forum Kemitraan Pemolisian Masyarakat) adalah sebuah kelompok yang beranggotakan masyarakat secara sukarela di wilayah Bhabinkamtibmas. Tugas FKPM adalah membantu kerja anggota Bhabinkamtibmas dalam *problem solving* masyarakat. Sedangkan BKPM (Balai Kemitraan Permolisian Masyarakat) adalah suatu tempat berkumpulnya anggota FKPM atau masyarakat dan Anggota Bhabinkamtibmas dengan tujuan menyelesaikan *problem solving* ataupun mengadakan rapat yang berhubungan dengan kegiatan masyarakat. Wadah untuk BKPM terletak dirumah warga, rumah Bhabinkamtibmas, maupun ruangan yang disediakan dikantor kelurahan. Pembentukan FKPM beserta anggota ini tergantung dari masing-masing polsek yang ada di sekitar Polresta Pekanbaru. Ada yang dibentuk oleh polisinya sendiri lalu masyarakat mengikuti sebagai anggota, ada pula yang langsung dibentuk oleh masyarakat sendiri. Seperti pernyataan yang disampaikan oleh Aiptu Jayadi (Bhabinkamtibmas Kelurahan Tanah Datar, Polsek Pekanbaru Kota), sebagai berikut:

*“Masyarakat sendiri yang bentuk. Kita selaku Bhabinkamtibmas teknisnya aja. Ya kita kan disitu fungsi FKPM untuk menyelesaikan lingkungan. Kita kasih arahan. Ini kalau mau selesai, dampaknya bagaimana. Itu dikoordinasi oleh Bhabinkamtibmasnya.”* (Aiptu Jayadi, wawancara 18 November 2017).

Anggota-anggota dari FKPM itu sendiri terdiri dari RT, RW, dan tokoh masyarakat yang juga bekerjasama dengan pihak kelurahan. Seperti pernyataan dari Iptu Saptono (Kanit Binmas Polsek Sukajadi), sebagai berikut:

*“Kalau FKPM langsung masyarakat. Masyarakat yang bentuk tapi nanti pas waktu pelantikan atau pengukuhan kami selalu di undang, kami selalu dijemput, sekurang-kurangnya kami diberi tahu. Inilah*

*susunan FKPM susunan ntah ada keamanannya dilingkungan itu. FKPM itu terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat. RT RW dilibatkan menjadi anggota FKPM. Jadi kalau ada masalah di wilayahnya, pasti akan melapor ke RT sedangkan RT itu anggota FKPM. Tapi ada juga bukan RT RW tapi tetap tokoh masyaraat itu.” (Iptu Saptono, wawancara 17 November 2017).*



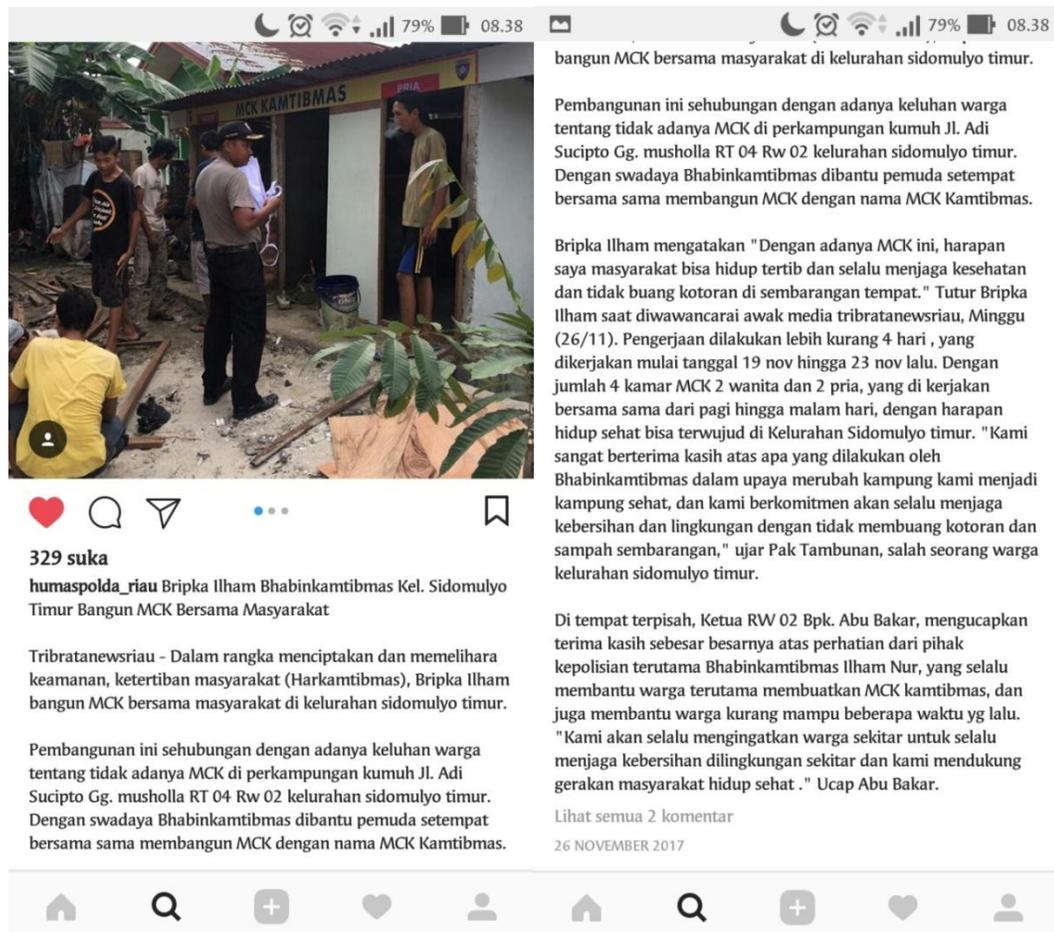
Gambar 3.3. Penyelesaian masalah oleh FKPM dan Bhabinkamtibmas Polsek Bukit Raya

Sumber: Dokumentasi Pribadi

### **3. Kegiatan Kreativitas Bhabinkamtibmas**

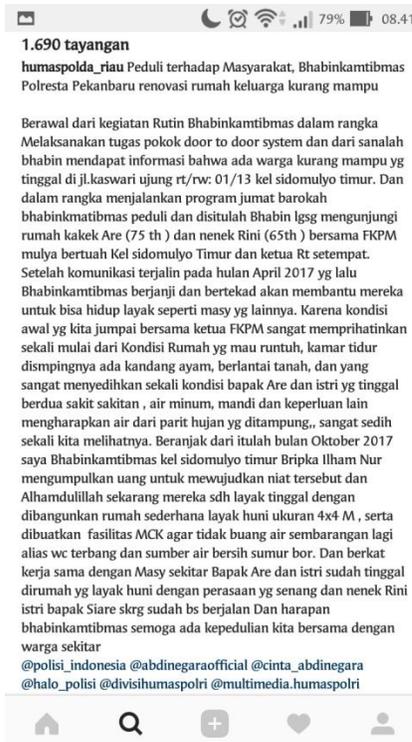
Kegiatan kreativitas Anggota Bhabinkamtibmas adalah kegiatan non pokok yang dilakukan oleh Anggota Bhabinkamtibmas sebagai hasil pemikiran ide pikiran dan berasal dari hati nurani seorang Anggota Bhabinkamtibmas. Anggota Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan kreativitas tersebut setelah mendengar keluhan dari masyarakatnya akibat keprihatinan masyarakat dan Anggota Bhabinkamtibmas terhadap masyarakat yang

membutuhkan pertolongan. Hal ini dilakukan oleh Briпка Ilham Nur, seorang Anggota Bhabinkamtibmas Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai. Briпка Ilham melakukan kegiatan Jumat Barokah Bhabinkamtibmas Peduli, Membuat MCK Kamtibmas yang berasal dari keluhan masyarakatnya, dan Merenovasi rumah keluarga yang kurang mampu (biaya renovasi berasal dari dana pribadi Briпка Ilham).



Gambar 3.4. Pembangunan MCK Kamtibmas oleh Briпка Ilham Nur di Wilayah Kelurahan Sidomulyo Timur

Sumber: [https://www.instagram.com/humaspolda\\_riau/](https://www.instagram.com/humaspolda_riau/)



Gambar 3.5. Perenovasian Rumah Masyarakat Kurang Mampu oleh Bripka Ilham Nur di Wilayah Kelurahan Sidomulyo Timur

Sumber: [https://www.instagram.com/humaspolda\\_riau/](https://www.instagram.com/humaspolda_riau/)

Kegiatan-kegiatan kreativitas yang telah dilakukan oleh Bripka Ilham ini mendapatkan penghargaan dari Kapolda Riau sebagai Bhabinkamtibmas Terbaik Tahun 2017. Penghargaan tersebut tidak hanya diterima Bripka Ilham tetapi juga pihak-pihak terkait dalam menjaga kamtibmas yakni sinergitas 3 Pilar Kebangsaan Kelurahan Sidomulyo timur, Kecamatan Marpoyan Damai. Kelurahan Sidomulyo Timur mendapatkan Penghargaan Kelurahan/ Desa Teraman, Piala Bergilir Kategori Juara Umum Kelurahan Aman untuk Polresta Pekanbaru serta Penghargaan kepada Camat Marpoyan Damai atas kepeduliannya terhadap pos kamling.



Gambar 3.6. Sinergitas 3 Pilar Kebangsaan Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai mendapatkan Penghargaan dari Kapolda Riau dan Polresta Pekanbaru

Sumber: Dokumentasi Pribadi

## B. IMPLEMENTASI *COMMUNITY POLICING* POLRESTA PEKANBARU, RIAU

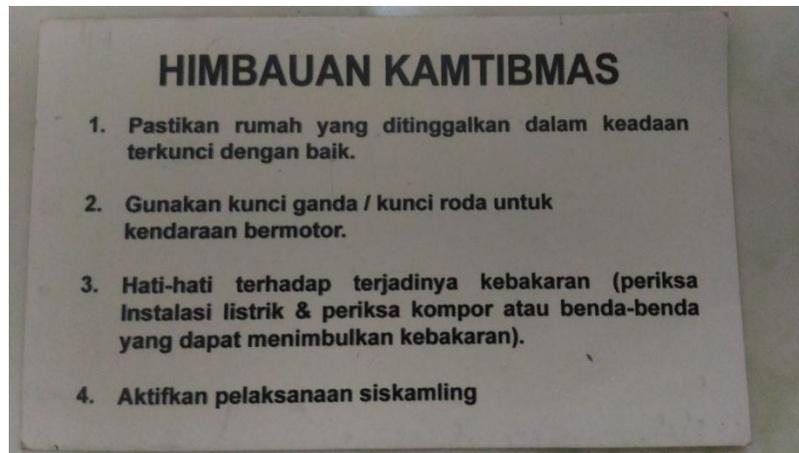
### 1. KOMUNIKASI

Anggota Bhabinkamtibmas melaksanakan komunikasi secara langsung kepada masyarakat dengan memberikan pesan-pesan kamtibmas. Pada saat memberikan pesan-pesan kamtibmas kepada masyarakat, Anggota Bhabinkamtibmas selalu memberikan kartu nama Anggota Bhabinkamtibmas kepada masyarakat, apabila masyarakat membutuhkan bantuan Anggota Bhabinkamtibmas. Tidak hanya sekedar kartu nama, pesan himbauan kamtibmas juga disampaikan Anggota Bhabinkamtibmas yang terletak dibelakang kartu nama Anggota Bhabinkamtibmas.



Gambar 3.7. Kartu Nama Bripka Febri Rossalim, S.H. (Bhabinkamtibmas Kelurahan Simpang Baru, Polsek Tampan)

Sumber: Dokumentasi Pribadi



Gambar 3.8. Himbauan Kamtibmas dibelakang Kartu Nama Anggota Bhabinkamtibmas

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Dalam komunikasi tersebut, Anggota Bhabinkamtibmas juga melakukan penyuluhan dan membina kelompok-kelompok wilayah kamtibmas yakni: Bintibmas, Binredawan, dan Binkamsa. Hal ini disampaikan oleh Aiptu Jayadi (Bhabinkamtibmas Kelurahan Tanah Datar, Polsek Pekanbaru Kota):

*“Kita ada 3 pembinaan: bintibmas, binredawan, dan binkamsa. Bintibmas itu yang kita kunjungi tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama. Kita ke binredawan. Sasaran kita binredawan*

*ini adalah remaja dan wanita, dimana supaya wanita dan remaja kita tidak terpengaruh dengan pergaulan bebas dan narkoba. Kita ajaklah ntah itu wirid ntah itu olahraga bersama. Kalau binkamsanya sasaran kita pos kamling, satpam-satpam di wilayah kita masing-masing itu kita bina. Termasuk perkantoran. Kita kumpulkan. Apasih kerjanya. Bagaimana cara membuat laporan. Bagaimana cara bertindak. Itu kita kasih arahan. Termasuk membina pos kamling.” (Aiptu Jayadi, wawancara 18 November 2017).*



Gambar 3.9. Penyuluhan ke SPBU dan Sekolah Dasar oleh Bhabinkamtibmas Polsek Tampan

Sumber: Dokumentasi Binmas Polsek Tampan

Materi-materi yang disampaikan pada saat Anggota Bhabinkamtibmas melakukan penyuluhan kepada masyarakat ialah salah satunya materi mengenai paham radikalisme yang sedang terjadi di lingkungan masyarakat. Seperti pernyataan dari Bripta Febri Rossalim, S.H. (Bhabinkamtibmas Kelurahan Simpang Baru, Polsek Tampan), sebagai berikut:

*“Radikalisme itu contohnya anti pancasila, ingin membuat negara sendiri, ingin mengubah dasar negara pancasila, kita kasih pemahaman kepada orang itu. Kalau udah radikal kuat itu ada sampai ngebom.” (Bripta Febri Rossalim, S.H, wawancara 21 November 2017).*

Tidak hanya melakukan penyuluhan terkait paham radikalisme, Anggota Bhabinkamtibmas khususnya Anggota Bhabinkamtibmas Polsek Sukajadi dalam Laporan

Unit Binmas Polsek Sukajadi menjelaskan bahwa Anggota Bhabinkamtibmas Polsek Sukajadi mengajak masyarakat untuk menjadi polisi bagi dirinya sendiri demi terjaganya kamtibmas ditengah masyarakat. Pelaksanaan kamtibmas yang dilakukan Anggota Bhabinkamtibmas Polsek Sukajadi ini bertanggung jawab pada Kapolsek Sukajadi. Kriteria keberhasilannya ialah Polsek Sukajadi memberikan penyuluhan tentang sosialisasi penerimaan Anggota Polri ke sekolah-sekolah serta membuat spanduk (himbauan) untuk sosialisasi penerimaan Polri. Keberhasilan yang dicapai yakni banyaknya animo pelajar yang datang ke kantor Polsek maupun yang bertemu dengan Anggota Polri di jalan menanyakan persyaratan menjadi Anggota Polri. Keberhasilan yang lain dengan banyaknya calon polisi yang menndaftar menjadi antusias masyarakat terhadap masa depan yang akan datang. Dari hasil keberhasilan tersebut menggambarkan bahwa adanya komunikasi timbal balik dari masyarakat terhadap penyuluhan yang dilakukan oleh Anggota Bhabinkamtibmas Polsek Sukajadi.

## **2. SUMBER DAYA**

### **(a) Penempatan Bhabinkamtibmas di Kelurahan**

Saat mengkaji penempatan satu Bhabinkamtibmas perkelurahan saat ini, ada yang setuju dan tidak setuju terkait pemaksimalan pekerjaan Bhabinkamtibmas perkelurahan tersebut.

- (1) Pernyataan Tidak Setuju Terhadap Penempatan Satu Bhabinkamtibmas Satu Kelurahan.

Setiap Anggota Bhabinkamtibmas bertanggung jawab memegang 1 – 3 kelurahan dengan jumlah masyarakat sebanyak 4000 – 30.000 jiwa , tergantung dari luas wilayah per kecamatan. Tak hanya memegang kelurahan, anggota Bhabinkamtibmas harus siap sedia setiap waktu apabila masyarakatnya membutuhkan pertolongan dari Anggota Bhabinkamtibmas. Selain pekerjaan utama Anggota Bhabinkamtibmas ini adalah mengabdikan kepada masyarakat, Anggota Bhabinkamtibmas juga ikut serta dan aktif dalam kegiatan kepolisian lainnya seperti kegiatan patrol, razia malam, dan lain-lain Berikut pernyataan

kontra dari Bripka Shinta Zamelia (Banit I Binmas Polsek Bukit Raya) mengenai penempatan satu bhabinkamtibmas per kelurahan:

*“Kalau misalnya dibilang efektif tidak efektifnya, pasti tidak efektif ya. Soalnya 1 kelurahan itu kan besar, dipegang 1 polisi, itu waktunya kadang pagi bhabinkamtibmas dapat telpon pak disini ada masalah, nanti malam dapat telpon gimana badannya waktu itu sendiri kan. Jadi waktunya itu. Intensitas kerjanya kan jadi berlebih bertambah, sementara di bhabinkamtibmas dia juga aktif. Nanti dari polsek, dia juga aktif misalnya ada kegiatan patroli, diikutkan Bhabinkamtibmasnya. Ada kegiatan razia malam, diikutkan lagi Bhabinkamtibmasnya. Kadang Bhabinkamtibmas ini pun mengeluh sendiri, makanya gak efektif kalau misalnya 1 kelurahan tu dipegang 1 Bhabinkamtibmas.”* (Bripka Shinta Zamelia, wawancara 17 November 2017).

(2) Pernyataan Setuju Terhadap Penempatan Satu Bhabinkamtibmas Satu Kelurahan.

Ada beberapa Anggota Bhabinkamtibmas yang setuju dengan pernyataan penempatan satu Anggota Bhabinkamtibmas memegang satu kelurahan. Namun dari pernyataan yang setuju tersebut, beberapa Anggota Bhabinkamtibmas ini memiliki syarat-syarat tertentu. Seperti yang disampaikan oleh Brigadir Robby Yulianto (Bhabinkamtibmas Kelurahan Tanjung RHU, Polsek Lima Puluh), sebagai berikut:

*“Kalau menurut saya, saya sih enjoy aja. Asalkan kita bisa memberdayakan RT RW untuk mengelola lingkungannya melalui petugas siskaming ronda. Karena bagian tugas dari kepolisian itu ada di pos ronda, diatur dalam UUD 1945, setiap warga negara berhak menjaga keamanan kamtibmas. Jadi setiap warga negara itu memang sudah dilibatkan untuk menjaga keamanan. Kita mensinergikan antara Bhabinkamtibmas dan unsur-unsur yang ada di kelurahan kayak RT, RW, FKPM (Forum Kemitraan Polisi Masyarakat). Melalui mereka*

*kita usahakan mereka membentuk petugas ronda agar petugas kepolisian bisa dilaksanakan dengan mereka. Karena tidak mungkin 1 polisi dia menjaga 24 jam daerah kelurahan itu. Jadi dia harus dibantu. Disitu fungsi kita pembinaan keamanan ketertiban. Kita yang membina mereka. Untuk efektif tugas di kelurahan itu sebenarnya gak perlu banyak. 1 aja asal bisa merangkul semua. Berjalan semua tugas bhabinkamtibmas itu.” (Brigadir Robby Yulianto, wawancara 4 Desember 2017).*

Pernyataan tersebut didukung oleh Iptu Saptono (Kanit Binmas Polsek Sukajadi):

*“Untuk sementara masih efektif. Masih bisa ditanggulangi, karena kan gak semua masyarakat itu bermasalah. Itupun masalahnya kalaupun ada gak setiap hari. Paling ntar 2 hari sekali seminggu sekali atau sebulan sekali. Berselisihnya paling-paling ya sampah, pagar, atau ya itulah pembatas. Bhabinkamtibmas ini tidak 100% menjalini profesinya. Soalnya polisi ini dengan cara perbandingan dengan masyarakat ini tidak seimbang. Seharusnya 1 polisi ini memegang 350 orang,. Sekarang 1 polisi melayani 1 kelurahan.” (Iptu Saptono, wawancara 17 November 2017).*

#### **(b) Pemilihan Anggota Bhabinkamtibmas**

Sebelum saat ini Bhabinkamtibmas berjaya di lingkungan masyarakat, dahulu banyak yang beranggapan bahwa anggota kepolisian yang bertugas sebagai Bhabinkamtibmas ataupun Binmas memiliki nilai kualitas yang rendah. Pada saat itu pula banyak anggota polisi yang bertugas di Samsat, Satlantas, dan lain-lain (kecuali Binmas maupun Bhabinkamtibmas). Namun semenjak Bhabinkamtibmas dimunculkan, banyak anggota kepolisian yang berasal dari Shabara, Satlantas, dan lain-lain mendaftarkan dirinya sebagai Anggota Bhabinkamtibmas. Pada umumnya setiap anggota kepolisian sebenarnya mempunyai tugas sebagai Anggota

Bhabinkamtibmas, tetapi di dalam Bhabinkamtibmas ini memiliki orang-orang khusus yang dapat bermasyarakat secara lebih mendalam.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti ke enam polsek yang ada disekitar Polresta Pekanbaru, didapatkan hasil dari syarat-syarat anggota kepolisian yang dapat menjadi anggota bhabinkamtibmas. Syarat-syaratnya ialah:

(1) Berniat menjadi Anggota Bhabinkamtibmas

Sebelum mengajukan diri sebagai Anggota Bhabinkamtibmas, calon Anggota Bhabinkamtibmas harus memantaskan dirinya apakah dirinya bisa bekerja di Bhabinkamtibmas atau tidak dan juga Anggota Bhabinkamtibmas harus memiliki niat yang baik dan ikhlas supaya pekerjaan ia nantinya berjalan sesuai yang diharapkan oleh dirinya dan masyarakatnya. Pernyataan ini bersamaan dengan pernyataan dari Bripka Jasman (Bhabinkamtibmas Kelurahan Sukaramai, Polsek Pekanbaru Kota), yakni:

*"Yang jelas dia mau jadi Bhabinkamtibmas. Itu aja. Kalau tidak mau ya suka-suka hati jalannya."* (Bripka Jasman, wawancara 18 November 2017).

(2) Mendaftarkan diri

Setelah diharuskan memiliki niat yang baik, tahap selanjutnya calon Anggota Bhabinkamtibmas mendaftarkan dirinya ke polsek terdekat dengan wilayahnya. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Iptu Saptono (Kanit Binmas Polsek Sukajadi):

*"Kalau itu, itu pertama mereka mendaftar dulu, mencalonkan. Itu salah satu."* (Iptu Saptono, wawancara 17 November 2017).

(3) Mengajukan surat permohonan

Calon Anggota Bhabinkamtibmas wajib mengajukan surat permohonan dari Polsek ke Polresta. Pernyataan ini disampaikan oleh Bripka Shinta Zamelia (Banit I Binmas Polsek Bukit Raya):

*“Mengajukan permohonan ke polresta ke kasat binmas untuk menjadi Bhabinkamtibmas.”* (Bripka Shinta Zamelia, wawancara 17 November 2017).

(4) Mendapatkan surat rekomendasi dari kelurahan

Sebelum mengajukan surat permohonan ke Kasat Binmas Polresta, hal yang harus dilakukan oleh calon Anggota Bhabinkamtibmas adalah mendapatkan surat rekomendasi dari pihak kelurahan, RT, RW, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Pernyataan ini disampaikan oleh Aiptu Susetio Supriadi (Bhabinkamtibmas Kelurahan Cinta Raja, Polsek Lima Puluh):

*“Dia harus dapat rekomendasi dari masyarakat. Surat dari lurah, kalau desa dari balai desa. Dari masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, ada koordinasinya.”* (Aiptu Susetio Supriadi, wawancara 4 Desember 2017).

(5) Mengikuti panggilan wawancara

Setelah calon Anggota Bhabinkamtibmas dinyatakan lolos dibagian administrasi, maka langkah berikutnya ialah mengikuti wawancara. Pertanyaan wawancara dapat berupa keinginan masuk bhabinkamtibmas, alamat tinggal, dan lain-lain. Berikut pernyataan dari Aiptu Susetio Supriadi (Bhabinkamtibmas Kelurahan Cinta Raja, Polsek Lima Puluh):

*“Berupa kita dipanggil untuk wawancara. Gak mungkin kita tinggalnya jauh, jarak tempuh kita ke situ berapa lama, kapan sampai. Kan kalau tengah malam kita dibutuhkan oleh masyarakat kan, harus bisa secepatnya kita sampai ke daerah tugas kita tu. Jadi diusahakan harus polisi yang tinggal di desa/ kelurahan tersebut yang jadi Bhabinkamtibmasnya. Kalaupun tidak ada, kelurahan atau desa tetangga. Pokoknya jangan sampai kelurahan/ desa yang jauh butuh waktu lama, karena sewaktu-waktu dipanggil oleh masyarakat kan cepat sampainya.”* (Aiptu Susetio Supriadi, wawancara 4 Desember 2017).

(6) Mendapatkan penilaian dari pimpinan

Dari hasil wawancara tersebut pimpinan dapat memberikan penilaian kepada calon Anggota Bhabinkamtibmas. Namun penilaian tersebut bukan hanya dari segi administrasi ataupun wawancara, akan tetapi pimpinan juga menilai dari proses kerja calon Anggota Bhabinkamtibmas sebagai anggota polisi (sebelum menjadi Anggota Bhabinkamtibmas). Pernyataan yang sama dengan hal ini, pernyataan dari Iptu Zainal Arifin (Kanit Binmas Polsek Pekanbaru Kota):

*“Kemudian penilaian pimpinan. Pimpinan dari Kanit, Kapolsek, Kasat kalau di Polres. Kalau dia tidak menjiwai percuma aja dia jadi Bhabinkamtibmas.”* (Iptu Zainal Arifin, wawancara 18 November 2017).

Penjelasan yang lebih mendalam mengenai penilaian dari pimpinan disampaikan oleh Iptu Saptono (Kanit Binmas Polsek Sukajadi):

*“Kalau itu, pertama mereka mendaftar dulu, mencalonkan. Keduanya itu pemilihan dari pimpinan. Kita dari sini bertahap. Kasium ini bagian umum, kalau disini bagian pers kecilnya lah. Dia mencoba membuat menginput lalu melanjutkan ke Polres. Nanti Polres mendata ini cocok gak. Ditanya lagi ke Kanitnya atau ke Kapolseknya. Kalau kira-kira ini layak dan cocok baru di input ke situ. Terus dibikinkan spprinnya TR atau surat perintahnya ke Polda. Kalau sekarang TR di polres.”* (Iptu Saptono, wawancara 17 November 2017).

(7) Minimal berpangkat Briptu dan berpengalaman

Tidak semua anggota polisi yang bisa menjadi Anggota Bhabinkamtibmas. Seorang polisi harus memiliki pengalaman khususnya bermasyarakat dan memiliki pangkat Briptu. Jika ada anggota polisi berpangkat Bripda, maka akan ditolak dikarenakan anggota polisi masih belum lama berdinasi dan belum memiliki pengalaman dalam bermasyarakat. Hal ini disampaikan oleh Iptu Zainal Arifin (Kanit Binmas Polsek Pekanbaru Kota):

*“Iya. Pangkatnya minimal briptu 2 kuning. Kalau bripta belum bisa. Karena 1 kali pangkat ini kan 4 tahun dinas, udah tau situasikan. Naiklah 1 tingkat. Ya itu dia harus mengayomi masyarakat. Harus pandai kita.”* (Iptu Zainal Arifin, wawancara 18 November 2017).

(8) Berasal dari mantan anggota reserse

Syarat ini juga menjadi penting dalam menentukan Anggota Bhabinkamtibmas. Calon Anggota Bhabinkamtibmas yang dulunya berasal dari Anggota Reserse atau Reskrim dipercaya dapat menyelesaikan permasalahan, karena mengerti dan paham akan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan masyarakat. Pernyataan ini dijelaskan oleh Briпка Febri Rossalim, S.H. (Bhabinkamtibmas Kelurahan Simpang Baru, Polsek Tampan):

*“Dari polisi, akhirnya jadi polisi Bhabinkamtibmas. Kriterianya itu yang diutamakan adalah mantan-mantan anggota Reserse, karena mereka itu ada kriteria untuk menyelesaikan permasalahan. Contohnya itu dia lebih paham UU, KUHP dan juga KHU. Sekarang lagi digalakkan seperti itu.”* (Briпка Febri Rossalim, S.H., wawancara 21 November 2017).

(9) Menguasai 5 bidang fungsi kepolisian

Seorang calon Anggota Bhabinkamtibmas wajib memiliki 5 bidang fungsi kepolisian. Bidang-bidang ini mewakili seluruh pekerjaan yang ada di kepolisian, karena diharapkan supaya calon Anggota Bhabinkamtibmas ini dapat mengabdikan ke masyarakat secara maksimal. Pernyataan ini disampaikan oleh Briпка Zalman Harefa (Bhabinkamtibmas Kelurahan Rejosari, Bambu Kuning, dan Sialang Sakti, Polsek Tenayan Raya):

*“Kriteria khusus, dia harus menguasai 5 bidang fungsi. Terutama bidang Binmas, bidang Serse, bidang Lantas, bidang Intel. Semua harus dikuasai.”* (Briпка Zalman Harefa, wawancara 22 November 2017).

(10) Memiliki budaya sopan, santun, dan mengenal masyarakat

Dari semua persyaratan di atas, persyaratan yang paling penting adalah memiliki budaya sopan, santun, dan mengenal masyarakat. Jika seorang calon Anggota Bhabinkamtibmas memiliki sifat tersebut, maka ia dapat menjadi Anggota Bhabinkamtibmas. Pernyataan tersebut diberikan oleh Bripka S. Bagus Kuncoro (Bhabinkamtibmas Kelurahan Tangkerang Timur, Pematang Kapau, dan Mentangor, Polsek Tenayan Raya):

*“Dia lebih mengenal masyarakatnya. Cuma ya itu. Kita budayakan budaya arogan, etika, sopan santun masih kurang. Kalau kata Mantan Kapolri Pak Badrodin Haiti, Bhabinkamtibmas itu tak perlu orang yang pintar pandai, cukup orang yang sopan santun dan mengenal etika.”* (Bripka S. Bagus Kuncoro, wawancara 22 November 2017).

**(c) Pelatihan Khusus Anggota Bhabinkamtibmas (sebelum dan setelah menjadi bhabinkamtibmas)**

- (1) Pelatihan da’I kamtibmas dan pelatihan negosiator (lokasi: SPN, Pekanbaru)

Pelatihan da’I kamtibmas dan pelatihan negosiator menurut Bripka Shinta Zamelia (Banit I Binmas Polsek Bukit Raya):

*“Ada. Pelatihan itu ada banyak. Misalnya dari SPN itu pelatihannya ada da’I kamtibmas, kayak menyampaikan penyuluhan kamtibmas yang baik itu seperti apa. Ada juga pelatihan negosiator misalnya kayak demo, Bhabinkamtibmas bisa maju negosiasi sama pendemonya.”* (Bripka Shinta Zamelia, wawancara 17 November 2017).

- (2) Pelatihan jurusan (lokasi: Banyu Biru, Semarang)

Pelatihan jurusan menurut Bripka Febri Rossalim, S.H. (Bhabinkamtibmas Kelurahan Simpang Baru, Polsek Tampan):

*“Sebelum jadi Bhabinkamtibmas ada pelatihan yang dilaksanakan di Hotel Furaya, diadakan oleh Polresta Pekanbaru. Pertiga bulan,*

*kadang-kadang setahun sekali kami ikut lagi pelatihan di SPN. Kalau sampai juga ke tingkat yang lebih atasnya lagi, di dikjur di Banyu Biru Semarang. Kalau di Banyu Biru itu 2 bulan kalau gak salah. Biasanya itu pemilihan dari Polda Riau. Diseleksi.” (Bripka Febri Rossalim, S.H., wawancara 22 November 2017).*

(3) Pelatihan *in house training pilot project* (lokasi: Jakarta, Bekasi)

Pelatihan *in house training pilot project* ini diadakan oleh kepolisian pusat bekerjasama dengan polisi Jepang, karena polisi Jepang memberikan polisi percontohan bagi anggota kepolisian Indonesia. Pernyataan ini disampaikan oleh Bripka Shinta Zamelia (Banit I Binmas Polsek Bukit Raya):

*“Ada juga kemaren kanit sama kapolsek pergi pelatihan ke Jakarta. Itu namanya in house training pilot project mbak. Jadi 1 polsek itu dijadikan pilot project untuk didatangi sama polisi Jepang. (Bripka Shinta Zamelia, wawancara 17 November 2017).*



Gambar 3.10. Polisi Jepang mendatangi Polsek Sukajadi  
Sumber: Dokumentasi Polsek Sukajadi

**(d) Sumber Daya yang Dibutuhkan Anggota Bhabinkamtibmas**

Setiap Anggota Bhabinkamtibmas Jajaran Polresta Pekanbaru memiliki sumber daya yang berbeda-beda. Sumber daya dari masing-masing Anggota Bhabinkamtibmas Jajaran Polresta Pekanbaru adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Polsek Bukit Raya (Bripka Shinta Zamelia: Banit I Binmas Polsek Bukit Raya). Sumber daya yang dibutuhkan oleh Anggota Bhabinkamtibmas Polsek Bukit Raya adalah dukungan dari Kanit (pimpinan), teman-teman sesama Anggota Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat dan masyarakatnya seperti RT, RW nya, terutama dukungan dari kelurahannya sendiri. Pada dasarnya Bhabinkamtibmas bekerja untuk masyarakat maka secara otomatis akan membutuhkan dukungan dan juga partisipasi dari masyarakatnya sendiri. Dukungan dari Kanit (pimpinan) tersebut dapat berupa kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Anggota Bhabinkamtibmas, nasehat maupun arahan dari Kanit (pimpinan). Sedangkan dukungan dan partisipasi dari tokoh masyarakat ialah berperan aktif dalam program kerja Bhabinkamtibmas. Ketika Anggota Bhabinkamtibmas dibutuhkan dan membutuhkan tokoh masyarakat, tokoh masyarakat tersebut harus bersedia agar terciptanya kondisi yang kondusif, aman, nyaman, dan tertentram diwilayahnya.

*Kedua*, Polsek Lima Puluh (Aiptu Susetio Supriadi: Bhabinkamtibmas Kelurahan Cinta Raja). Sumber daya yang dibutuhkan oleh Bhabinkamtibmas Polsek Lima Puluh adalah RT dan RW, karena RT dan RW merupakan panjang tangan Anggota Bhabinkamtibmas. Maksudnya dari panjang tangan Anggota Bhabinkamtibmas ialah seorang RT dan RW mampu memecahkan permasalahan di wilayahnya sendiri. Akan tetapi jika masalah tersebut tidak dapat diselesaikan oleh RT dan RW, maka Anggota Bhabinkamtibmas dapat membantu dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Selain membutuhkan bantuan RT dan RW, Anggota Bhabinkamtibmas juga membutuhkan bantuan dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat setempat, dan tokoh pemuda setempat. Terutama di lingkungan Polsek Lima Puluh Kelurahan Cinta Raja, masyarakatnya dapat berperan aktif, persuasif, dan ikut bekerjasama dalam program kerja Bhabinkamtibmas dan juga menjaga ketertiban masyarakat.

*Ketiga*, Polsek Pekanbaru Kota (Iptu Zainal Arifin: Kanit Binmas Polsek Pekanbaru Kota dan Aiptu Jayadi: Bhabinkamtibmas Kelurahan Tanah Datar). Sumber daya yang dibutuhkan oleh Bhabinkamtibmas Polsek Pekanbaru Kota adalah berasal dari diri anggota Bhabinkamtibmas itu sendiri. Anggota Bhabinkamtibmas tidak diharuskan memiliki gelas S1 (Sarjana Satu) ataupun S2 (Sarjana Dua) atau

dapat dikatakan memiliki pendidikan yang tinggi, tetapi Anggota Bhabinkamtibmas harus memiliki kemauan, kemampuan bermasyarakat, dan minimal pangkat Briptu. Menjadi seorang anggota polisi terutama Anggota Bhabinkamtibmas harus memiliki loyalitas yang tinggi terhadap masyarakat. Pendidikan tinggi tidak menjadi masalah bagi anggota Bhabinkamtibmas, namun harus memiliki syarat mempunyai niat hati yang tulus membantu menyelesaikan permasalahan yang ada pada masyarakat.

*Keempat*, Polsek Sukajadi (Iptu Saptono: Kanit Binmas Polsek Sukajadi). Sumber daya yang dibutuhkan oleh Bhabinkamtibmas Polsek Sukajadi adalah berasal dari diri Anggota Bhabinkamtibmas itu sendiri. Anggota Bhabinkamtibmas harus memiliki kemampuan berkomunikasi (dapat berbicara dengan baik/ *good communication*), mudah bergaul, dekat dengan masyarakat, dan perhatian sepenuhnya ke masyarakat. Anggota Bhabinkamtibmas juga harus memiliki etika kesopanan yang tinggi, etika yang tidak melanggar kode etik kepolisian. Selain harus memiliki kedekatan dengan masyarakat dan memiliki etika kesopanan yang tinggi, Anggota Bhabinkamtibmas harus memiliki kedekatan atau koneksi dengan kelurahan, kecamatan, dan instansi lainnya. Koneksi tersebut memiliki tujuan yakni dapat memperlancar permasalahan salah satunya dari segi administrasi.

*Kelima*, Polsek Tampan (Bripka Febri Rossalim, S.H.: Bhabinkamtibmas Kelurahan Simpang Baru). Sumber daya yang dibutuhkan oleh Bhabinkamtibmas Polsek Tampan adalah dukungan dari anggota kepolisian yang lainnya (termasuk anggota Bhabinkamtibmas). Anggota Bhabinkamtibmas membutuhkan dukungan dari anggota kepolisian lainnya dikarenakan pekerjaan Bhabinkamtibmas sepenuhnya belum maksimal. Anggota Bhabinkamtibmas membutuhkan sesama Anggota Bhabinkamtibmas dalam hal menyelesaikan permasalahan masyarakat non surat (kekeluargaan). Anggota Bhabinkamtibmas membutuhkan anggota polisi Satlantas dalam hal pengamanan. Dukungan tersebut akan memperlancar dan mempercepat proses penyelesaian permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat.

*Keenam*, Polsek Tenayan Raya (Bripka S. Bagus Kuncoro: Bhabinkamtibmas Kelurahan Tangkerang Timur, Pematang Kapau, dan Mentangor dan Bripka Zalman Harefa: Bhabinkamtibmas Kelurahan Rejosari, Bambu Kuning, dan Sialang Sakti). Sumber daya yang dibutuhkan oleh Bhabinkamtibmas Polsek Tenayan Raya adalah

berasal dari pimpinan kepolisian. Maksudnya adalah pimpinan kepolisian perlu mengadakan pelatihan-pelatihan yang lebih spesifik agar Anggota Bhabinkamtibmas dapat menjalankan tugasnya secara maksimal. Tak hanya itu, sumber daya yang lainnya adalah partisipasi masyarakat. Anggota Bhabinkamtibmas membutuhkan 100% partisipasi dari masyarakat dengan sepenuhnya setuju terhadap penyelesaian masalah oleh Anggota Bhabinkamtibmas. Hal ini disebabkan oleh masih adanya beberapa masyarakat yang masih puas dengan keputusan anggota Bhabinkamtibmas di wilayah masyarakat tersebut.

**(e) Masa Jabatan Bhabinkamtibmas**

- (1) Jika pergantian Anggota Bhabinkamtibmas atau mutasi (perpindahan)

Pernyataan ini disampaikan oleh Bripka Shinta Zamelia (Banit I Binmas Polsek Bukit Raya):

*“Sampai dia ada yang menggantikan. Kayak Bhabinkamtibmas Aiptu Wahono itu udah 10 tahun menjadi Bhabinkamtibmas. Selagi dia kinerjanya bagus, terus dia sendiri betah jadi Bhabinkamtibmas, makanya dipertahankan. Kalau dia udah gak kerasan lagi pengen pindah di fungsi lain ya pindah.”* (Bripka Shinta Zamelia, wawancara 17 November 2017).

- (2) Masih memiliki semangat bekerja

Pernyataan ini disampaikan oleh Bripka Febri Rossalim, S.H. (Bhabinkamtibmas Kelurahan Simpang Baru, Polsek Tampan):

*“Bhabinkamtibmas itu tidak ada masa jabatannya. Ibaratnya masih didedikasikan, masih punya semangat, karena polisi itu gak semua orang bisa menjadi Bhabinkamtibmas. Intinya Bhabinkamtibmas itu pandai bermasyarakat. Polisi yang Bhabinkamtibmas ini polisi yang bermasyarakat. Pandai dia mendekat diri dengan masyarakat. Public speaking nya harus pandai.”* (Bripka Febri Rossalim, S.H., wawancara 21 November 2017).

(3) Tergantung penilaian dan keputusan dari pimpinan

Pernyataan ini disampaikan oleh Aiptu Susetio Supriadi (Bhabinkamtibmas Kelurahan Cinta Raja, Polsek Lima Puluh):

*“Tidak ada batasannya. Tergantung pimpinan. Nantikan pimpinan juga sering mengecek, menanyakan ke masyarakat, kenal Bhabinkamtibmasnya, apakah aktif Bhabinkamtibmasnya. Pimpinan sering kontrol ke daerah tugas Bhabinkamtibmas itu, bertanya ke masyarakat, bertanya ke tokoh pemerintahan tokoh pemuda kantor lurah kantor kepala desa bertanya apakah aktif Bhabinkamtibmasnya. Bertanya ke masyarakat apakah kenal Bhabinkamtibmasnya.”* (Aiptu Susetio Supriadi, wawancara 4 Desember 2017).

Pernyataan pendukung juga disampaikan oleh Aiptu Jayadi (Bhabinkamtibmas Kelurahan Tanah Datar, Polsek Pekanbaru Kota):

*“Itu ada sprin. Bisa diperpanjang bisa tidak. Misalnya bapak ini kena sprin (surat perintah), nah nanti bisa saja diganti ni. Mungkin bisa pindah fungsi sesuai dengan kebutuhan organisasi.”* (Aiptu Jayadi, wawancara 18 November 2017).

(4) Tergantung penilaian dari masyarakat

Pernyataan ini disampaikan oleh Iptu Saptono (Kanit Binmas Polsek Sukajadi):

*“Itupun tergantung masyarakat gak komplain suka sama dia kan. Kadang-kadang dia itu dipindahkan dengan pimpinan, tau-tau masyarakat gak mau, mungkin ada pertimbangan dari pimpinan.”* (Iptu Saptono, wawancara 17 November 2017).

(5) Usia pensiun kepolisian

Pernyataan ini disampaikan oleh Bripka Zalman Harefa (Bhabinkamtibmas Kelurahan Rejosari, Bambu Kuning, dan Sialang Sakti, Polsek Tenayan Raya):

*“Untuk masa jabatannya gak ditentukan. Bisa sampe mau pensiun bisa sampe 58 tahun. Itu dari 0 tahun masuk polisi sampe umur 58 tahun.”* (Bripka Zalman Harefa, wawancara 22 November 2017).

### **3. STRUKTUR BIROKRASI**

#### **Bhabinkamtibmas yang Melanggar Peraturan UU Bhabinkamtibmas**

Pelaksanaan Bhabinkamtibmas tidak diatur oleh undang-undang, namun anggota Bhabinkamtibmas yang juga anggota kepolisian melaksanakan tugas kepolisian diatur dalam UU RI No. 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam UU RI No. 02 Tahun 2002 Pasal 1 Butir 5 ini menjelaskan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Bhabinkamtibmas memiliki Buku Pintar Bhabinkamtibmas sesuai dengan Keputusan Kapolri Nomor: KEP/618/VII/2014 Tanggal 29 Juli 2014 Tentang Buku Pintar Bhabinkamtibmas. Isi dari buku pintar Bhabinkamtibmas adalah standar operasional prosedur dalam melaksanakan tugas Bhabinkamtibmas. Namun begitu pada bagian ini peneliti akan menjelaskan tentang bagaimana jika Anggota Bhabinkamtibmas dalam

melaksanakan tugasnya melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan sesuai dengan keputusan kapolri. Berikut penjelasannya.

(a) Apabila melanggar kedisiplinan dan kode etik kepolisian

Penjelasan mengenai melanggar kode etik kepolisian disampaikan oleh Briпка Febri Rossalim, S.H. (Bhabinkamtibmas Kelurahan Simpang Baru, Polsek Tampan):

*“Kalau UU nya tetap mengacu pada UU RI No. 02 Tahun 2002. Kalau melanggar UU, tetap jatuhnya sama dengan melanggar UU. Jadi sanksinya disiplin dan kode etik polisi.”* (Briпка Febri Rossalim, S.H., wawancara 21 November 2017).

(b) Apabila terlibat dalam kasus kriminalitas

Pelanggaran apabila terlibat kasus kriminalitas akan mendapatkan sanksi sama seperti masyarakat pada umumnya. Pernyataan ini di sampaikan oleh Brigadir Robby Yulianto (Bhabinkamtibmas Kelurahan Tanjung RHU, Polsek Lima Puluh):

*“Kalau Bhabinkamtibmas itu melakukan suatu pelanggaran-pelanggaran kode etik kepolisian baik UU, diproses sesuai dengan pelanggaran. Kalau dia melanggar kode etik disiplin ya kode etik disiplin. Kalau dia mengarah ke kriminalitas, nanti dia ke pengadilan hukum juga sama seperti warga sipil lainnya. Itu dia jadi provokator, menangani perkara masyarakat malah jadi provokator, terlibat politik, itu bisa diproses sesuai dengan kode etik disiplin kepolisian.”* (Brigadir Robby Yulianto, wawancara 4 Desember 2017).

(c) Apabila terlibat dalam kasus berat atau kriminalitas

Pemecatan ini terjadi ketika seorang anggota kepolisian termasuk Anggota Bhabinkamtibmas terlibat kasus berat seperti narkoba, asusila, dan lain-lain. Pernyataan ini disampaikan oleh Iptu Saptono (Kanit Binmas Polsek Sukajadi):

*“Kalau Bhabinkamtibmas inikan hanya jabatan. Kalau dia berdinasnya tetap di kepolisian. Siapapun dia gak peduli Bhabinkamtibmas, siapapun jabatannya, walaupun dia seorang pimpinan yang paling atas, kalau*

*memang dia salah tetap ditindak sesuai dengan prosedur. Apapun permasalahannya tetap ditindak sesuai dengan prosedur. Bahkan bisa dilakukan pemecatan. Tengok pelanggarannya. Kalau dia narkoba, asusila mungkin kan bisa itu. Tapi kalau hanya pelanggaran dia malas, dia hanya di mutasi aja. Pindah tempat gak di bhabinkamtibmas ini.”* (Iptu Saptono, wawancara 17 Desember 2017).

Dari penjelasan diatas tersebut, dapat diberikan pendapat bahwa setiap anggota kepolisian termasuk Anggota Bhabinkamtibmas memiliki konsekuensi apabila ia melanggar pelanggaran yang ada didalam UU RI No. 02 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia ini. Namun dari penjelasan tersebut, tugas Anggota Bhabinkamtibmas ini adalah media percontohan bagi masyarakat dilingkungannya berada. Dari media percontohan itu pula, masyarakat akan mempercayai Anggota Bhabinkamtibmas. Berikut pernyataan dari Aiptu Indra Gunawan (Bhabinkamtibmas Kelurahan Tuah Negeri, KIT, Becah Lesung, dan Melebung, Polsek Tenayan Raya) mengenai hal tersebut:

*“Kita itukan panutan sebenarnya. Panutan masyarakat. Kalau kita gak bisa jadi panutan, buat apa kita jadi Bhabinkamtibmas. Yang menentukan itu masyarakat sebenarnya. Yang menilai masyarakat, bukan pimpinan. Kalau pimpinan bilang gak bagus masyarakatnya bilang bagus, bisa dipertahankan. Cuman jelas kalau kami itu bermasyarakat dalam menyelesaikan masalah tidak boleh berpihak. Kita tidak boleh berpihak. Kita kasih pandangan. Kalau berpihak pasti udah dikecewakan.”* (Aiptu Indra Gunawan, wawancara 22 November 2017).

#### **4. SIKAP PELAKSANA**

##### **(a) Aktivitas Bhabinkamtibmas**

Bhabinkamtibmas adalah suatu pekerjaan yang dikhususkan kepada anggota kepolisian khusus yang ditempatkan disetiap kelurahan untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan ketertiban masyarakat. Dalam menjalankan pekerjaan

Bhabinkamtibmas, Anggota Bhabinkamtibmas dibantu dengan Anggota FKPM setempat yang ada di setiap kelurahan pula. Pernyataan ini disampaikan oleh Bapak Suherman (Ketua FKPM Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai):

*“Bhabinkamtibmas inikan perpanjangan polisi untuk ditempatkan di wilayah kelurahan. Mereka ditugaskan bagaimana menjaga keamanan, perpanjang tangan Polsek atau Polres, sehingga setiap kegiatan yang terjadi di masyarakat, menyangkut masalah tipiring (tindak pidana ringan) kecuali masalah pembunuhan pemerkosaan yang tidak bisa diatasi, Bhabinkamtibmas yang meredam. Dekat dengan masyarakat, mempelajari pergaulan masyarakat, kemudian mencerna kebutuhan di masyarakat. Kalau Bhabinkamtibmas di Tangkerang Tengah, inikan beliau diutus oleh Polsek Bukit Raya dalam rangka menjaga kamtibmas di Tangkerang Tengah. Jumlah luas wilayahnya, banyak 38.000 warga untuk wilayah Tangkerang Tengah ini. Kemudian ada 21 RW, 98 RT. Bhabinkamtibmas ini tidak bisa sendiri kerja di Tangkerang Tengah, maka dibentuk namanya FKPM. FKPM ini Forum Kemitraan Polisi Masyarakat. Nah itu mitra dari polisi, saya ketua umumnya. Anggota kita ada 35 orang. Setiap orang 1 RW ditentukan, tambah lagi pengurus dan pembina itu 35 orang. Nah bhabinkamtibmas setiap berkegiatan di Tangkerang Tengah, selalu bersinergi dengan FKPM menyelesaikan semua kasus yang terjadi. Keamanan, ketertiban, kenyamanan, semua kasus yang menyangkut sosial masyarakat yang tipiring (tindak pidana ringan). Jadi bersama-sama terus dengan Bhabinkamtibmas. Tidak pernah pisah.” (Suherman, wawancara 26 Desember 2017).*

**(b) Partisipasi Masyarakat**

Kegiatan-kegiatan Bhabinkamtibmas selalu berhubungan dengan masyarakat, secara otomatis juga membutuhkan partisipasi masyarakat agar pelaksanaan Bhabinkamtibmas dapat berjalan dengan lancar. Namun banyaknya partisipasi masyarakat ini bergantung kepada tindakan dari Anggota Bhabinkamtibmas.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Bapak Suherman (Ketua FKPM Kelurahan Tangkerang Tengah):

*“Tergantung dengan Bhabinkamtibmasnya. Inikan artinya dia harus bersilaturahmi ya, disamping dia berdinasi di Polsek. Tindakan rutinnnya ya bermasyarakat. Mendatangi masyarakat, mendatangi pedagang, mendatangi orang-orang sedang beraktivitas gotong royong, mendatangi sekolah, itu berjalan dengan bagus. Karena Bhabinkamtibmas ini terbantu dengan adanya FKPM. Bhabinkamtibmas sendiri dengan jumlah penduduk 38.000 itu tidak sanggup. Makanya Alhamdulillah dengan adanya FKPM, Bhabinkamtibmas terbantu, dan terkadang kita juga menyelesaikannya sendiri. Kita buat laporan ke Bhabinkamtibmas. Kita selesaikan sendiri baru selanjutnya kita laporkan. Persoalan sudah clear, sudah selesai, sudah berdamai, sudah tidak bersengketa lagi gitu.”* (Suherman, wawancara 26 Desember 2017).

**(c) Pelatihan bagi FKPM**

FKPM (Forum Kemitraan Polisi Masyarakat) adalah sebuah kelompok masyarakat yang ada di setiap kelurahan untuk menjaga kenyamanan, keamanan, dan ketertiban masyarakat. FKPM dibantu dan juga dibina oleh Anggota Bhabinkamtibmas atau Binmas Polresta Pekanbaru. Banyak pelatihan-pelatihan yang diberikan Binmas Polresta Pekanbaru kepada anggota FKPM dengan maksud agar Anggota FKPM tersebut dapat mewakili anggota kepolisian dalam mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat. Pernyataan ini disampaikan oleh Bapak Suherman (Ketua FKPM Kelurahan Tangkerang Tengah):

*“Kita ada namanya tupoksi (tugas pokok dan fungsi FKPM), nah ini yang memberikan arahan itu dari yang pertama Binmas Polresta Pekanbaru, yang kedua binmas polsek disampingnya Bhabinkamtibmas. Jadi anggota-anggota FKPM itu diberikan pengetahuan tentang bagaimana mengatasi persoalan di masyarakat. Artinya kita bekerja kita menyesuaikan dengan prosedur aturan yang berlaku, tidak kita sendiri yang menjalankannya. Pelatihan PBB, pelatihan kebangsaan, pelatihan kamtibmas bagaimana*

*menangani konflik yang terjadi di masyarakat, bagaimana kita pisahkan pihak-pihak yang berselisih, itu diajari oleh Polsek Bhabinkamtibmas.”*  
(Suherman, wawancara 26 Desember 2017).

**(d) Kebutuhan FKPM**

Dalam melaksanakan kegiatan kamtibmas, FKPM membutuhkan fasilitas secara materi salah satunya ialah dari segi anggaran. Anggaran tersebut digunakan untuk membeli fasilitas-fasilitas kamtibmas yang ada disetiap kelurahan. Hal ini disampaikan oleh Bapak Suherman (Ketua FKPM Kelurahan Tangkerang Tengah):

*“FKPM sosial masyarakat inilah persoalan kita. Kita sudah banyak membantu pihak kepolisian tapi memang sekarang kita gak ada anggarannya. Jadi kita semua sosial masyarakat, tidak dibayar, mulai dari baju itu kita pendanaan sendiri, operasional sendiri, semua sendiri tanpa bantuan. Jadi pihak kepolisian cuman dari perangkat kelurahan lah ada juga sekali-kali memberikan bantuan. Tidak ada anggaran kegiatan kita ini”* (Suherman, wawancara 26 Desember 2017).

**(e) Penilaian Bhabinkamtibmas**

Kegiatan yang telah dilakukan Anggota Bhabinkamtibmas khususnya di wilayah Kelurahan Tangkerang Tengah masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan masih adanya masyarakat yang masih kurang aktif dalam kamtibmas di wilayah sekitar Kelurahan Tangkerang Tengah. Hal ini pun menyebabkan penilaian terhadap Anggota Bhabinkamtibmas menurut ketua FKPM Kelurahan Tangkerang Tengah belum 100% berjalan dengan baik. Pernyataan ini disampaikan oleh Bapak Suherman (Ketua FKPM Kelurahan Tangkerang Tengah):

*“Kalau saat sekarang karena bhabinkamtibmas ya ini di Pekanbaru yang paling muncul FKPM Tangkerang Tengah, karena kita saya udah mendapatkan piagam. Penghargaan dari Kapolsek: ‘Pelopor Penggiat Kamtibmas Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai’. Itu satu. Yang kedua FKPM Tangkerang Tengah yang terbaik di Kota Pekanbaru, karena kita bina poskamling-poskamling dalam rangka*

*kamtibmas. Bhabinkamtibmas kalau kita kasih rating nilai itu nilainya 85 dari FKPM. Itu sudah maksimal kerjanya karena memang kita gak ada yang sempurna kan. Karena masih banyak lagi harus kita perbaiki. Masih banyak lagi yang harus kita bangun untuk memberikan kesadaran ke masyarakat tentang badan kamtibmas.” (Suherman, wawancara 26 Desember 2017).*

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. PROGRAM KERJA ANGGOTA BHABINKAMTIBMAS**

##### **1. Kegiatan DDS (*Door to Door System*)**

DDS (*Door to Door System*) merupakan kegiatan wajib Anggota Bhabinkamtibmas dengan mengunjungi rumah-rumah masyarakat, menghadiri kegiatan-kegiatan masyarakat seperti gotong royong, dan penyuluhan ke area tempat-tempat seperti sekolah, kantor, maupun tempat hiburan yang berada dilingkungan Bhabinkamtibmas itu sendiri. Pelaksanaan tersebut dilakukan wajib dengan mengunjungi 2 - 4 rumah masyarakat perharinya tergantung dari anggaran dan keputusan oleh pimpinan. Kegiatan pada saat DDS (*Door to Door System*) yakni mendata anggota masyarakat berdasarkan anggota di KK (Kartu Keluarga). Tujuan dari DDS (*Door to Door System*) adalah untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat.

##### **2. Kegiatan *Problem Solving***

Selain melaksanakan tugas DDS, anggota Bhabinkamtibmas juga wajib melaksanakan kegiatan *problem solving*. *Problem solving* adalah penyelesaian masalah yang berada di lingkungan Bhabinkamtibmas. Anggota Bhabinkamtibmas hanya memegang permasalahan yang bersifat perdata, dan apabila sudah terikat dengan kriminalisme yang tidak bisa Anggota Bhabinkamtibmas menyelesaikannya, maka akan diserahkan ke bagian serse atau reskrim yang ada di Polsek terdekat. Dalam pelaksanaannya, Anggota Bhabinkamtibmas membutuhkan koordinasi dengan masyarakat, seperti laporan dari masyarakat (tanpa harus Anggota Bhabinkamtibmas mencari permasalahan) serta partisipasi masyarakat (menentukan secara bersama jalan terbaik dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat). Tujuan adanya kegiatan *problem solving* ini adalah membantu pekerjaan serse atau reskrim dan memberikan pengurangan laporan polisi yang ada di Polsek.

## **FKPM dan BKPM Bhabinkamtibmas**

FKPM (Forum Kemitraan Pemolisian Masyarakat) adalah wahana komunikasi antara Anggota Bhabinkamtibmas dan masyarakat yang dilaksanakan atas dasar kesepakatan bersama dalam rangka membahas masalah kamtibmas dan masalah sosial yang perlu dipecahkan bersama guna menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Berikut penjelasan mengenai FKPM (Buku Pintar Bhabinkamtibmas, Edisi kedua tahun 2015):

- (a) Tugas FKPM meliputi: Mengumpulkan data, Mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah, Memantau kegiatan warga dari segi kamtibmas, Menerima pengaduan masyarakat terkait masalah kamtibmas, dan Melaksanakan program kerja yang telah mengajukan proposal program kerja kepada Pemerintah Daerah.
- (b) Wewenang FKPM meliputi: Membuat kesepakatan tentang hal yang perlu dilakukan dan tidak dilakukan sehingga menjadi peraturan, Kelompok atau perseorangan mengambil tindakan kepolisian apabila terjadi kejahatan dengan tertangkap tangan, Memberikan pendapat dan saran kepada Kapolsek mengenai peningkatan kualitas kamtibmas, dan Turut serta dalam menyelesaikan perkara ringan atau perselisihan antar masyarakat.
- (c) Hak FKPM meliputi: Mendapatkan fasilitas baik materi dan non materi dan Mendapat dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah.
- (d) Kewajiban FKPM meliputi: Menjunjung HAM, Menghormati norma-norma (agama, adat istiadat dan sikap masyarakat dengan perilaku yang dapat menjadi contoh teladan), Bersikap jujur dalam menjalankan tugas, dan Tidak diskriminatif dan tidak berpihak dalam menangani perselisihan.

### **3. Kegiatan Kreativitas Bhabinkamtibmas**

Kegiatan kreativitas Anggota Bhabinkamtibmas adalah kegiatan non pokok yang dilakukan oleh Anggota Bhabinkamtibmas sebagai hasil pemikiran ide pikiran dan berasal dari hati nurani seorang Anggota Bhabinkamtibmas. Anggota Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan kreativitas tersebut setelah mendengar keluhan dari masyarakatnya akibat dari keprihatinan masyarakat dan Anggota Bhabinkamtibmas terhadap masyarakat

yang membutuhkan pertolongan. Kegiatan kreativitas ini sebagai bentuk kepedulian Anggota Bhabinkamtibmas terhadap masyarakat yang tertinggal dari segi pangan, papan, dan sandang. Hal ini dilakukan oleh Briпка Ilham Nur, seorang Anggota Bhabinkamtibmas Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai. Briпка Ilham melakukan kegiatan Jumat Barokah Bhabinkamtibmas Peduli, Membuat MCK Kamtibmas yang berasal dari keluhan masyarakatnya, dan Merenovasi rumah keluarga yang kurang mampu (biaya renovasi berasal dari dana pribadi Briпка Ilham Nur).

Kegiatan-kegiatan kreativitas yang telah dilakukan oleh Briпка Ilham ini mendapatkan penghargaan dari Kapolda Riau sebagai Bhabinkamtibmas Terbaik Tahun 2017. Penghargaan tersebut tidak hanya diterima Briпка Ilham tetapi juga pihak-pihak terkait dalam menjaga kamtibmas yakni sinergitas 3 Pilar Kebangsaan Kelurahan Sidomulyo timur, Kecamatan Marpoyan Damai. Kelurahan Sidomulyo Timur mendapatkan Penghargaan Kelurahan/ Desa Teraman, Piala Bergilir Kategori Juara Umum Kelurahan Aman untuk Polresta Pekanbaru serta Penghargaan kepada Camat Marpoyan Damai atas kepeduliannya terhadap pos kamling.

## **B. IMPLEMENTASI *COMMUNITY POLICING* POLRESTA PEKANBARU, RIAU**

### **1. KOMUNIKASI**

Komunikasi merupakan langkah terpenting dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Komunikasi berasal dari suatu hasil pemikiran seseorang yang disampaikan kepada orang lain. Komunikasi yang baik akan menciptakan hasil yang baik pula. Hal ini dibutuhkan komunikasi yang terjadi secara efektif. Menurut Stewart L Tubbs dan Sylvia Moss (dalam Fajar, 2009: 8) menyebutkan komunikasi yang efektif menimbulkan lima hal:

- (a) Pengertian, yakni penerimaan yang cermat dari komunikan. Masyarakat memahami pesan-pesan yang disampaikan Anggota Bhabinkamtibmas.
- (b) Kesenangan, yakni komunikasi yang membuat komunikan merasa bahwa dirinya ada di tempat tersebut. Komunikasi ini menjadikan hubungan semakin akrab dan menyenangkan (komunikasi interpersonal). Kegiatan kamtibmas yang dilakukan Anggota Bhabinkamtibmas membutuhkan partisipasi dari masyarakat.

- (c) Mempengaruhi sikap dengan adanya komunikasi *persuasive*. Anggota Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan kamtibmas dengan mengajak masyarakat untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.
- (d) Hubungan sosial yang baik. Hubungan yang tercipta antara Anggota Bhabinkamtibmas dengan masyarakat semakin hari semakin bagus.
- (e) Hal-hal yang bersifat *persuasive* akan melahirkan tindakan yang nyata. Melakukan kegiatan gotong royong dan musyawarah yang dilakukan Anggota Bhabinkamtibmas dengan masyarakat dapat meningkatkan kualitas kesejahteraan hidup menjadi lebih baik.

Komunikasi efektif ini terjadi pada anggota kepolisian khususnya Binmas Polresta Pekanbaru terhadap Anggota Bhabinkamtibmas Jajaran Polresta Pekanbaru, Riau. Anggota Bhabinkamtibmas melaksanakan komunikasi secara langsung kepada masyarakat dengan memberikan pesan-pesan kamtibmas, mengunjungi rumah-rumah masyarakat setiap hari, mempertanyakan persoalan-persoalan yang ada di lingkungan masyarakat, memberikan materi penyuluhan tentang kamtibmas. Penyuluhan yang diberikan Anggota Bhabinkamtibmas kepada masyarakat dapat berupa pemahaman mengenai radikalisme yang sedang terjadi di lingkungan masyarakat saat ini. Anggota Bhabinkamtibmas juga melakukan komunikasi secara dengan masyarakat seputar permasalahan di lingkungan sekitar Bhabinkamtibmas, mendata anggota keluarga sesuai dengan KK (Kartu Keluarga) dan menjalin interaksi komunikasi yang baik antara Bhabinkamtibmas dan masyarakat dilingkungannya dengan memberikan pesan-pesan ataupun nasehat serta melakukan pembinaan terhadap masyarakat mengenai keamanan dan ketertiban masyarakat agar dapat terhindar dari penyakit-penyakit masyarakat seperti terorisme, radikalisme, pergaulan bebas, narkoba, dan lain-lain. Pembahasan tersebut memiliki persamaan dengan hasil dan pembahasan penelitian pada jurnal peneliti Cinthia Ayu Azhari yang berjudul “Strategi Mengenal Khalayak Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) Polsekta Samarinda Utara dalam Membangun Kemitraan dengan Masyarakat di Kelurahan Mugirejo” yang menyatakan bahwa membimbing masyarakat berpartisipasi aktif dalam rangka pembinaan kamtibmas secara swakarsa di kelurahan. Pernyataan ini dibuktikan dengan masih aktifnya masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pelaksanaan kamtibmas yang dilakukan Anggota Bhabinkamtibmas ini membina 3 pembinaan: Bintibmas, Binredawan, dan Binkamsa. Bintibmas dilakukan dengan mengunjungi tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh agama. Sasaran dari Binredawan yakni remaja dan wanita, dimana remaja dan wanita tidak terpengaruh dengan pergaulan bebas dan narkoba. Binkamsa dengan sasaran pos kamling termasuk satpam-satpam perkantoran di wilayah kerja Anggota Bhabinkamtibmas. Anggota Bhabinkamtibmas Jajaran Polresta Pekanbaru dalam hal menyelesaikan permasalahan-permasalahan di lingkungan masyarakat yang bersifat kasus perdata. Dalam pelaksanaannya, anggota Bhabinkamtibmas membutuhkan koordinasi dengan masyarakat, seperti laporan dari masyarakat (tanpa harus anggota Bhabinkamtibmas mencari permasalahan) serta partisipasi masyarakat (menentukan secara bersama jalan terbaik dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat). Komunikasi yang terjadi antara anggota Bhabinkamtibmas Jajaran Polresta Pekanbaru kepada masyarakat sebagai sasaran pekerjaan Bhabinkamtibmas menciptakan hubungan yang baik dengan tujuan memberikan penilaian yang baik terhadap masyarakat bahwa anggota kepolisian dapat menjadikan percontohan bagi masyarakat.

Pada saat melaksanakan kegiatan kamtibmas, Anggota Bhabinkamtibmas memiliki tanggung jawab kepada Kapolsek sebagai bentuk hasil dari kegiatan kamtibmas. Kegiatan yang mengandung unsur komunikasi adalah terdapat pada laporan Unit Binmas Polsek Sukajadi yakni Anggota Bhabinkamtibmas melakukan komunikasi langsung dengan mengajak tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, dan komunitas di masyarakat untuk berpartisipasi untuk membangun pos kamling. Hasil dari komunikasi tersebut adalah masyarakat berterima kasih dan sangat antusias untuk membuat pos kamling demi menjaga keamanan di tengah masyarakat.

Anggota Bhabinkamtibmas memiliki kartu nama sebagai identitas keanggotaan Bhabinkamtibmas. Kartu nama tersebut juga dimiliki satpam-satpam disekitar wilayah kerja Anggota Bhabinkamtibmas. Pada laporan berikutnya, Anggota Bhabinkamtibmas membuat aksi dengan menguatkan program sistem pengamanan swakarsa satpam. Aksi ini sebagai penanggungjawaban Anggota Bhabinkamtibmas kepada Kapolsek. Kegiatan ini melaksanakan pendataan dan pembinaan terhadap satpam-satpam dengan hasil nya ialah

banyaknya satpam-satpam yang membuat kartu identitas. Dari kegiatan tersebut pula komunikasi menjadikan semakin melekatnya Anggota Bhabinkamtibmas dalam melakukan kerja sama dibidang memelihara kamtibmas secara keseluruhan kepada masyarakat.

## **2. SUMBER DAYA**

Manajemen sumber daya manusia terdiri dari masalah-masalah yang berkaitan dengan pembinaan, penggunaan, dan perlindungan sumber daya manusia, sedangkan manajemen personalia lebih banyak berkaitan dengan sumber daya manusia yang berada dalam perusahaan yang dikenal dengan sektor modern yang memiliki tugas dalam hal mempelajari dan mengembangkan cara-cara agar manusia dapat secara efektif diintegrasikan ke dalam berbagai organisasi guna mencapai tujuannya (Faustino dan Gomes, 2003: 2).

Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional) adalah lembaga kepolisian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kompolnas sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan fungsional untuk menjamin profesionalisme dan kemandirian Polri yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan integrasi anggota dan pejabat Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Perpes No. 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional). Dalam Rencana Kerja Komisi Kepolisian Nasional Tahun 2017, peran Kompolnas dalam mengoptimalkan sumber daya anggota kepolisian, yakni:

- (a) Profesionalisme SDM
- (b) Penguatan sistem kepolisian
- (c) Pemenuhan peralatan dan teknologi kepolisian
- (d) Optimalisasi pelayanan kepolisian

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) membentuk anggota kepolisian Bhabinkamtibmas Jajaran Polresta Pekanbaru untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Bhabinkamtibmas ini ditempat diwilayah kerja pada setiap kelurahan dengan satu anggota Bhabinkamtibmas. Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa anggota Bhabinkamtibmas, banyak yang masih mengeluhkan dengan penempatan

satu anggota Bhabinkamtibmas disetiap kelurahan yang padahal kenyataannya satu kelurahan memiliki jumlah warga sebanyak 4.000 – 10.000 jiwa (tergantung dengan luas wilayah setiap kelurahan). Dalam memilih anggota Bhabinkamtibmas, Binmas Polresta Pekanbaru memiliki kualifikasi dalam menyeleksi anggota Bhabinkamtibmas dengan syarat-syarat khusus diantaranya: minimal berpangkat Briptu, penilaian dari kelurahan, masyarakat, dan pimpinan, dan syarat-syarat lainnya, namun yang terpenting ialah anggota tersebut harus memiliki *public speaking* yang baik serta sopan santun terhadap masyarakat agar masyarakat memberikan penilaian yang baik terhadap kinerja anggota Bhabinkamtibmas tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menguatkan sistem kepolisian khususnya anggota Bhabinkamtibmas Jajaran Polresta Pekanbaru.

Dalam meningkatkan profesionalitas anggota Bhabinkamtibmas untuk melaksanakan tugasnya, maka anggota Bhabinkamtibmas Jajaran Polresta Pekanbaru juga mendapatkan pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh Binmas Polresta Pekanbaru. Pelatihan-pelatihan bertujuan untuk memberikan modal atau pedoman kepada Anggota Bhabinkamtibmas sebelum masuk ke lingkungan masyarakat agar dapat menyamakan persepsi pemikiran antara Anggota Bhabinkamtibmas dengan masyarakat di wilayah kerjanya. Pelatihan yang diterima Anggota Bhabinkamtibmas salah satunya ialah kedatangan polisi Jepang ke Indonesia. Pembahasan ini memiliki persamaan dengan penelitian skripsi peneliti Muhammad Guntur HS. Yang berjudul “Peranan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam Penangan Tindak Pidana Ringan (Tipiring)”. Pada penelitian tersebut menjelaskan bahwa JICA (*Japan Internasional Cooperation Agency*) merupakan penolong dalam pengembangan pemerintah melalui peningkatan sumber daya manusia dengan memberikan bantuan teknis dan dana yang tidak mengikat. Pengiriman polisi Jepang ke Indonesia sebaga tenaga ahli serta pengiriman polisi Indonesia ke Jepang untuk pelatihan tidak hanya menghasilkan polisi yang berkualitas, tetapi juga mampu menyebarluaskan keahlian dan pengetahuan kepada jajaran kepolisian di seluruh wilayah Indonesia.

Optimalisasinya pelayanan kepolisian terhadap pelaksanaan kamtibmas yang dilakukan oleh Anggota Bhabinkamtibmas Jajaran Polresta Pekanbaru di setiap kelurahan ini membutuhkan semua dukungan dan partisipasi dari berbagai kalangan seperti dukungan dan partisipasi dari pimpinan kepolisian yakni menyediakan fasilitas, pelatihan, dan lain-

lain. Adapun dukungan-dukungan yang lainnya ialah dukungan yang berasal dari tokoh masyarakat seperti pihak kelurahan, RT, RW, dan tokoh agama. Dukungan dan partisipasi yang paling penting ialah dukungan dari masyarakatnya sendiri. Anggota Bhabinkamtibmas membutuhkan masyarakat yang dapat berperan aktif, memiliki kemauan dan kemampuan tinggi terhadap kamtibmas, dan mampu bekerja sama dengan baik agar dapat menciptakan kondisi yang kondusif, aman, dan nyaman.

### **3. STRUKTUR BIROKRASI**

Birokrasi merupakan suatu sistem organisasi Negara dengan tugas yang sangat kompleks dan memerlukan pengendalian operasi manajemen pemerintahan yang baik. Apabila kerja rutinitas aparat birokrasi sering menyebabkan masalah baru yang menjadikan birokrasi statis dan kurang peka terhadap perubahan lingkungan bahkan cenderung resistensi terhadap pembaharuan. Kondisi seperti ini seringkali memunculkan potensi praktek mal-administrasi yang mengarahkan pada korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bermula dari kondisi tersebut maka pemerintah pusat maupun daerah perlu segera melakukan reformasi birokrasi yang tidak hanya perlu pada tataran komitmen saja tetapi juga dibandingkan dalam tataran kehidupan nyata (Pramusinto & Erwan, 2009: 110). Konsep birokrasi menurut Max Weber mempunyai suatu bentuk yang pasti dimana semua fungsi dijalankan dalam cara-cara yang rasional. Menurut Max Weber, tipe ideal birokrasi yang rasional dilakukan dalam beberapa cara sebagai berikut (Thoah dalam Wakhid, *Jurnal TAPIs*, No. 13, Juli – Desember 2011, hal: 128 - 129):

- (a) Individu pejabat secara personal bebas, namun masih dibatasi oleh jabatannya pada saat ia menjalankan tugas atau kepentingan individual dalam jabatannya (tidak bebas menggunakan jabatan dalam keperluan dan kepentingan pribadi termasuk keluarga). Anggota Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan kamtibmas dengan mendahulukan kepentingan masyarakat terlebih dahulu, karena masyarakat akan memberikan nilai positif terhadap Anggota Bhabinkamtibmas yang telah melakukan pekerjaannya secara maksimal.
- (b) Jabatan tersebut disusun dalam tingkatan hierarki keatas ke bawah dan kesamping dengan konsekuensinya penyandangan kekuasaan. Anggota

Bhabinkamtibmas bertanggungjawab terhadap Kanit Binmas masing-masing Polsek serta Kasat Binmas Polresta Pekanbaru.

- (c) Tugas dan fungsi yang berbeda-beda pada masing-masing jabatan. Anggota Bhabinkamtibmas dibandingkan dengan anggota kepolisian memiliki tugas yang berbeda yakni Anggota Bhabinkamtibmas menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat dan menangani kasus perdata, sedangkan anggota kepolisian lainnya melakukan kegiatan dalam menyelesaikan kasus pidana.
- (d) Setiap jabatan mempunyai kontrak jabatan yang harus dijalankan, diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalitasnya, dan mempunyai gaji termasuk hak untuk menerima pensiun. Anggota Bhabinkamtibmas mempunyai profesionalitas lebih terhadap masyarakat dan masyarakat menilai profesionalitas tersebut.
- (e) Struktur pengembangan karier yang jelas. Menjadi Anggota Bhabinkamtibmas bukan merupakan pekerjaan yang mudah, karena Anggota Bhabinkamtibmas merupakan perwakilan anggota kepolisian yang terjun ke lingkungan masyarakat dan juga harus menciptakan nilai positif kepada masyarakat.
- (f) Setiap pejabat tidak boleh menjalankan tugas jabatannya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya dan masih berada dibawah pengendalian serta pengawasan suatu sistem yang dijalankan secara disiplin. Pekerjaan Anggota Bhabinkamtibmas diawasi oleh Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional).

Pelaksanaan Bhabinkamtibmas tidak diatur oleh undang-undang, namun anggota Bhabinkamtibmas yang juga anggota kepolisian melaksanakan tugas kepolisian diatur dalam UU RI No. 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. UU RI No. 02 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat (5) ini menjelaskan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Dalam menjalankan tugas kewajiban sebagai anggota kepolisian, ada beberapa

peraturan yang harus ditaati. Apabila ada anggota kepolisian yang melanggar tugas kewajiban tersebut maka ia melanggar UU RI No. 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 30 Ayat (1) yang berbunyi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat. Pasal 30 Ayat (1) diperjelas lebih dalam lagi pada Pasal 35 (1), yakni: Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Maksudnya ialah mengingat dalam pelaksanaan tugas Kepolisian Republik Indonesia berkaitan erat dengan hak serta kewajiban warga Negara dan masyarakat secara langsung serta diikat oleh kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka dalam hal seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melaksanakan tugas dan wewenangnya dianggap melanggar etika profesi, maka anggota tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk pemuliaan profesi kepolisian, sedangkan terhadap pelanggaran hukum disiplin dan hukum pidana diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.

Bhabinkamtibmas memiliki Buku Pintar Bhabinkamtibmas sesuai dengan Keputusan Kapolri Nomor: KEP/618/VII/2014 Tanggal 29 Juli 2014 Tentang Buku Pintar Bhabinkamtibmas. Buku Pintar Bhabinkamtibmas ini menjadi pedoman kepada setiap anggota Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugas-tugasnya di lingkungan masyarakat. Hal ini dikarenakan anggota Bhabinkamtibmas adalah agen pembangunan (*agent of development*) dan agen perubahan (*agent of change*) di wilayah ia bertugas. Anggota Bhabinkamtibmas sebagai penyambung lidah antara Polri dan masyarakat, selain harus menyampaikan pesan-pesan kamtibmas kepada masyarakat, anggota Bhabinkamtibmas juga harus menerima harapan dan keinginan masyarakat pada Polri. Pembahasan diatas memiliki persamaan dengan pada penelitian jurnal peneliti Nofta Wulan Sari dkk yang berjudul “Peranan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam Meningkatkan Pelayanan Keamanan Masyarakat di Polsek Sumoroto Kabupaten Ponorogo” yang menjelaskan bahwa peranan Anggota Bhabinkamtibmas sebagai pemimpin (*leader*) dengan melakukan hubungan interpersonal dan melakukan fungsi dalam hal memimpin, memotivasi, mengembangkan, dan mengendalikan seperti melakukan

kegiatan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, serta motivasi kepada masyarakat. Dalam melaksanakan pekerjaan kamtibmas, Anggota Bhabinkamtibmas diawasi oleh Provost Kepolisian (badan kepolisian yang menangani, membina serta mengawasi personil kepolisian dalam bekerja). Anggota Bhabinkamtibmas Jajaran Polresta bekerja berada dibawah dan bertanggung jawab terhadap Kanit Binmas masing-masing yang selanjutnya bertanggung jawab ke Kasat Binmas Polresta Pekanbaru.

#### **4. SIKAP PELAKSANA**

Kepolisian memiliki fungsi yang salah satunya ialah fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: Pasal 2). Anggota kepolisian juga memiliki Kode Etik Profesi Polisi yang dimana mengatur atau norma terhadap anggota kepolisian sebagai penuntun, pembimbing dan pengendalian setiap anggota kepolisian agar berperilaku baik sesuai dengan nilai kebaikan yang terkandung dalam profesi kepolisian.

FKPM (Forum Kemitraan Pemolisian Masyarakat) adalah sebuah kelompok komunikasi antara Polri dan masyarakat yang dilaksanakan atas dasar kesepakatan bersama dalam rangka membahas masalah kamtibmas dan masalah-masalah sosial yang perlu dipecahkan bersama guna menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Tugas FKPM adalah membantu kerja Anggota Bhabinkamtibmas dalam *problem solving* masyarakat. Sedangkan BKPM (Balai Kemitraan Permolisian Masyarakat) adalah stempel atau sarana yang digunakan untuk kegiatan Polri dan masyarakat dalam membangun kemitraan dan pembahasan "*problem solving*" (Buku Pintar Bhabinkamtibmas Tahun 2014).

Pembahasan tersebut memiliki makna yang dijabarkan pada penelitian jurnal peneliti Nofta Wulan Sari dkk yang berjudul "Peranan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam Meningkatkan Pelayanan Keamanan Masyarakat di Polsek Sumoroto Kabupaten Ponorogo". Penelitian tersebut menjelaskan bahwa Bhabinkamtibmas sebagai *figurehead* memberikan arahan kepada anggotanya untuk dekat dengan masyarakat

dan aktif disegala kegiatan masyarakat. Sikap pelaksana ini merupakan penilaian FKPM terhadap suatu pekerjaan Bhabinkamtibmas yang telah dilakukan oleh Anggota Bhabinkamtibmas yang disesuaikan dengan Kode Etik Profesi Polri. FKPM memberikan penilaian terhadap Anggota Bhabinkamtibmas berdasarkan etika kepribadian, etika kenegaraan, etika kelembagaan, serta etika kemasyarakatan. Menurut salah satu Ketua FKPM yakni FKPM Kelurahan Tangkerang Tengah, pekerjaan Bhabinkamtibmas adalah pekerjaan yang ditugaskan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat yang merupakan perpanjangan tangan dari Polri. Partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan Bhabinkamtibmas sudah maksimal dilakukan, namun masih saja ada masyarakat yang belum berpartisipasi aktif dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat. Hal ini dikarenakan oleh sikap Anggota Bhabinkamtibmas itu sendiri. Apabila Anggota Bhabinkamtibmas tersebut ikut aktif dan turun serta dalam kegiatan masyarakat, maka masyarakatnya akan berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan Bhabinkamtibmas.

Tak hanya Anggota Bhabinkamtibmas yang mendapat pelatihan-pelatihan dari pimpinan kepolisian, tapi FKPM juga mendapatkan berbagai pelatihan yang diberikan oleh Anggota Bhabinkamtibmas maupun Binmas Polresta Pekanbaru. Hal ini memiliki tujuan agar FKPM dan masyarakat sekitarnya dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada dilingkungannya. Pelatihan-pelatihan yang telah didapatkan oleh FKPM ialah pelatihan PBB, pelatihan kebangsaan, pelatihan kamtibmas, dan pelatihan lainnya. FKPM melakukan kegiatan kamtibmas membutuhkan anggaran, hal ini dikarenakan anggaran tersebut digunakan untuk membeli fasilitas-fasilitas kamtibmas. Anggaran tersebut berasal dari masyarakatnya sendiri, anggota Bhabinkamtibmas, dan pihak kelurahan.

### **C. ANALISIS SWOT**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, maka peneliti menggunakan analisis SWOT sebagai faktor pendukung dan penghambat dalam proses implementasi *community policing* Polresta Pekanbaru, Riau. Analisis SWOT adalah faktor-faktor dalam merumuskan strategi perusahaan yang berdasarkan logika dengan memaksimalkan kekuatan (*strengts*) dan

peluang (*opportunities*), serta dapat meminialkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*) (Rangkuti, 2004: 18).

### 1. Kekuatan (*Strengts*)

- (a) Anggota Bhabinkamtibmas mendapatkan dukungan dari beberapa pihak-pihak yang berkepentingan seperti kelurahan, RT, RT, dan FKPM.
- (b) Anggota Bhabinkamtibmas mendapat bantuan dari Anggota FKPM sebagai perwakilan dari Anggota Bhabinkamtibmas pada saat melaksanakan kegiatan kamtibmas di lingkungan masyarakat.
- (c) Anggota Bhabinkamtibmas mendapat bantuan dari sesama Anggota Bhabinkamtibmas dan juga sesama anggota kepolisian bidang lainnya. Pada saat Anggota Bhabinkamtibmas menyelesaikan masalah yang bersifat pidana, maka anggota kepolisian bidang serse yang akan membantu menyelesaikan masalah tersebut.
- (d) Kegiatan kreativitas yang dimiliki Anggota Bhabinkamtibmas dapat membuat masyarakat semakin dekat dengan keberadaan Anggota Bhabinkamtibmas di lingkungan masyarakat.
- (e) Anggota Bhabinkamtibmas memiliki kartu identitas. Kartu identitas tersebut diberikan kepada masyarakat sebagai bentuk keamanan dan kenyamanan yang diberikan Anggota Bhabinkamtibmas kepada masyarakat apabila di lingkungan masyarakat memiliki permasalahan ataupun kegiatan yang membutuhkan tangan Anggota Bhabinkamtibmas.
- (f) Anggota Bhabinkamtibmas mendapat pelatihan dari JICA (*Japan Internasional Cooperation Agency*) dengan keberangkatan ke Jepang ataupun pengiriman Polisi Jepang ke Indonesia untuk meningkatkan profesionalitas kerja Anggota Bhabinkamtibmas.
- (g) Anggota Bhabinkamtibmas memiliki Buku Pintar Bhabinkamtibmas sebagai pedoman yang digunakan Anggota Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan kegiatan kamtibmas.

### 2. Kelemahan (*Weakness*)

- (a) Kurangnya kreativitas yang berasal dari masing-masing Anggota Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan kegiatan kamtibmas yang seharusnya dari ide kreatif itu akan membuat masyarakat semakin lebih percaya kepada anggota kepolisian.
- (b) Masih adanya masyarakat yang tidak berperan aktif dalam kegiatan kamtibmas yang telah diselenggarakan Anggota Bhabinkamtibmas dikarenakan Anggota Bhabinkamtibmas kurang berperan aktif pada saat masyarakat melakukan kegiatan kamtibmas.

### **3. Peluang (*Opportunities*)**

Setiap Anggota Bhabinkamtibmas Jajaran Polresta Pekanbaru memiliki peluang dalam memaksimalkan kegiatan kamtibmas dengan melakukan kegiatan kreativitas yang berasal dari keluhan masyarakat maupun hasil ide pemikiran sendiri. Tidak hanya melakukan kegiatan pokok yakni DDS (*door to door system*) dan *Problem Solving*, tetapi juga melakukan kegiatan kreativitas seperti yang dilakukan oleh Bripta Ilham Nur (Bhabinkamtibmas Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai). Dari kegiatan kreativitas inilah, masyarakat akan menilai bagus tidaknya pekerjaan yang dilakukan Anggota Bhabinkamtibmas dan juga layak atau tidaknya apabila Anggota Bhabinkamtibmas dipertahankan tugasnya sebagai Anggota Bhabinkamtibmas di lingkungan masyarakat itu sendiri. Anggota Bhabinkamtibmas juga memiliki peluang untuk memaksimalkan partisipasi masyarakat dengan cara Anggota Bhabinkamtibmas juga aktif dalam kegiatan masyarakatnya.

### **4. Ancaman (*Threats*)**

- (a) Pekerjaan kamtibmas yang diembankan kepada Anggota Bhabinkamtibmas ini harus menjaga nama baik kepolisian. Jika pekerjaannya hanya semata-mata mengharapkan gaji setiap bulannya dan tidak bermasyarakat, maka penilaian masyarakat terhadap anggota kepolisian akan menurun yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap anggota kepolisian di lingkungan masyarakat.

- (b) Kurangnya kreativitas yang dimiliki oleh setiap Anggota Bhabinkamtibmas Jajaran Polresta Pekanbaru ini, akan membuat rasa jenuh yang ada di benak masyarakat. Masyarakat akan bosan melakukan kegiatan yang sama dan tidak ada perubahan akan kegiatan tersebut.
- (c) Kurang aktifnya Anggota Bhabinkamtibmas dalam mengikuti kegiatan masyarakat, akan membuat masyarakat tidak peduli lagi atau tidak aktif lagi terhadap pelaksanaan kamtibmas.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini, didapatkan kesimpulan bahwa teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III menjadi landasan dalam pelaksanaan kegiatan Bhabinkamtibmas Jajaran Polresta Pekanbaru, Riau.

#### **1. PROGRAM KERJA ANGGOTA BHABINKAMTIBMAS**

DDS (*Door to Door System*) ialah kegiatan wajib Anggota Bhabinkamtibmas dengan mengunjungi rumah-rumah masyarakat, menghadiri kegiatan masyarakat, dan penyuluhan ke area tempat-tempat yang berada di lingkungan Bhabinkamtibmas untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat. *Problem solving* adalah penyelesaian masalah yang berada di lingkungan Bhabinkamtibmas dengan tujuan untuk membantu pekerjaan serse atau reskrim dan memberikan pengurangan laporan polisi yang ada di Polsek. FKPM (Forum Kemitraan Pemolisian Masyarakat) adalah sebuah kelompok yang bertugas membantu kerja anggota Bhabinkamtibmas dalam *problem solving* masyarakat. beranggotakan masyarakat secara sukarela di wilayah Bhabinkamtibmas. Sedangkan BKPM (Balai Kemitraan Permolisian Masyarakat) adalah suatu tempat berkumpulnya anggota FKPM atau masyarakat dan Anggota Bhabinkamtibmas dengan tujuan menyelesaikan *problem solving* ataupun mengadakan rapat yang berhubungan dengan kegiatan masyarakat. Kegiatan kreativitas Anggota Bhabinkamtibmas adalah kegiatan non pokok sebagai hasil pemikiran ide pikiran dan berasal dari hati nurani seorang Anggota Bhabinkamtibmas setelah mendengar keluhan dari masyarakatnya akibat dari keprihatinan masyarakat dan Anggota Bhabinkamtibmas terhadap masyarakat yang membutuhkan pertolongan.

## 2. IMPLEMENTASI *COMMUNITY POLICING* POLRESTA PEKANBARU, RIAU

Implementasi *community policing* pada Polresta Pekanbaru, Riau menggunakan implementasi kebijakan berdasarkan faktor-faktor berikut:

### (a) **Komunikasi**

Komunikasi efektif terjadi pada Binmas Polresta Pekanbaru terhadap Anggota Bhabinkamtibmas Jajaran Polresta Pekanbaru, Riau. Anggota Bhabinkamtibmas melakukan komunikasi langsung dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat berupa mengunjungi rumah-rumah masyarakat setiap hari, mempertanyakan permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat, mendata anggota keluarga sesuai dengan KK (Kartu Keluarga), memberikan materi penyuluhan tentang kamtibmas, dan menjalin interaksi komunikasi yang baik antara Bhabinkamtibmas dan masyarakat dilingkungannya dengan memberikan pesan-pesan ataupun nasehat serta melakukan pembinaan terhadap masyarakat mengenai keamanan dan ketertiban masyarakat agar dapat terhindar dari penyakit-penyakit masyarakat seperti terorisme, radikalisme, pergaulan bebas, narkoba, dan lain-lain. Pelaksanaan kamtibmas yang dilakukan Anggota Bhabinkamtibmas ini membina 3 pembinaan: Bintibmas, Binredawan, dan Binkamsa. Anggota Bhabinkamtibmas memiliki tanggung jawab kepada Kapolsek sebagai bentuk hasil dari kegiatan kamtibmas. Anggota Bhabinkamtibmas memiliki kartu nama sebagai identitas keanggotaan Bhabinkamtibmas untuk melakukan komunikasi dengan masyarakat. Hasilnya adalah komunikasi menjadikan semakin melekatnya Anggota Bhabinkamtibmas kepada masyarakat dengan melakukan kerja sama dibidang memelihara kamtibmas.

### (b) **SUMBER DAYA**

Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional) sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan fungsional untuk menjamin profesionalisme dan kemandirian Polri yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan integrasi anggota dan pejabat Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Perpes No. 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional). Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) membentuk satu Anggota Kepolisian Bhabinkamtibmas

Jajaran Polresta Pekanbaru untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat setiap kelurahan. Banyak Anggota Bhabinkamtibmas yang masih mengeluhkan dengan penempatan satu anggota Bhabinkamtibmas di setiap kelurahan dengan memiliki jumlah warga yang banyak. Kualifikasi dalam menyeleksi anggota Bhabinkamtibmas dengan syarat-syarat khusus diantaranya: minimal berpangkat Briptu, penilaian dari kelurahan, masyarakat, dan pimpinan, dan syarat-syarat lainnya, namun yang terpenting ialah harus memiliki *public speaking* yang baik serta sopan santun terhadap masyarakat agar masyarakat memberikan penilaian yang baik terhadap kinerja anggota Bhabinkamtibmas tersebut. Pelayanan kepolisian terhadap pelaksanaan kamtibmas yang dilakukan oleh Anggota Bhabinkamtibmas Jajaran Polresta Pekanbaru di setiap kelurahan membutuhkan semua dukungan dan partisipasi dari berbagai kalangan seperti dukungan dan partisipasi dari pimpinan kepolisian yakni menyediakan fasilitas, pelatihan, dan lain-lain. Adapun dukungan-dukungan yang lainnya ialah dukungan yang berasal dari tokoh masyarakat seperti pihak kelurahan, RT, RW, dan tokoh agama. Dukungan dan partisipasi yang paling penting ialah dukungan dari masyarakatnya sendiri karena Anggota Bhabinkamtibmas membutuhkan masyarakat yang dapat berperan aktif, memiliki kemauan dan kemampuan tinggi terhadap kamtibmas, dan mampu bekerja sama dengan baik agar dapat menciptakan kondisi yang kondusif, aman, dan nyaman.

Anggota Bhabinkamtibmas Jajaran Polresta Pekanbaru juga mendapatkan pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh Binmas Polresta Pekanbaru. Pelatihan yang diterima Anggota Bhabinkamtibmas salah satunya ialah kedatangan polisi Jepang ke Indonesia. Pembahasan ini memiliki persamaan dengan penelitian skripsi peneliti Muhammad Guntur HS. Yang berjudul “Peranan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam Penangan Tindak Pidana Ringan (Tipiring)”. Pada penelitian tersebut menjelaskan bahwa JICA (*Japan Internasional Cooperation Agency*) merupakan penolong dalam pengembangan pemerintah melalui peningkatan sumber daya manusia dengan memberikan bantuan teknis dan dana yang tidak mengikat. Pengiriman polisi Jepang ke Indonesia sebagai tenaga ahli serta pengiriman polisi Indonesia ke Jepang untuk pelatihan tidak hanya menghasilkan polisi yang

berkualitas, tetapi juga mampu menyebarluaskan keahlian dan pengetahuan kepada jajaran kepolisian di seluruh wilayah Indonesia.

### (c) **STRUKTUR BIROKRASI**

Pelaksanaan Bhabinkamtibmas tidak diatur oleh undang-undang khusus, namun anggota Bhabinkamtibmas yang juga anggota kepolisian melaksanakan tugas kepolisian diatur dalam UU RI No. 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugas kewajiban sebagai anggota kepolisian, ada beberapa peraturan yang harus ditaati. Apabila ada anggota kepolisian yang melanggar tugas kewajiban tersebut maka ia melanggar UU RI No. 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 30 Ayat (1). Hal ini dimaksudkan untuk pemuliaan profesi kepolisian, sedangkan terhadap pelanggaran hukum disiplin dan hukum pidana diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-perundangan. Bhabinkamtibmas memiliki Buku Pintar Bhabinkamtibmas sesuai dengan Keputusan Kapolri Nomor: KEP/618/VII/2014 Tanggal 29 Juli 2014 Tentang Buku Pintar Bhabinkamtibmas sebagai pedoman kepada setiap anggota Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugas-tugasnya di lingkungan masyarakat. Anggota Bhabinkamtibmas sebagai penyambung lidah antara Polri dan masyarakat, selain harus menyampaikan pesan-pesan kamtibmas kepada masyarakat, Anggota Bhabinkamtibmas juga harus menerima harapan dan keinginan masyarakat pada Polri. Pembahasan diatas memiliki persamaan dengan pada penelitian jurnal peneliti Nofta Wulan Sari dkk yang berjudul “Peranan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam Meningkatkan Pelayanan Keamanan Masyarakat di Polsek Sumoroto Kabupaten Ponorogo” yang menjelaskan bahwa peranan Anggota Bhabinkamtibmas sebagai pemimpin (*leader*) dengan melakukan kegiatan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, serta motivasi kepada masyarakat. Dalam melaksanakan pekerjaan kamtibmas, Anggota Bhabinkamtibmas diawasi oleh Provost Kepolisian (badan kepolisian yang menangani, membina serta mengawasi personil kepolisian dalam bekerja).

**(d) SIKAP PELAKSANA**

Kepolisian memiliki fungsi yang salah satunya ialah fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: Pasal 2). Anggota kepolisian memiliki Kode Etik Profesi Polisi sebagai penuntun, pembimbing dan pengendalian setiap anggota kepolisian agar berperilaku baik sesuai dengan nilai kebaikan yang terkandung dalam profesi kepolisian. FKPM (Forum Kemitraan Pemolisian Masyarakat) adalah sebuah kelompok komunikasi antara Polri dan masyarakat yang dilaksanakan atas dasar kesepakatan bersama dalam rangka membahas masalah kamtibmas dan masalah-masalah sosial yang perlu dipecahkan bersama guna menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Tugas FKPM adalah membantu kerja Anggota Bhabinkamtibmas dalam *problem solving* masyarakat (Buku Pintar Bhabinkamtibmas Tahun 2014). Pembahasan tersebut memiliki makna yang dijabarkan pada penelitian jurnal peneliti Nofta Wulan Sari dkk yang berjudul “Peranan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam Meningkatkan Pelayanan Keamanan Masyarakat di Polsek Sumoroto Kabupaten Ponorogo”. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa Bhabinkamtibmas sebagai *figurehead* memberikan arahan kepada anggotanya untuk dekat dengan masyarakat dan aktif disegala kegiatan masyarakat.

Penilaian FKPM terhadap suatu pekerjaan Bhabinkamtibmas yang telah dilakukan oleh Anggota Bhabinkamtibmas yang disesuaikan dengan Kode Etik Profesi Polri. Hasil penilaian tersebut adalah: Pekerjaan Bhabinkamtibmas adalah pekerjaan yang ditugaskan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat yang merupakan perpanjangan tangan Polri. Partisipasi masyarakat sudah maksimal dilakukan, namun masih saja ada masyarakat yang belum berpartisipasi aktif dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat, tergantung dari tindakan Anggota Bhabinkamtibmas. FKPM mendapatkan pelatihan dari Anggota Bhabinkamtibmas maupun Binmas Polresta Pekanbaru, tujuannya agar FKPM dan masyarakat sekitarnya dapat mengatasi permasalahan dilingkungannya. Pelatihan yang telah

didapatkan ialah pelatihan PBB, pelatihan kebangsaan, pelatihan kamtibmas, dan pelatihan lainnya. FKPM melakukan kegiatan kamtibmas membutuhkan anggaran untuk membeli fasilitas-fasilitas kamtibmas dan anggaran tersebut berasal dari masyarakatnya sendiri, Anggota Bhabinkamtibmas, dan pihak kelurahan.

**(e) ANALISIS SWOT**

- (1) Kekuatan (*Strengts*). Anggota Bhabinkamtibmas mendapatkan dukungan dari beberapa pihak-pihak yang berkepentingan seperti kelurahan, RT, RT, dan FKPM (perwakilan Anggota Bhabinkamtibmas di masyarakat). Anggota Bhabinkamtibmas mendapat bantuan dari sesama Anggota Bhabinkamtibmas dan juga sesama anggota kepolisian bidang lainnya seperti reserse dalam menyelesaikan kasus pidana. Kegiatan kreativitas Bhabinkamtibmas dapat membuat masyarakat semakin dekat dengan keberadaan Anggota Bhabinkamtibmas. Anggota Bhabinkamtibmas memiliki kartu identitas yang tersebut diberikan kepada masyarakat sebagai bentuk keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat. Anggota Bhabinkamtibmas mendapat pelatihan dari JICA (*Japan Internasional Cooperation Agency*) untuk meningkatkan profesionalitas kerja Anggota Bhabinkamtibmas. Anggota Bhabinkamtibmas memiliki Buku Pintar Bhabinkamtibmas sebagai pedoman yang digunakan Anggota Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan kegiatan kamtibmas.
- (2) Kelemahan (*Weakness*). Kurangnya kreativitas yang berasal dari Anggota Bhabinkamtibmas itu sendiri. Masih adanya masyarakat yang tidak berperan aktif dalam kegiatan kamtibmas yang telah diselenggarakan Anggota Bhabinkamtibmas akibat dari kurang aktifnya Anggota Bhabinkamtibmas di lingkungan masyarakat.
- (3) Peluang (*Opportunities*). Peluangnya ialah dengan memaksimalkan kegiatan kamtibmas melalui melakukan kegiatan kreativitas yang berasal dari keluhan masyarakat maupun hasil ide pemikiran sendiri. Dari

kegiatan kreativitas inilah, masyarakat akan menilai bagus tidaknya pekerjaan yang dilakukan Anggota Bhabinkamtibmas dan juga layak atau tidaknya apabila Anggota Bhabinkamtibmas dipertahankan tugasnya sebagai Anggota Bhabinkamtibmas di lingkungan masyarakat itu sendiri. Peluang lainnya yakni memaksimalkan partisipasi masyarakat dengan cara Anggota Bhabinkamtibmas juga aktif dalam kegiatan masyarakatnya.

- (4) Ancaman (*Threats*). Anggota Bhabinkamtibmas dalam bekerja ini harus menjaga nama baik kepolisian. Kurangnya kreativitas yang dimiliki oleh setiap Anggota Bhabinkamtibmas Jajaran Polresta Pekanbaru ini, akan membuat rasa jenuh yang ada di benak masyarakat. Masyarakat akan bosan melakukan kegiatan yang sama dan tidak ada perubahan akan kegiatan tersebut. Kurang aktifnya Anggota Bhabinkamtibmas dalam mengikuti kegiatan masyarakat, akan membuat masyarakat tidak peduli lagi atau tidak aktif lagi terhadap pelaksanaan kamtibmas.

## **B. KETERBATASAN PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, peneliti menyadari masih memiliki kekurangan dalam menganalisis dan menjelaskan tentang implementasi *community policing* Polresta Pekanbaru, Riau. Keterbatasan peneliti pada penelitian ini adalah peneliti tidak membahas kegiatan kreativitas yang dilakukan Anggota Bhabinkamtibmas lainnya. Hal ini dikarenakan peneliti mendapatkan saran dari Kasat Binmas Polresta Pekanbaru untuk membahas kegiatan kreativitas yang telah dilakukan oleh Bripta Ilham Nur (Bhabinkamtibmas Kelurahan Sidomulyo Timur, Polsek Bukit Raya). Alasan peneliti lainnya ialah pada saat mengunjungi Kantor Polresta Pekanbaru, peneliti diberikan buku yang berisikan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Bripta Ilham Nur. Buku tersebut akan diperlombakan dalam Lomba Polmas Award Kapolri Cup ke IV tahun 2017.

## C. SARAN

### 1. Saran Akademik

Penelitian mengenai implementasi pelaksanaan *community policing* oleh Polresta Pekanbaru, Riau ini masih memiliki banyak kekurangan. Untuk itu, rekomendasi untuk peneliti pada penelitian selanjutnya ialah, melakukan penelitian dengan objek dan subjek yang sama namun fokus penelitian yang berbeda. Maksudnya adalah ialah lebih berfokus pada kegiatan Bhabinkamtibmas masing-masing Polsek secara spesifik. Hal ini dikarenakan anggota Bhabinkamtibmas masing-masing Polsek memiliki kegiatan kreativitas selain kegiatan pokok sebagai anggota Bhabinkamtibmas.

### 2. Saran Praktis

Saran peneliti kepada pihak Satuan Binmas Polresta Pekanbaru khususnya anggota-anggota Bhabinkamtibmas Jajaran Polresta Pekanbaru, diantaranya:

- (a) Peneliti menyarankan kepada setiap Anggota Bhabinkamtibmas Jajaran Polresta Pekanbaru untuk memiliki ide atau kegiatan kreativitas yang dapat meningkatkan minat partisipasi masyarakat secara lebih terhadap kegiatan kamtibmas. Hal ini dikarenakan masyarakat bosan dengan kegiatan yang dilakukan oleh Anggota Bhabinkamtibmas tidak ada perubahan (selalu melakukan kegiatan pokok Anggota Bhabinkamtibmas).
- (b) Peneliti menyarankan kepada Satuan Binmas Polresta Pekanbaru dengan memberikan arahan kepada Binmas masing-masing Polsek untuk menambahkan anggota Bhabinkamtibmas disetiap kelurahan. Hal ini dikarenakan Anggota Bhabinkamtibmas harus menertibkan dan mengamankan masyarakat yang berbanding jauh dengan jumlah Anggota Bhabinkamtibmas itu sendiri.
- (c) Peneliti menyarankan kepada Satuan Binmas Polresta Pekanbaru untuk menetapkan waktu jam kerja anggota Bhabinkamtibmas. Hal ini dikarenakan jumlah Anggota Bhabinkamtibmas yang sedikit ditambah dengan jumlah masyarakat yang banyak dan permasalahannya yang banyak, yang menyebabkan jam kerja Anggota Bhabinkamtibmas menjadi 24 jam setiap harinya.

- (d) Peneliti menyarankan kepada Satuan Binmas Polresta Pekanbaru, menetapkan pekerjaan dan peletakan dinas Anggota Bhabinkamtibmas yang hanya berfokus pada kegiatan bermasyarakat. Hal ini dikarenakan masih banyaknya Anggota Bhabinkamtibmas yang memiliki pekerjaan rangkap, tak hanya menjadi Anggota Bhabinkamtibmas tetapi juga berperan sebagai anggota reserse, pengamanan demo, dan kegiatan lainnya.
- (e) Peneliti menyarankan kepada Satuan Binmas Polresta Pekanbaru, memfasilitasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Anggota Bhabinkamtibmas dan masyarakat sekitar wilayah kerja Anggota Bhabinkamtibmas.
- (f) Peneliti menyarankan kepada Binmas Polresta Pekanbaru untuk menambahkan anggaran yang dibutuhkan oleh Anggota Bhabinkamtibmas. Hal ini dikarenakan anggaran yang telah diterima oleh Anggota Bhabinkamtibmas setiap bulannya tidak sebanding dengan biaya pengeluaran dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh Anggota Bhabinkamtibmas.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Edwards III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.
- Effendy, Onong Uchjana. (2002). *Hubungan Masyarakat Suatu Studi Komunikologis*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Fajar, Marhaeni. (2009). *Ilmu Komunikasi Teori & Praktik*. Jakarta Barat: Graha Ilmu.
- Faustino dan Cardoso Gomes. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Friedman R. (1998). *Community Policing. Comporative and Prospect, terj.* Kunarto. Jakarta. Cipta Manunggal.
- Moore, Frazier. (2004). *Humas Membangun Citra dan Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Pramusinto, Agus dan Erwan Agus Purwanto. (2009). *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan, dan Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Rangkuti, Freddy. (2004). *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sofyandi, Herman. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syani, Abdul. (1995). *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat*. Bandar Lampung: Pustaka Jaya.
- Syaukani, dkk. (2004). *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Thoha, Miftah. (2007). *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

### **Jurnal/ Jurnal terj.:**

- Azhari, Cinthia Ayu. "Strategi Mengenal Khalayak Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) Polsekta Samarinda Utara dalam Membangun Kemitraan dengan Masyarakat di Kelurahan Mugirejo," *eJurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 6 No. 1 (2018), hal. 128 – 142.

- Azhari, Faisol. "Polri: dalam Fungsi Penegakan Ketertiban dan Dasar Kehidupan Masyarakat," *Jurnal Hukum*, Vol. XXVI, No. 2 (Agustus, 2011), hal. 654 – 666.
- Humberto, Mario. "POKDARKAMTIBMAS Pamulang sebagai Implementasi Kemitraan dalam Konteks *Community Policing*," *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 7 (Mei, 2010), hal. 46 – 66.
- Raharjo, Agus dan Angkasa. "Profesionalisme Polisi dalam Penegakan Hukum," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 3 (September, 2011), hal. 389 – 401.
- Sari, Nofta Wulan, Winarti, Joko Suratno. "Peranan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam Meningkatkan Pelayanan Keamanan Masyarakat di Polsek Sumoroto Kabupaten Ponorogo," *Jurnal Transformasi*, Vol. II No. 29 (2016), hal. 56 – 159.
- Wakhid, Ali Abdul. "Eksistensi Konsep Birokrasi Max Weber dalam Reformasi Birokrasi di Indonesia" *Jurnal TAPIs*, Vol. 7 No. 13 (Juli – Desember, 2011), hal: 126 – 146.

#### **Skripsi/ Tesis:**

- Amrullah, Ekarastiyanto. (2008). "Analisis Implementasi kebijakan Pemerintah terhadap Pengembangan Agroforestri di Kawasan Hutan Bromo Karanganyar". Skripsi Sarjana, Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Guntur HS, Muhammad. (2017). "Peranan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring)". Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Sitompul, Natalia Katherine. (2015). "Peranan Bhabinkamtibmas dalam Penanggulangan Kejahatan di Kota Metro". Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Syarief, Arwan. (2012). "Analisis Impelementasi Kebijakan Sekolah Bertaraf Internasional di SMPN 5 dan SMAN 3 Bandung". Tesis Magister, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta.

**Dokumen:**

Keputusan Kapolri Nomor: KEP/618/VII/2014, Tanggal 29 Juli 2014 Tentang Buku Pintar Bhabinkamtibmas.

Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Surat Keputusan (SKEP) Kapolri No. Pol: Skep/737/X/2005.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7, Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, Jakarta, 2008.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional.

Peraturan Kapolri No. Pol: 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri, Jakarta, Mabes Polri.

Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional, Rencana Kerja (Renja) Komisi Kepolisian Nasional tahun 2017.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**Internet:**

Humas Polda Riau, [https://www.instagram.com/humaspolda\\_riau/](https://www.instagram.com/humaspolda_riau/), (diakses 14 Oktober 2017).

## C. LAMPIRAN DOKUMENTASI



Gambar 1.1. Kantor Polresta Pekanbaru

Sumber: Dokumentasi Pribadi



Gambar 1.2. Mobil Penyuluhan Binmas Polresta Pekanbaru

Sumber: Dokumentasi Pribadi



Gambar 1.3. Mobil Balai Pelayanan Masyarakat Binmas Polresta Pekanbaru

Sumber: Dokumentasi Pribadi



Gambar 1.4. Kantor Polsek Sukajadi

Sumber: Dokumentasi Pribadi



Gambar 1.5. Wawancara dengan Banit I Binmas Polsek Bukit Raya (Bripka Shinta Zamelia)

Sumber: Dokumentasi Pribadi



Gambar 1.6. Wawancara dengan Kanit Binmas Polsek Pekanbaru Kota (Iptu Arifin Zainal) dan Bhabinkamtibmas Polsek Pekanbaru Kota (Aiptu Jayadi dan Bripka Jasman)

Sumber: Dokumentasi Pribadi



Gambar 1.7. Wawancara dengan Bhabinkamtibmas Polsek Tampan (Bripka Febri Rossalim,S.H.)

Sumber: Dokumentasi Pribadi



Gambar 1.8. Wawancara dengan Panit I Binmas Polsek Tenayan Raya (Aiptu Hemamalini) dan Bhabinkamtibmas Polsek Tenayan Raya (Bripka Zalman Harefa, Aiptu Indra Gunawan, dan Bripka S. Bagus Kuncoro)

Sumber: Dokumentasi Pribadi



Gambar 1.9. Kantor Polsek Lima Puluh

Sumber: Dokumentasi Pribadi



Gambar 1.10. Sepeda Motor Dinas Bhabinkamtibmas

Sumber: <http://tribratane.ws.polri.go.id/>

## D. LAMPIRAN WAWANCARA

### 1. WAWANCARA POLSEK SUKAJADI

Narasumber 1 : Iptu Saptono (Kanit Binmas Polsek Sukajadi)

Narasumber 2 : Aiptu Afrizal (Panit Binmas Polsek Sukajadi)

Narasumber 3 : Briпка M. Syafruddin (Bhabinkamtibmas Kelurahan Jadirejo)

Waktu Wawancara : 17 November 2017

#### a. Komunikasi

Peneliti : “Bagaimana aktivitas bhabinkamtibmas di Polsek Sukajadi ini secara umum?”

Narasumber : “Kalau aktivitas bhabinkamtibmas secara umum ini rutinitasnya ini apa selalu menghadiri kegiatan-kegiatan masyarakat. Setiap harinya kami itu tetap melaksanakan DDS. DDS itu *door to door system*. Jadi setiap hari itu kami diharuskan mempunyai kegiatan itu. Bikin laporan setiap bulannya terus dilengkapi dengan dokumentasi foto udah itu aja.

Peneliti : “Kalau program kerja rutinnya pak?”

Narasumber 1 : “Program kerja rutinnya. Itulah DDS itu. *Problem solving*. *Problem solving* ni artinya gini kalau ada masyarakat yang mempunyai masalah, kita ini langsung menyelesaikan. Artinya menyelesaikan, kita jembatani antara kedua pihak yang bermasalah. Tapi kalau itu sudah menyangkut kriminal atau segala macam tidak bisa kami selesaikan, kami serahkan ke serse dilanjut perkaranya atau masalahnya. Tapi selagi bisa kami selesaikan kami jembatani ya kami selesaikan dengan catatan nantinya kedua belah pihak berdamai bikin surat perjanjian.

Peneliti : “Disini ada yang nama FKPM ya pak. Itu dibentuk oleh masyarakatnya sendiri atau dibentuk oleh polisinya yang mengajak masyarakat?”

Narasumber 1 : “Kalau FKPM langsung masyarakat. Masyarakat yang bentuk tapi nanti pas waktu pelantikan atau pengukuhan kami selalu di undang, kami selalu dijemput, sekurang-kurangnya kami diberi tahu. Inilah susunan FKPM susunan ntah ada keamanannya dilingkungan itu. FKPM itu terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat. RT RW dilibatkan menjadi anggota FKPM. Jadi kalau ada masalah di wilayahnya, pasti akan melapor ke RT deangkan RT itu anggota FKPM. Tapi ada juga bukam RT RW tapi tetap tokoh masyarakat itu.”

Peneliti : “Tugas FKPM sendiri apa pak?”

Narasumber 2 : “Membantu dalam problem solving.”

Narasumber 3 : “Membantu dibawahnya kami. Istilahnya kalau belum sampai ke kami, mereka berusaha untuk menyelesaikan dulu. Tapi kalau memang udah mereka ini tidak ada kesepakatan atau tidak selesai, mereka menghubungi kami.”

Peneliti : “Misalnya ada *problem solving* di masyarakat pak, itu harus lewat ketua pemuda atau ketua FKPM atau bisa langsung ke bhabinkamtibmasnya?”

Narasumber 1 : “Kadang-kdang mereka gini, mereka melapor dulu ke RT, ke RW, atau ke FKPM tadi, baru mereka mengajukan ke kami. Tapi kadang-kadang bisa juga langsung ke bhabinkamtibmas ya. Itu biasanya kedekatan bhabinkamtibmas ke masyarakat itu kan nah mereka langsung komunikasi lah dengan bhabinkamtibmasnya.”

Narasumber 2 : “Kalau dia FKPM itu menyelesaikan, dia harus melapor ke bhabinkamtibmas. Kalau dia menyelesaikan perkara.”

Peneliti : “Berarti istilahnya binmas bagian bhabinkamtibmas ini memang istilahnya membina FKPM juga membuat kayak mengganti polisi gitu pak ya?”

Narasumber 2 : “Itu polmas namanya. Polisi Masyarakat.”

Peneliti : “Kalau misalkan saya nih kan saya lingkungannya pasar, nah misalkan pegaduhan preman-preman itu gimana? Mengatasinya FKPM atau di bhabinkamtibmas pak?”

Narasumber 2 : “Kalau ibu lapor ke FKPM langsung aja ke FKPM. Kalau gak selesai ke FKPM biasanya FKPM lapor ke bhabinkamtibmasnya.”

Narasumber 1 : “Biasanya kek gitu gitu kalau ada RT RW nya setempat atau ketua pasar, mereka mencoba dulu untuk penyelesaian. Nanti hasil dari penyelesaian tetap ke bhabinkamtibmas. Ataupun langsung bhabinkamtibmas diikutsertakan. Rata-rata bhabinkamtibmas dilibatkan. Kalau ada masalah pasti dilibatkan.

Narasumber 2 : “Rata-rata selese gak selese tetep di telpon.”

## **b. Sumber Daya**

Peneliti : “Menurut bapak, efektif gak pak menempatkan 1 bhabinkamtibmas 1 kelurahan gitu, sedangkan 1 kelurahan itu masyarakatnya bisa sampe ribuan orang?”

Narasumber 1 : “Kalau untuk sementara itu efektif betul. Kalau disini gak sampe beribu-ribu kalilah kalau saya liat. Satu kelurahan itu ada sampe beribu?”

Narasumber 3 : “Ada. 1 kelurahan itu ada yang 4.000 5.000. di sukajadi masih standarlah.”

Narasumber 1 : “Kalau dikota ini masih standar lah.”

Narasumber 3 : “1 kelurahan di Mampung Melayu pak sampai 9.000 lebih.”

Narasumber 1 : “Untuk sementara masih efektif. Masih bisa ditanggulangi, karena kan gak semua masyarakat itu bermasalah. Itupun masalahnya walaupun ada gak setiap hari. Paling ntar 2 hari sekali seminggu sekali atau sebulan sekali. Berselisihnya paling-paling ya sampah, pagar, atau ya itulah pembatas. Bhabinkamtibmas ini tidak 100% menjalani profesinya. Soalnya polisi ini dengan cara perbandingan dengan masyarakat ini tidak seimbang. Seharusnya 1 polisi ini memegang 350 orang,. Sekarang 1 polisi melayani 1 kelurahan.

Narasumber 2 : “Kalau apa itu dek *problem solving* itu semacam tipiring (tindak pidana ringan).”

Peneliti : “Faktor pendukung dan penghambat dalam kegiatan bhabinkamtibmas apa aja pak? Yang bapak dapat keluhan dari anggota bapak?”

Narasumber 1 : “Kalau pendukungnya ya kita kan disini ada kendaraan bermotor, pendukungnya itu. Terus berupa pendukung ada RAB, RAB itu kami unntuk membantu pendukung mendukung masyarakat pos-pos kamling yang mau membuat atau baru jadi atau kira-kira pos kamling itu gak ada sarana prasarananya itu kita bantu berupa jaket, senter, mantel, nah itu.”

Peneliti : “Sesuai dengan prosedur ya pak?”

Narasumber 1 : “Iya sesuai prosedur.”

Narasumber 1 : “Jadi gini dek, kalau hari minggu malam minggu masyarakat itu membutuhkan kita. Rata-rata masyarakat inikan ada yang memegang no. hp bhabinkamtibmas. Dihubungi bhabinkamtibmas tetap datang.”

Narasumber 3 : “Masalah belum menyatunya polisi dan masyarakat itu pertama selaku bhabinkamtibmas ini kadang tidak tinggal di tempat situ. Nanti dibuat usulan kalau bisa di bhabinkamtibmas itu tinggal di wilayah masing-masing. Lebih cepat dan lebh efektif dia di lapangan. Warga tempatan.”

Narasumber 1 : “Kadang-kadang bhabinkamtibmas ini tugas ganda seperti dia ikut serta ke pam, demo, itu tadi. Tapi kalau memang bhabinkamtibmas ini terjun khusus ke masyarakat, kantornya pun nempel ke kelurahan, ha itu mungkin bisa.”

Peneliti : “Penempatannya bukannya di kantor kelurahan aja ya pak?”

Narasumber 1 : “Iya di masyarakat 1 di kelurahan 1. Di kelurahan itu ada mejanya. Dia kerjasama ada 3 pilar: Pak lurah, bhabinsa, dan bhabinkamtibmas.”

Peneliti : “Bapak kan sebagai kanit binmas, pemilihan anggota polisi yang dapat dianggap sebagai anggota bhabinkamtibmas itu gimana pak? Ada kriteria khusus?”

Narasumber 1 : “Kalau itu, itu pertama mereka mendaftar dulu, mencalonkan. Itu salah satu. Keduanya itu pemilihan dari pimpinan juga. Kita dari sini kan bertahap ni. Kasium ini bagian umum, kalau disini bagian pers kecilnya lah. Dia mencoba membuat menginput lalu melanjutkan ke polres. Nanti polres mendata ini cocok gak. Ditanya lagi ke kanitnya atau ke kapolseknya. Kalau kira-kira ini layak dan cocok baru di input ke situ. Terus dibikinkan spprinnya TR nya ke polda.”

Peneliti : “TR itu maksudnya gimana pak?”

Narasumber 1 : “TR itu kayak surat perintah. Iya ada surat perintahnya. Kalau sekarang di polres aja, dibuatkan surat perintahnya.”

Narasumber 3 : “Yang jelas bhabinkamtibmas itu yang pertama dia tidak cacat, secara moral tidak punya catatan jelek (pernah kriminal/ pencandu narkoba). Jadi fungsinya bhabinkamtibmas itu kedekatan masyarakat, membaaur ke masyarakat. Tidak ada jam kerja. Malam pun juga bekerja.”

Peneliti : “Masa jabatan bhabinkamtibmas itu berapa tahun pak?”

Narasumber 1 : “Oh gak tentu. Gak tentu.”

Narasumber 2 : “Syarat dia masuk itu kalau gak salah tu minimal kalau bintara minimal 2 tahun dinas. Sekurang-kurangnya dia berpangkat bripda boleh tapi paling sedikit dia 2 tahun di dinas. Baru boleh. Kalau gak belum bisa.”

Peneliti : “Kalau jabatannya sampai tua itu bisa?”

Narasumber 1 : “Bisa. Itupun tergantung masyarakat gak komplain suka sama dia kan. Kadang-kadang dia itu dipindahkan dengan pimpinan, tau-tau masyarakat gak mau, mungkin ada pertimbangan dari pimpinan. Kebanyakan bhabinkamtibmas ini ya gak ada batas waktu lah. Terkecuali dia ada promosi sekolah atau segala macam, ada yang keluar dari situ. Mungkin ada yang jadi panit kanitnya.”

Peneliti : “Sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan bhabinkamtibmas apa aja pak?”

Narasumber 1 : “Sumber dayanya yang pertama ya kecakapan itu. Dia pandai bergaul. Dia ada kedekatam dengan masyarakat, pandai bicara, dan perhatiannya ke masyarakat itu

artinya kerjalah dia kerjanya bagus. Tanpa pamrih. Kedekatan-kedekatan dengan lurah camat atau instansi samping.”

### c. Struktur Birokrasi

Peneliti : “Bhabinkamtibmas itu kan ada yang ngatur pak UU nya. Nah bagaimana jika ada salah seorang bhabinkamtibmas yang melanggar peraturan yang ada di UU?”

Narasumber 2 : “Itu masuknya di kode etik kepolisian lagi.”

Narasumber 1 : “Kalau di bhabinkamtibmas, bhabinkamtibmas inikan hanya jabatan. Kalau dia itu kan berdinasnya tetap di kepolisian. Siapapun dia gak peduli bhabinkamtibmas siapapun jabatannya walaupun dia seorang pimpinan yang paling atas kalau memang dia salah tetap di tindak sesuai dengan prosedur. Apapun permasalahannya tetap ditindak sesuai dengan prosedur.”

Narasumber 2 : “Kayak dikasih *reward* gitulah. Yang bagus dikasih penghargaan, yang melanggar dikasih tindakan.”

Peneliti : “Tindakannya bisa berupa ini gak pak kayak pencopotan anggota bhabinkamtibmas?”

Narasumber 2 : “Bisa, dicopot dari anggota bhabin bisa. Dimosi itu namanya.”

Narasumber 1 : “Bahkan bisa dilakukan pemecatan. Tengok pelanggarannya. Kalau dia narkoba, asusila mungkin kan bisa itu. Tapi kalau hanya pelanggaran dia malas, dia hanya di mutasi aja. Pindah tempat gak di bhabinkamtibmas ini. Tapi kebanyakan bhabinkamtibmas di Polsek Sukajadi ini *it's oke* lah hahaha.”

Narasumber 3 : “Yang penting nawaitunya. Nawaitunya kerja. Dari rumah ke kantor niatnya kerja. Untuk saya dapat uang dapat ini gak ada. Yang sudah aja gitu.”

Narasumber 1 : “Karena yang setiap apa setiap setelah melakukan kegiatan mereka masing-masing di tuntutan untuk memberikan laporannya masing-masing. Ha disitu fotonya disitu laporannya semua kegiatan.”

Peneliti : “Pelatihan khusus sebelum menjadi anggota bhabinkamtibmas dan sebelum terjun ke masyarakat apa aja pak?”

Narasumber 1 : “Kalau khusus itu melalui pendidikan-pendidikan ada, tapi untuk sementara yang layak maksud saya yang cakap itu dia mampu. Kadang-kadang dia mengajukan diri, kalau dia mengajukan diri berarti dia kan mampu. Nanti berjalan ada pembukaan pendidikan atau pendidikan khusus kejuruan atau segala macam,

ha itu dia diusulkan. Terus ada juga yang lebih dia apa lagi apa untuk dibawak ke study banding ke luar negeri. Seperti kayak di Jepang. Karena kita di bhabin ini sebagian besar kita mencontoh Jepang. Polisi-polisi Jepang pun sering ke sini memberikan pertukaran ilmu lah. Bahkan rekan bhabin kita pernah ada ke Jepang. Pelatihan lanjut ada di Semarang.”

Narasumber 2 : “Polsek Sukajadi ini bekerja sama dengan Polisi Jepang. Ini seluruh Indonesia tapi polisi Jepang itu sering ke sini. Disana namanya *koban* (polisi Jepang). Jadi apa yang dilihat di Jepang itu diterapkan ke sini.”

## **2. WAWANCARA POLSEK BUKIT RAYA**

Narasumber : Briпка Shinta Zamelia (Banit I Binmas Polsek Bukit Raya)

Waktu Wawancara : 17 November 2017

### **a. Komunikasi**

Peneliti : “Mbak Shinta disini posisinya sebagai apa ya?”

Narasumber : “Sebagai bintang unit. Kayak stafnya gitu kak.”

Peneliti : “Menurut Mbak Shinta, bagaimana aktivitas bhabinkamtibmas secara umum?”

Narasumber : “Tugas bhabinkamtibmas itu kak ada yang namanya *door to door system*. Kalau bhabinkamtibmas itu wajib mengunjungi rumah-rumah atau warga yang ada dikelurahannya. Setiap 1 kelurahan kan di pegang oleh 1 bhabinkamtibmas. Terus kalau ada, bhabinkamtibmas ini kan dianggarkan, kalau misalnya masuk anggaran, 1 harinya itu 2 rumah yang harus dikunjungi.”

Peneliti : “Itu memang dilakukan wajib?”

Narasumber : “Iya. Minimal 2. Kalau yang anggaran ya mbak. Kalau yang gak anggaran kayak keputusan atau kebijakan dari kasat binmas itu 1 harinya minimal 4. Di share ke whatsapp grup polresta gitu. Cuman kalau wajib tu bener-bener wajib yang dianggarkan itu 2 dalam sehari.”

Peneliti : “Kalau program kerjanya selain *door to door*, apa lagi mbak?”

Narasumber : “Ada *problem solving*. Itu tu kayak memecahkan masalah gitu. Misalnya ada warga nih kan masalahnya kayak perdata gitu kan ya mbak yang gak mesti ditangani sama reskrim, jadi kan menekan laporan polisi juga. Membantu

pekerjaan reskrim juga. Contohnya kayak kasus mesum atau perkelahian antar tetangga, atau perkelahian dalam rumah sendiri, atau KDRT seperti itu.”

Peneliti : “Disini ada namanya FKPM ya. FKPM itu dibentuk oleh masyarakatnya sendiri atau memang polisi yang ngebentuk? Dan kegiatannya apa aja biasanya?”

Narasumber : “Yang kedua mbak, polisi yang ngebentuk tapi anggotanya masyarakat. Kalau FKPM itu biasanya lebih membantu pekerjaan bhabinkamtibmas. Mereka itu *stay*nya di kelurahan.”

Peneliti : “Bukannya yang *stay* di kelurahan hanya bhabinkamtibmas aja ya mbak?”

Narasumber : “Tergantung aja sih mbak. Kan FKPM ini kan gak punya tempat, jadi dia bergabung sama rumah bhabinkamtibmas yang ada di kelurahan itu. Kaya seperti Pak Ilham itu. Kalau mbak pernah masuk ke rumah bhabinkamtibmasnya, disitu ada meja bhabinkamtibmasnya, terus ada meja sekitar 10 meja rapat untuk FKPMnya. Jadi FKPMnya itu ngumpul disitu.”

Peneliti : “Titin kan ditinggal di daerah Awal Bros Sudirman. Ini cerita sendiri ya mbak. Jadi ada permasalahan disana. Ada namanya ketua pemuda. Kita menganggapnya ketua pemuda ini premannya disana kalau kita tinggal di lingkungan pasar kan. Untuk pengaduan permasalahan *problem solving* itu apakah harus lapor dulu ke ketua pemuda/ FKPMnya atau boleh langsung ke bhabinkamtibmasnya?”

Narasumber : “Boleh langsung ke bhabinkamtibmasnya.”

Peneliti : “Kalau misal langsung ke polseknya gimana mbak?”

Narasumber : “Ya gak papa. Paling nantikan di SPKT. Nanti orang SPKT bilang mbak menceritakan permasalahannya itu apa, SPKT itu pandai menyimpulkannya mbak. Apakah harus membuat LP atau konsultasi dulu ke bhabinkamtibmas. Paling nanti dia yang menyarankan SPKT nya. Ibuk lebih baik ke bhabinkamtibmasnya aja dulu konsultasi. Dimediasi gitu.”

## **b. Sumber Daya**

Peneliti : “Mbak kan pernah mengikuti rapat keseluruhan bhabinkamtibmas di polsek ini, juga mereka pasti gimana perkembangannya tiap hari atau tiap minggu nya. Menurut mbak, efektif gak kalau 1 bhabinkamtibmas ini ditempatkan di 1 kelurahan? Atau mungkin gak efektif.”

Narasumber : “Kalau misalnya dibidang efektif tidak efektifnya, pasti tidak efektif ya mbak. Soalnya 1 kelurahan itu kan besar, dipegang 1 polisi, itu mbak waktunya kadang

pagi bhabinkamtibmas dapat telpon pak disini ada masalah, nanti malam dapat telpon gimana badannya waktu itu sendiri kan. Jadi waktunya itu mbak.”

Peneliti : “Permasalahannya di waktu?”

Narasumber : “Iya waktu. Intensitas kerjanya kan jadi berlebih bertambah, sementara di bhabinkamtibmas dia juga aktif. Nanti dari polsek, dia juga aktif misalnya kayak ada kegiatan patroli, diikutkan bhabinkamtibmasnya. Ada kegiatan razia malam, diikutkan lagi bhabinkamtibmasnya. Kadang bhabinkamtibmas ini pun mengeluh sendiri, makanya gak efektif kalau misalnya 1 kelurahan tu dipegang 1 bhabinkamtibmas.”

Peneliti : “Kalau menurut mbak efektifnya berapa orang dalam 1 kelurahan?”

Narasumber : “Kalau di Bukit Raya inikan ada 4 kelurahan. Itukan 4 bhabinkamtibmas. Setidak-tidaknya di 1 kelurahan itu 2 dipegang sama bhabinkamtibmasnya. Cuman kan keterbatasan anggaran, makanya di bikin 1 bhabinkamtibmas 1 kelurahan. Semuanya itu karena keterbatasan anggaran itu tadi mbak hehehe.”

Peneliti : “Bukan keterbatasan anggota?”

Narasumber : “Anggota banyak disini. Kalau di Bukit Raya ini ada 101 anggota. Kalau inikan polsek urban, maksudnya polsek besar. Kalau Sukajadi itu rural dibawah urban. Urban itu di Tampan, Bukit Raya. Kalau yang sedikit anggotanya itu udah termasuk polsek rural.

Peneliti : “Menurut Mbak Shinta, faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan bhabinkamtibmas apa aja?”

Narasumber : “Kalau menurut saya misalnya bhabinkamtibmas punya program, faktor pendukungnya itu ya yang pastinya anggaran ya mbak. Misalnya dia mau ngadain jumat barokah untuk membantu warga yang kurang mampu, itukan pertama dari anggaran. Terus yang kedua itu dukungan dari pihak kelurahan, pihak RT RW atau FKPM nya. Terus yang menghambatnya itu ya dari segi besarnya wilayah tapi dia yang menangani sendiri.”

Peneliti : “Menurut Mbak Shinta, pemilihan anggota polisis yang dapat dianggap sebagai bhabinkamtibmas itu seperti apa? Ada kriteria khusus?”

Narasumber : “Kalau zamannya dulu mbak yang mau jadi bhabinkamtibmas ini sedikit. Tahun 2000an sedikit peminatnya untuk jadi bhabinkamtibmas.”

Peneliti : “Alasannya kenapa mbak kok bisa sedikit?”

Narasumber : “Karena dipikiran polisi itu, tempat yang bagus itu ya kayak di samsat di lintas. Seperti itu mbak. Yang pamornya rendah itu kayak di binmas. Tapi sekarang itu semenjak bhabinkamtibmas dimunculkan malah yang dari shabara yang dari lintas mendaftarkan diri, mengajukan permohonan ke polresta ke kasat binmas untuk menjadi bhabinkamtibmas. Kayak kemaren disini tahun kemaren, 9 kelurahan di Bukit Raya. Polsek Bukit Raya ini kan 2 kecamatan mbak: Bukit Raya sama Marpoyan Damai. Yang Bukit Rayanya 4 yang Marpoyan Damainya 5. Pas tahun 2017 kemaren ada mekar, tambah 2 kelurahan lagi. Jadi 11 kelurahan.

Peneliti : “Kelurahannya apa aja mbak?”

Narasumber : “Kelurahan Perhentian Marpoyan dan satu lagi Kelurahan Air Dingin. Simpang Tiga ini dibagi 2. Yang kiri Simpang Tiga yang sana Air Dingin. Jadi terdengar kabar bahwa kelurahan akan pecah, sampai 5. Dek tolong buat surat permohonannya. Sampai kayak gitu kak. Misalnya ada bhabinkamtibmas yang pindah kemaren ke Kuantan Singingi ikut istri dan orangtua disana, terdengar kabar pindah, yang mau keluar 1 yang mau masuk 5. Dipilih dulu sama kasat binmas, yang masuk harus 1. Keluar 1 masuknya 1. Kayak mutasi gitu. Memang yang mau masuk itu banyak mbak. Makanya dipilih dulu sama kasat kan.”

Peneliti : “Ada jabatan khusus gak mbak? Misal kamu boleh jadi anggota bhabinkamtibmas kalau kamu punya jabatan ini.”

Narasumber : “Oh itu gak ada.”

Peneliti : “Sumberdaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan bhabinkamtibmas apa aja mbak?”

Narasumber : “Yang dari polseknya itu dukungan dari kanitnya sendiri, dukungan dari teman-teman sesama bhabinkamtibmasnya, dukungan dari tokoh masyarakat dan masyarakat seperti RT RW nya, terutama dukungan dari pak lurahnya sendiri.”

Peneliti : “Kembali lagi ya Mbak Shinta. Masa jabatan bhabinkamtibmas itu berapa tahun mbak biasanya?”

Narasumber : “Sampai dia ada yang menggantikan. Kayak bhabinkamtibmas Aiptu Wahono itu udah 10 tahun menjadi bhabinkamtibmas. Selagi dia kinerjanya bagus, terus dia sendiri betah jadi bhabinkamtibmas, makanya dipertahankan. Kalau dia udah gak kerasan lagi pengen pindah di fungsi lain ya pindah. Kalau misalnya kurun waktu 3 tahun segini harus keluar itu gak ada.”

Peneliti : “Meskipun sampe pensiun polisi juga bisa mbak?”

Narasumber : “Iya. Bahkan ada bhabinkamtibmas yang sampai meninggal. Mengabdikan ke masyarakat.”

### **c. Struktur Birokrasi**

Peneliti : “Bhabinkamtibmas kan diatur oleh UU tersendiri, apakah ada bhabinkamtibmas yang melanggar UU tersebut?”

Narasumber : “Gak ada sih mbak.”

Peneliti : “Pelatihan khusus yang diberikan kepada anggota bhabinkamtibmas apa aja mbak?”

Narasumber : “Ada. Pelatihan itu ada banyak. Misalnya dari SPN itu pelatihannya ada di I kamtibmas, kayak menyampaikan penyuluhan kamtibmas yang baik itu seperti apa. Ada juga pelatihan negosiator misalnya kayak demo, bhabinkamtibmas bisa maju negosiasi sama pendemonya. Ada juga kemaren kanit sama kapolsek pergi pelatihan ke Jakarta. Itu namanya *in house training pilot project* mbak. Jadi 1 polsek itu dijadikan *pilot project* untuk didatangi sama polisi Jepang.

## **3. WAWANCARA POLSEK PEKANBARU KOTA**

Narasumber 1 : Aiptu Jayadi (Bhabinkamtibmas Kelurahan Tanah Datar)

Narasumber 2 : Iptu Zainal Arifin (Kanit Binmas Polsek Pekanbaru Kota)

Narasumber 3 : Briпка Jasman (Bhabinkamtibmas Kelurahan Sukaramai)

Waktu Wawancara : 18 November 2017

### **a. Komunikasi**

Peneliti : “Bagaimana aktivitas bhabinkamtibmas yang ada di Polsek Pekanbaru Kota secara umum?”

Narasumber 1 : “Tadi pagikan kita mengikuti apel. Menerima arahan dari pimpinan kita. Khusus untuk bhabinkamtibmas, ada arahan dari kanit. Habis itu kita program masing-masing perkelurahan. Kita sesuai dengan giat-giat yang ada. Kita ada kegiatan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Kita ikuti diluar dari bhabinkamtibmas yang lain. Kalau sasaran kita yang rutin itu DDS Door To Door System. Tujuan dari Door To Door System adalah untuk mendata apa sih yang diminta warga

untuk polisi yang bagaimana. Pertama itu. Yang kedua, kita bisa mendata sesuai dengan KK yang ada disitu. Tujuannya apa? Mungkin diluar bapak ibu anak, ada keponakaan atau anggota yang baru yang belum terdata di KK. Kita juga antisipasi masalah terorisme, supaya oh warga Pak Zainal ini semuanya ini itu diluar struktur keluarga adalah *family* atau siapa, kerjanya dimana, asal darimana, tujuan ke sini, apakah sementara atau bagaimana. Itu kita harus data untuk antisipasi daripada terorisme itu. Itu rutin tiap bhabinkamtibmas tiap hari. Tiap hari 5 KK wajib kita kunjungi. Itu dilengkapi dengan dokumentasi, didata, kita laporkan dengan pimpinan. Itu untuk identitasnya. Bhabinkamtibmas kita ada 6. Ini Pak Jasman ini Kelurahan Sukaramai. Kecamatan Pekanbaru Kota ada 6 kelurahan: Sukaramai, Kota Baru, Tanah Datar, Simpang Empat, Sumahilang dan Kota Tinggi. Masing-masing kelurahan 1 bhabinkamtibmas. Itu pokoknya kan berdasarkan tim giat dan arahan pimpinan. Kadang arahan pimpinan tidak bisa dipatokkan dengan tim giat. Misalnya ada yang mendesak. Nanti perintah kanit ini duluan yang mendesak itu yang harus diselesaikan.”

Narasumber 2 : “Di prioritaskan mana yang lebih penting dulu.”

Peneliti : “Selain DDS, apa lagi program kerjanya pak?”

Narasumber 1 : “Kita ada 3 pembinaan: bintibmas, binredawan, dan binkamsa. Bintibmas itu yang kita kunjungi tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama. Kita ke binredawan. Sasaran kita binredawan ini adalah remaja dan wanita, dimana supaya wanita dan remaja kita tidak terpengaruh dengan pergaulan bebas dan narkoba. Kita ajaklah ntah itu wirid ntah itu olahraga bersama. Kalau binkamsanya sasaran kita pos kamling, satpam-satpam di wilayah kita masing-masing itu kita bina. Termasuk perkantoran. Kita kumpulkan. Apasih kerjanya. Bagaimana cara membuat laporan. Bagaimana cara bertindak. Itu kita kasih arahan. Termasuk membina pos kamling.”

Narasumber 2 : “Pos kamling atau *security* yang ada di perusahaan, *bank*, dihotel juga.”

Peneliti : “Perkelurahan itu ada yang namanya FKPM ya pak. FKPM itu dibentuk oleh masyarakatnya sendiri atau dari polisinya?”

Narasumber 1 : “Masyarakat sendiri ya bentuk. Kita selaku bhabinkamtibmas teknisnya aja.”

Peneliti : “Membina dalam hal apa pak?”

Narasumber 1 : “Ya kita kan disitu fungsi FKPM untuk menyelesaikan lingkungan. Kita kasih arahan. Ini kalau mau selesai, dampaknya bagaimana. Itu dikoordinai oleh bhabinkamtibmasnya.”

Peneliti : “Untuk pengaduan *problem solving* yang ada di masyarakat, sistematika pengaduannya itu apakah kita harus mengadu ke ketua FKPM nya atau kita boleh langsung mengadu ke bhabinkamtibmas atau langsung ke polseknya?”

Narasumber 3 : “Yang namanya *problem solving* itu kan penyelesaian masalah yang ada dikelurahan kita. Jadi diselesaikan sama RT sama RW tidak bisa, baru ke bhabinkamtibmasnya. Nanti RT RW juga melapor ke bhabinkamtibmas. Julukan kami kan ini menyelesaikan masalah tanpa masalah. Moto bhabinkamtibmas itu tiada hari tanpa kabarmu. Itulah gunanya DDS.”

Narasumber 2 : “Itu sama dengan pegadaian ya.”

## **b. Sumber Daya**

Peneliti : “Menurut bapak sebagai Kanit Binmas Polsek Pekanbaru Kota ini, bapak kan sering mengadakan pertemuan seluruh bhabinkamtibmas. Menurut bapak, apakah efektif penempatan 1 bhabinkamtibmas itu di 1 kelurahan? Sedangkan masyarakat nya itu di 1 kelurahan bisa mencapai ribuan orang.”

Narasumber 2 : “Sebenarnya kalau kita kaji efektif tidak efektif, kita ada ketentuannya. Kalau dikota ini perkelurahan. Saya bayangkan lagi di Sumbar ada par nagari suatu bhabinkamtibmas. Dengan ditunjuk bhabinkamtibmas dengan ketentuan datanya ya, kita bandingkan dengan masyarakat yaa memang padat. Kita laksanakan aja sesuai dengan jumlah kita 1 lurah 1 bhabinkamtibmas. Kita laksanakan seefektif mungkin. Tugas berjalan. Itulah kita bisa menjalankan suatu kegiatan di kelurahan itu misal begini ada yang lebih mendadak, kita prioritas yang mendadak ini itu. Bhabinkamtibmas ini kita informasikan. Kitakan sering koordinasi dengan perangkat lurah. Ada informasi kegiatan ini, kemalangan ini kita datangi. Itu harus ada bhabinkamtibmasnya. Kalau perlu kanitnya saya turun gitu kalau ada waktu. Tapi yang paling utama kali ya bhabinkamtibmasnya. Tau semua selak beluk di kelurahan itu, dia udah tau tentang kegiatan apa aja. Semua itu koordinasi dari bhabinkamtibmas. Bhabinkamtibmas berkoordinasi dengan saya. Kalau sempat saya hadir. Walaupun gimana, sudah kita laksanakan aja. Kita laksanakan tugas itu dengan hati yang lapang. Yang ditugas oleh negara kepada kita ya kita laksanakan. Jadi menurut saya, udah mengikuti aturan itu dah sesuai.”

Peneliti : “Tapi sebenarnya dalam pelaksanaannya itu kurang efektif atau bagaimana pak?”

Narasumber 1 : “Sebenarnya ketentuannya itu dalam 1 bhabinkamtibmas menangani 200-300 warga. Tapi sementara itu kenyataannya warga kita udah 4.000 lebih. Makanya itu kami kekurangan personil.”

Peneliti : “Tapi pernah sih gak pak, anggap aja 1 bhabinkamtibmas itu menangani 4.000 warga. Tapi bagaimana jika bhabinkamtibmas tersebut membutuhkan bhabinkamtibmas yang lainnya untuk menanggulangi permasalahannya tersebut atau memang permasalahan dimasyarakat itu langsung diarahin ke kanitnya?”

Narasumber 1 : “Itu misalnya ada 3 atau 4 permasalahan, kita tadi meminta bantu dengan bhabinkamtibmas yang lain. Tolong tangani yang ini. Minta kanitnya tolong yang ini. Bebas. Itu dalam 1 kelurahan ya. Karena kita kan permasalahan itu kan macam-macam. Kira-kira mana yang efektif, mana yang prioritas, itu yang kita utamakan.”

Narasumber 2 : “Kita sering juga membantu. Misalnya bapak ini Tanah Datar. Ada yang mau kita bantu ya kita bantu. Selagi kita kosong. Kalau kegiatan dia padat pula itu gak mungkin. Kemudian kita bisa prioritaskan melalui saya kan, bapak boleh bantu disana, kegiatan disana padat ni. Contoh misalnya ada kegiatan 2 atau 3 dalam 1 lurah, lurah yang lainnya kosong kebetulan. Kita membutuhkan tenaga pengamanan.”

Narasumber 3 : “Intinya itu aja. Setiap orang itu ada omongannya. Masing-masing kelurahan tu walaupun dia 1 lurah 1 bhabinkamtibmas, tidak terlepas hubungannya dengan bhabinkamtibmas yang lainnya. Karena setiap kelurahan itu banyak kami kegiatannya. Dipercayalah bhabinkamtibmas sukaramai. Warga saya 6.000an. Kalau ada permasalahan di lain warga saya itu tetap bantu.”

Narasumber 2 : “Kita saling isi mengisi.”

Narasumber 1 : “Penduduk Pak Jasman ini 6.000an itu kalau malam. Tapi kalau siang karena daerah pasar udah lebih dari 10.000. Permasalahan pasar pada saat itu ya tetap karena wilayah bhabinkamtibmasnya Pak Jasmani ya Pak Jasmani juga yang menangani.”

Narasumber 3 : “Kitakan ada permasalahan kecopetan atau lainnya itu saya yang dulu tangani.”

Narasumber 2 : “Jadi intinya bhabinkamtibmas itu tugasnya lebih mendetail, yang sifat-sifat kecil-kecil bisa diselesaikan. Gak perlu ke kantor. Kecuali yang besar. Diselesaikan dulu dengan bhabinkamtibmasnya beserta perangkatnya RT RW. Kalau gak bisa diselesaikan, baru prosedur hukum lagi. Jadi itulah perannya bhabinkamtibmas. Dulu kan berkelahi antar tetangga, melaporkannya ke polisi. Jadi orangnya kita kelompokkan. Bertengkar masalah sampah, datang

bhabinkamtibmasnya udah selesai perkaranya. Bisa selesai. Kalau ada yang sakit karena bertengkar itu, ada obat ya diobati lah. Kalau dalam perkara besar seperti pembunuhan, itu jalur hukum aja kita lagi. Itu tak bisa lagi karena udah perkara berat. Kalau sifatnya kecil, peran bhabinkamtibmas disanalah dia. Istilahnya bisa diistilahkan bhabinkamtibmas ini kapolsek di kelurahan. Itu intinya, semua permasalahan bhabinkamtibmas harus tau. Koordinasi dengan perangkat di kelurahan.”

Peneliti : “Dalam melaksanakan tugas bhabinkamtibmas itu, faktor pendukung dan penghambatnya apa aja pak?”

Narasumber 3 : “Hambatan kita yang jelas disampaikan itu kurang personil. Tempat tinggal binmas bukan di kelurahan itu. Kita tinggalnya jauh atau kelurahan lainnya. Sarana dan prasaranannya belum dilengkapi. Kendaraan pribadi, minyak pribadi. Itu kendala ya. Yang paling penting itu kan yang namanya binmas kan kita melekat dengan masyarakat. Anak yang lahir kita harus hadir, matipun kita harus hadir. Nah disitulah fungsi binmas. Apapun permasalahannya kita mesti disitu. Yang paling saya dambakan kepada pemerintah itu. Kita menangani khusus bhabin itu yang terakhir finansial. Tidak sesuai dengan kenyataannya.”

Narasumber 2 : “Walaupun bagaimana, tugas harus tetap jalan.”

Narasumber 3 : “Kita juga dikasih sarana prasarananya. Kita kendaraan dinas ada. Tapi tidak semua bhabinkamtibmas. Yang mana dikasih kendaraan dinas, itu yang dikasih. Ya berangsur-angsur lah.”

Narasumber 2 : “Bhabinkamtibmas sekarang ini kan 6 baru dapat 3 kendaraan dinas. Untuk sementara.”

Peneliti : “Kemungkinan besar bisa dikasih semua nya kan pak?”

Narasumber 2 : “Iya bisa. Lambat laun dikasih juga. Mudah-mudahan.”

Narasumber 3 : “Amiiin.”

Narasumber 2 : “Kalau kendaraan dinas didukung dengan minyaknya. Walaupun bagaimana kita sudah pakai baju ini, kemanapun kita harus siap. Tugas tetap jalan. Tidak ada istilahnya mengeluh-ngeluh.”

Narasumber 3 : “Tapi kalau itu tidak terlalu kami permasalahan.”

Peneliti : “Untuk pemilihan anggota bhabinkamtibmas itu persyaratannya apa aja pak?”

Narasumber 3 : “Yang jelas dia mau jadi bhabinkamtibmas. Itu aja. Kalau tidak mau ya suka-suka hati jalannya.”

Narasumber 2 : “Yang pertama niat dulu. Kemudian penilaian pimpinan. Pimpinan dari kanitnya, kapolseknya, kasatnya kalau di polres. Kalau dia tidak menjiwai percuma aja dia jadi bhabinkamtibmas.”

Narasumber 1 : “Pangkatnya minimal briptu.”

Narasumber 2 : “Iya. Pangkatnya minimal briptu 2 kuning. Kalau bripta belum bisa. Karena 1 kali pangkat ini kan 4 tahun dinas, udah tau situasikan. Naiklah 1 tingkat. Ya itu dia harus mengayomi masyarakat. Harus pandai kita.”

Narasumber 3 : “Yang diumatakan sekali adalah penilaian pimpinan. Kalau dia amburadul ya gak bisa juga.”

Narasumber 1 : “Persyaratannya itu pangkat briptu, terus pengalaman.”

Peneliti : “Sumber daya yang dibutuhkan oleh personal bhabinkamtibmas apa aja pak?”

Narasumber 1 : “Yang penting kemampuan bermasyarakat. Kita gak mesti S1 atau yg lainnya. yang penting persyaratannya briptu dan mampu. Udah itu aja.”

Narasumber 2 : “Menjiwai dia. Kalau dia tidak mampu bermasyarakat, mungkin dia dibidang lain. S1 S2 S3 ada di polisi ini. Iitu tidak menjadi patokan kita dalam bertugas.”

Peneliti : “Masa jabatan bhabinkamtibmas berapa tahun pak?”

Narasumber 2 : “Itu tidak ada masa jabatan. Tergantung penilaian dari kapolres dan pimpinan yang lainnya. Tetep di kasih SK oleh kapolres.”

Narasumber 1 : “Itu ada sprin. Bisa diperpanjang bisa tidak. Misalnya bapak ini kena spri (surat perintah), nah nanti bisa saja diganti ni. Mungkin bisa pindah fungsi sesuai dengan kebutuhan organisasi.”

Narasumber 3 : “Gak permanen dia.”

Narasumber 2 : “Iya gak permanen. Bisa panjang bisa pendek. Menurut pimpinan misalnya bapak ini dibutuhkan, nanti ditempat di tempat lain.”

### **c. Struktur Birokrasi**

Peneliti : “Bhabinkamtibmas itukan diatur oleh UU. Bagaimana jika ada salah satu bhabinkamtibmas melanggar UU tersebut?”

Narasumber 1 : “Ketentuannya sama. Seluruh polisi sama. Tidak ada perbedaannya.”

Narasumber 3 : “Di UU kan udah diterangkan setiap warga negara Indonesia itu taat dan tunduk dibawah hukum.”

Peneliti : “Berarti bhabinkamtibmas ini hanya sebatas jabatan?”

Narasumber 1 : “Iya. Kalau masalah tindakan, itu sama semuanya.”

Narasumber 2 : “Siapa yang bersalah dia yang ditindak. Dimanapun dimana dinas dia bhabinkamtibmas atau reserse pun sama semua perlakuannya.”

Peneliti : “Pelatihan khusus yang diberikan pak apa aja?”

Narasumber 1 : “Iya ada. Macam-macam.”

Narasumber 3 : “Pengarahan. Pelatihan-pelatihan itu ada.”

Narasumber 1 : “Kita sebelum terjun ke masyarakat kita dituntut untuk penilaian pimpinan. Tau kan. Oh ini layak untuk masyarakat. Terus kita dikasih arahan melalui kanit kasat binmas biasanya. Langkah-langkah apa yang dibuthkan oleh masyarakat. Kita juga dilengkapi dengan buku sakunya buku pedoman.”

#### **4. WAWANCARA POLSEK TAMPAN**

Narasumber 1 : Bripka Febri Rossalim, S.H. (Bhabinkamtibmas Kelurahan Simpang Baru)

Narasumber 2 : Aiptu T. Lingga (Bhabinkamtibmas Kelurahan Sidomulyo Barat)

Waktu Wawancara : 21 November 2017

##### **a. Komunikasi**

Peneliti : “Selama kegiatan itu, kegiatan bhabinkamtibmas apa aja pak?”

Narasumber 1 : “Kita adakan penyuluhan. Terus kita penyuluhan tentang radikalisme. Sekarang kan lagi marak-maraknya tentang radikalisme ni.”

Peneliti : “Contohnya?”

Narasumber 1 : “Radikalisme itu contohnya anti pancasila, ingin membuat negara sendiri, ingin mengubah dasar negara pancasila, kita kasih pemahaman kepada orang itu. Kalau udah radikal kuat itu ada sampai ngebom.”

Peneliti : “Semacam teroris bukan?”

Narasumber 1 : “Iya. Orang itu kan udah kena paham radikal. Itulah gunanya kita kasih penyuluhan. Nanti ada foto-fotonya itu. Kami ke masjid ke apa, kasih penyuluhan radikalisme. Terus melakukan sambang masyarakat. Misalnya saya mendatangi titin ke rumahnya, itu sambang. Terus kami tanyakan gimana kabarnya, apa permasalahannya, bukan permasalahannya ada duit atau ndak ya, cuman bagaimana keamanan disitu. Nanti dia akan memberikan *feedback*. Pak disini ni ada orang kumpulan orang menyabu pak. Kita datangilah. Kita itu ibarat polisi sekarang jemput bola ke masyarakat. Itulah tugasnya bhabinkamtibmas ni. Kalau yang lain patrol aja. Kalau bhabinkamtibmas ni jemput bola ke masyarakat. Aman gak, gimana permasalahan keamanan di sana gitu.”

Peneliti : “Program kerja rutinnya apa aja pak?”

Narasumber 1 : “Yang pasti tu *door to door system* namanya. DDS itu minimal satu hari tu menyambangi 2 rumah. Kita wajib datangi 2 rumah. Kita foto. Kita dokumentasi. Nanti kami contohkan blangko DDS nya ada juga. Jadi kita isi disitu. Dirumah tu ada berapa orang. Siapa aja yang tinggal, nanti kita data. Udah tinggal, pekerjaannya apa. Ibaratnya kalau bagi penduduk-penduduk. Misalkan banyak tu orang pelaku-pelaku teror dia gak tinggal disana, pak RT nya gak tau, kita datangi disitu. Sambang nanti ditanyain. Kalau misal nanti terjadi permasalahan, siapa yang menanganin. Misalnya dirumah itu terjadi kebakaran. Disitu ada nomornya. Misal dia pulang kampung ni, bisa aja dia hubungi orang yang terdekat. Jadi kita punya data semua masyarakat disitu.”

Peneliti : “Selain *door to door* apa lagi?”

Narasumber 1 : “Ya sambang. Binluh. Penyuluhan ke sekolah-sekolah. Ke sekolah tu kenakalan remaja. Kita kasih tau disitu.”

Narasumber 2 : “Artinya semua itu kalau kita udah DDS semuanya. Permasalahan, pesan-pesan, artinya ya umpama nya ya keadaan ibuk, rumah itu jangan dalam keadaan terbuka. Honda dikunci pake kunci ganda. Semua itu kita berikan disana. Kita harus selesaikan disana. Itulah fungsi dari binmas itu. Itulah itu memang betul-betul pekerjaannya super. Binmas itu adalah membina masyarakat masuk surga. Jadi mengarahkan ke lebih baik.”

Narasumber 1 : “Itu namanya pak Aiptu T. Lingga. Bhabinkamtibmas Kelurahan Sidomulyo Barat dekat damai langgeng. Tiap hari itu pasti ada yang melapor ke bhabinkamtibmas tu. Kadang-kadang tu kucingnya yang hilang pun dia melapor. Pak kucingnya hilang pak, tolong pak. Nanti buat laporan. Terus pak anak kami

ndak pulang-pulang. Pak anak kami bandel pak gak mau dikasih tau. Tu lah selalu bhabinkamtibmas juga itu.”

Narasumber 2 : “Ada anaknya mengancam ibunya. Minta uang, tapi gak mau dikasih. Diancam pakai pisau. Kan kita juga. Kita arahan kita kasih artinya nasehat-nasehat. Jadi memang gitu kita bikin. Saya gak mau mak, saya gak mau masuk penjara mak. Makaya baik. Kata pak polisi, masuk penjara. Makanya dari itu. Gak mungkin juga dia masuk penjara gara-gara ini. Jangan minta duit lagi. Kalau minta duit lagi besok, masuk penjara. Kita menyadarkan. Memang kalau dipikir-pikir, kita ini non-stop berada dimasyarakat. Makanya banyak orang bilang, kenapa gak pernah di pos pak? Kita berada di masyarakat terus. Jadi artinya kita bekerja untruk masyarakat. Untuk menciptakan masyarakat itu makmur. Saya harus datang ke masyarakat. Meskipun waktu malam, harus datang saya. Banyak masyarakat merasa senang, merasa puas.”

Narasumber 1 : “Nah kayak gini ni, ditelpon pak ada permasalahan, langsung kita datang.”

Peneliti : “Jadi lebih dekat juga ya pak dengan kepolisian?”

Narasumber 1 : “Jadi masyarakat itu lebih dekatnya sama bhabinkamtibmas. Jadi kalau ada apa-apa itu lapornya ke binkamtibmas. Ada acara dirumahnya, laporan sama bhabinkamtibmas.”

Narasumber 2 : “Polisi itu adalah ujung tombak. Banyak masalah di RT RW, gak selesai ya kita juga yang selesaikan.”

Narasumber 1 : “Karena yang dikantor ini belum tentu dekat dengan masyarakatnya. Kalau bhabinkamtibmas ni dia RT RW nya pasti kenal, ini pak bhabinkamtibmas kita loh, kalau ada apa-apa lapor ke pak bhabinkamtibmas, curhatnya sama pak bhabinkamtibmas, minta pendapat sama pak bhabinkamtibmas. Kadang-kadang masalah pagar memagar rumah, ribut, gak selesai, bhabinkamtibmas yang datang.”

Peneliti : “Disini ada yang namanya FKPM ya pak. Apakah FKPM dibentuk oleh warganya sendiri atau polisi?”

Narasumber 1 : “Iya ada. FKPM itu kan singkat dari Forum Kemitraan Polisi Masyarakat. FKPM itu dibentuk oleh polisi. Tapi itu bekerjasama dengan camat, lurah. Dari kita ambil masing-masing dari per RT atau per RW kadang-kadang. Karena yang kenal dengan warganya sendirikan RT RWnya sendiri. Kalau kami gak terlalu kenal. Ya taunya dia yang dituakan. Kalau ada permasalahan dia duluan turun, baru bersama bhabinkamtibmas. FKPM itu yang bagus sebenarnya di daerah rumahnya adek di Tangkerang Tengah. Nanti saya kasih nomor Pak

Suherman ketua RW 9. Itu FKPM terbaik sekarang tu di tangkerang Tengah. Nanti Bhabinkamtibmasnya Pak Marwan. Kantor lurahnya deket puskesmas tu. Nanti bisa tanya sama pak lurahnya Pak Adi. Saya dulu bhabin situ. Saya dulu bentuk FKPM. Cuman karena rumah saya disini, saya pindah ke sini. Pak Marwan yang pindah kesana, rumah Pak Marwan nya disitu. Jadi kami di *change*. Jadi bhabinkamtibmas tu ditempatkan sesuai dengan tempat tinggalnya. Jadi supaya ada kontak apa, dia langsung datang. Gak mungkin rumahnya di Palas dia dinas di Tampan. Pak Lingga rumahnya di Sidomulyo Barat. Saya rumahnya di Simpang Baru. Bhabinkamtibmas itu rata-rata polisi yang ada tinggal di masyarakat sekitarnya.

Narasumber 2 : “Jadi bhabinkamtibmas ini berperan segala masalah. Kalau tidak yang masuk penjara banyak. Jadi itulah yang namanya *problem solving*. Tujuannya adalah agak tidak sampai terjatuh dengan hukum.”

Narasumber 1 : “Satu lagi itu kegiatannya *problem solving*. *Problem solving* ini penyelesaian masalah. Jadi saat kami datang ke masyarakat itu kami selalu meninggalkan kartu nama. Jadi pak kalau ada permasalahan, nanti hubungi nomor ini, emailnya juga ada. Kalau polisi-polisi yang muda-muda kan ada *email* dah bisa *instagram*, kadang *youtube* ada *channel* semuanya kan.”

Peneliti : “Kalau untuk pengaduan *problem solving* yang ada di masyarakat itu apakah harus melalui ketua FKPM atau boleh langsung ke bhabinkamtibmas?”

Narasumber 1 : “Jadi gini FKPM itu kan polisinya masyarakat dalam tugas terbatas. Maksudnya dia gak boleh nangkap orang nahan orang, cuman untuk menyelesaikan dalam upaya tu perdamaian. FKPM itu bisa lapor ke sana dulu atau melapor ke RT. Antar 2 itu aja. Itu *inputnya*. *Outputnya* lapor ke bhabinkamtibmas kalau dia gak bisa menyelesaikan. Pak ini ada orang mesum tangkap nih, gak bisa kami apakan karena masyarakat ribut, kami apakan juga dia. Kami juga yang datang kesana.”

Peneliti : “Tapi kalau langsung mengadu ke bhabinkamtibmas juga gak papa ya pak?”

Narasumber 1 : “Boleh. Sama aja gak papa-papa. Nanti kami turunnya bersama-sama dengan FKPM juga.”

Peneliti : “Selama bapak melaksanakan tugas, pernahkah bapak minta tolong ke bhabinkamtibmas lainnya untuk membantu menyelesaikan masalah?”

Narasumber 1 : “Itu namanya koordinasi. Contohnya dilingkungan Pak Lingga ada permasalahan pembangunan tembok antara rumah kelaster dan rumah biasa. Jadi rumah kelaster 1 tempat masuk keluar. Tapi karena gak ada masjid, diboongkarlah kelaster. Orang sebelah ribut. Ini kelaste bukan masjid dia. Karena

ibaranya Pak Lingga gak sanggup sendiri, kami langsung dukung Pak Lingga. Kami sama-sama hadir disana. Ada kadang kala kami bersama-sama melaksanakannya.”

Narasumber 2 : “Kalau kayak gitu tu, lurah aja gak mampu.”

Narasumber 1 : “Biasanya kalau kayak gini ni, lurah udah gak sanggup lagi. Kalau polisi yang menyelesaikan masalah kan perspektifnya masalah hukum. Ketika ditegaskan dengan hukum orang lebih takut. Ya gak? Kalau hukum sosial orang gak takut. Kalau hukum pidana orang bakal fikir 2 kali nanti. Kalau hukum perdata gak takut. Bayar bayar aja lah. Tapi kalau dibentur dengan hukum pidana di tanya orang maka takut.”

Narasumber 1 : “Bhabinkamtibmas ini memegang 4 ranah fungsi. Pertama Itu Lalu Lintas, Reserse, Sabhara, Intel. Itu kan ada fungsinya masing-masing. Saat kami berpakaian dinas, ada lalu lintas macet, kami jadi satlantas. Saat kami menyelesaikan permasalahan, kami jadi anggota reserse, *problem solving* itu. Saat ada kegiatan masyarakat untuk menginfokan ke pemimpin kita, jadi anggota intelegen untuk melakukan penyelidikan. Saat ada kegiatan konser atau kegiatan masyarakat yang membutuhkan keamanan, kami jadi anggota sabhara. Tapi kami tetap di bhabinkamtibmas, menjalani fungsi kebinmasan.

Peneliti : “Cara menanggulangi premanisme di pasar bagaimana pak?”

Narasumber 1 : “Kami melakukan razia. Kadang-kadang kita sambang. Kita intip dari jauh. Kadang-kadang ada orang yang minta-minta tu, rupanya dikumpulin sama orang untuk sengaja diminta-minta anak-anak tu kan. Kami datang. Liat rumahnya, kami datangin. Pak ini bapak bisa kena eksploitasi anak. Kalau orang udah dihadapkan dengan ancaman pidana orang bakalan takut. Kalau ngomong sanksi sosial pak, dosa pak, orang tak takut dosa sekarang. Langsung *to the point* aja masuk penjara.

## **b. Sumber Daya**

Peneliti : “Dulukan bapak megang 1 kelurahan, sekarang 3 kelurahan. Menurut bapak, bapak menjalankan tugas apakah efektif? Karena memang melihat dengan kondisi masyarakat sekarang.”

Narasumber 1 : “Sebenarnya kalau efektif tidak efektifnya itu, pasti gak efektif kan. Contohnya biasanya kita di kelurahan tu kegiatan kita ikuti 1. Musrembang 1. Sekarang musrembang kita ikuti, 3 kelurahan. Musrembang tau gak?”

Peneliti : “Gak tau pak”.

Narasumber 1 : “Musyawarah Perencanaan Pengembangan Kelurahan. Misalnya kita mau bangun ini mau bangun itu, nanti ada kegiatan MTQ tiga-tiganya, tiga-tiganya kita datangi. Wajib kita datangi. Nanti kalau ada gotong royong disini kelurahan ini nanti kelurahannya ini bentrok harinya kan gak efektif kan. Cuma 2018 inilah mungkin ada penambahan.

Narasumber 2 : “Tugas daripada bhabinkamtibmas sebenarnya mulia. Tidak mengharapkan apa-apa, yang penting mereka aman sentosa. Rasa bangga itu ada pada mereka. Kalau ada kejadian tolong hubungi, jangan segan-segan. 24 jam kami sedia. Yang penting tujuan kita baik, niat kita baik. Kami juga dikasih fasilitas oleh negara. Jadi harus seimbanglah. Jangan hanya dipakai tapi tak difungsikan, itu namanya berdosa.”

Narasumber 1 : “Seharusnya tu 1 kelurahan 1 bhabinkamtibmas, karena sekarang ada pemekaran kelurahan jadi, masih. Dulu tu kelurahannya 1 sekarang 3 karena anggarannya belum ada, berarti masih tetap. Mungkin di 2018 ini, ada bhabinkamtibmas baru. Jumlah penduduk kita itu 40.000 orang. Tampan ini jumlah penduduknya itu 200.000 orang.”

Peneliti : “Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam melaksanakan tugas bhabinkamtibmas apa pak?”

Narasumber 1 : “Penghambatnya tu gini bhabinkamtibmas masih banyak kegiatannya tu yang rangkap dia. Misalnya saat kita melayani masyarakat, kita juga dikenakan untuk pam demo. Bhabinkamtibmas ini seharusnya selalu ada di masyarakatnya. Ibarat kalau apa-apa sat masyarakat perlukan kita bisa datengi orang tu. Itu masalah, terus tugas rangkap lagi tu.”

Peneliti : “Penghambat yang lainnya ada pak?”

Narasumber 1 : “Kalau penghambatnya ni yang lain, sepertinya itu aja sih. Utamanya itu aja. Kalau sekarang itu ya masih ada kegiatan yang merangkap kegiatannya. Seharusnya yang namanya polisi masyarakat itu kan ya berarti di masyarakat aja kegiatannya. Kegiatan demo, kegiatan yang lain. misalnya di depan UNRI mau demo mahasiswa, masih dilibatkan. Ada yang permasalahannya kayak gitu yang menurut kami ya.

Peneliti : “Kalau pendukungnya apa aja?”

Narasumber 1 : “Kalau sekarang tu bhabinkamtibmas itu udah diberikan anggaran yang lebih untuk operasionalnya. Itulah bentuk dukungan dari pemerintah kepada bhabinkamtibmas ya. Kami kan di kasih 1.100.000. lumayan lah. Kalau dulu tu

900.000 aja perbulannya. Nanti kadang-kadang kita bantu ke masyarakat tu, beli bola voly, alat poskamling, dan lain-lain kita bantu dia disitu.”

Narasumber 2 : “Setiap poskamling juga membutuhkan senter, jas hujan.”

Narasumber 1 : “Jadi bentuk dukungan kami, jadi masyarakat itu harus jadi polisi bagi dirinya sendiri. Itulah kami terapkan. Keamanan tu ya sebenarnya kita sendiri yang ciptakan. Kek mana kalau misalnya rumah dah aman sendiri dianya gak mau jaga, nanti maling terus lah disitu polisi juga. Tapi kami upayakan dia jadi polisi bagi dirinya sendiri. Kami galakkan poskamling itu. Sampai ada poskamling kami dapat juara 3 ni kami bina lah. Tapi kami sekali setahun kami adakan perlombaan poskamling kepada masyarakat.”

Peneliti : “Setiap bhabinkamtibmas memang diharuskan punya kartu nama ini pak?”

Narasumber 1 : “Iya harus. Itulah gunanya kartu nama. Kalau ada apa-apa bisa langsung lapor ke situ. Dibalik kartu nama itu kan juga ada himbauannya. Kalau ada permasalahan nuk ini loh gak perlu ke polsek, langsung hubungi saya.”

Peneliti : “Untuk menjadi anggota bhabinkamtibmas itu kriterianya apa aja pak?”

Narasumber 1 : “Bhabinkamtibmas itu rata-rata polisi yang udah lama berdinis, yang udah punya pengalaman. Kalau sekarang ini pak Lingga, udah berapa tahun Pak Lingga?”

Narasumber 2 : “Dari 2004 sampai sekarang.”

Narasumber 1 : “Pak Lingga ini tinggal 2 tahun lagi pensiunnya. Dari polisi, akhirnya jadi polisi bhabinkamtibmas. Kriterianya itu yang diutamakan adalah mantan-mantan anggota reserse, karena mereka itu ada kriteria itu untuk menyelesaikan permasalahan. Contohnya itu dia lebih paham UU, KUHP dan juga KHU. Sekarang lagi digalakkan seperti itu. Dan bhabinkamtibmas ini mengurangi jumlah laporan yang masuk ke polsek. Dulu laporan polisi itu sampai 1.500, sekarang tu di bawah 1.000 karena ada bhabinkamtibmas ini diarahkan ke bhabinkamtibmas dulu untuk diselesaikan. Kalau lapor polisi, berapa anggaran yang dihabiskannya. 1 lapor polisi itu biaya penyelidikannya 6 juta loh dek. Ada sampai 3 juga tergantung perkara berat, ringan, dan sangat berat. Bhabinkamtibmas cuman dengan dana yang 1.100.000 ni digunakan untuk *problem solving*, menyelesaikan masalah orang.”

Peneliti : “Untuk masa jabatan bhabinkamtibmas itu berapa tahun pak?”

Narasumber 1 : “Bhabinkamtibmas itu tidak ada masa jabatannya. Ibaratnya masih didedikasikan, masih punya semangat, karena polisi itu gak semua orang bisa

menjadi bhabinkamtibmas. Intinya bhabinkamtibmas itu pandai bermasyarakat. Polisi itu kan ada orangnya yg suka emosi. Kan ada tu psikologi orang berbeda-beda. Ada hobinya suka marah-marah. Dikit-dikit masyarakat dimarahin. Gak bisa kayak gitu. Polisi yang bhabinkamtibmas ini polisi yang bermasyarakat. Pandai dia mendekat diri dengan masyarakat. Terus gak semuanya bisa ngomong didepan orang. *Public speaking* nya harus pandai. Kalau kayak saya inilah gak bisa ngomong, awalnya gemeteran, karena terbiasa itulah bisa.”

Peneliti : “Untuk sumber daya yang dibutuhkan selama bekerja apa aja pak?”

Narasumber 1 : “Kalau SDM ya palingan dari Anggota Polri aja sih.”

### **c. Struktur Birokrasi**

Peneliti : “Bhabinkamtibmas kan diatur oleh UU pak. Bagaimana jika ada salah satu bhabinkamtibmas di polsek ini yang melanggar UU?”

Narasumber 1 : “Kalau UU nya tetap mengacu pada UU RI No. 02 Tahun 2002. Kalau melanggar UU, tetap jatuhnya sama dengan melanggar UU. Jadi sanksinya disiplin dan kode etik polisi.”

Peneliti : “Kalau untuk pelatihan yang diberikan kepada bhabinkamtibmas sebelum terjun ke lapangan apa aja pak?”

Narasumber 1 : “Sebelum jadi bhabinkamtibmas ada pelatihan yang dilaksanakan di Hotel Furaya, diadakan oleh Polresta Pekanbaru. Pertiga bulan, kadang-kadang setahun sekali kami ikut lagi pelatihan di SPN. Kalau sampai juga ke tingkat yang lebih atasnya lagi, di dikjur di apa Di Banyu Biru Semarang. Kalau di Banyu Biru itu 2 bulan kalau gak salah.”

Peneliti : “Itu setiap bhabinkamtibmas atau bagaimana pak?”

Narasumber 1 : “Biasanya itu pemilihan dari Polda Riau. Diseleksi lagi tu kalau disitu. Tahun kemaren dari polresta 2 orang yang ikut. Itu Pak Ilham. Bhabinkamtibmas terbaik di Polresta Pekanbaru itu Pak Ilham. Dia jago berinovasi. Dia dapat juara 1 dari Polda Riau.”

## **5. WAWANCARA POLSEK TENAYAN RAYA (bagian A)**

Narasumber 1 : Bripka Zalman Harefa (Bhabinkamtibmas Kelurahan Rejosari, Bambu Kuning, dan Sialang Sakti)

Narasumber 2 : Aiptu Hemamalini (Panit I Binmas Polsek Tenayan Raya)

Narasumber 3 : Aiptu Indra Gunawan (Bhabinkamtibmas Kelurahan Tuah Negeri, KIT, Becah Lesung, dan Melebung)

Waktu Wawancara : 22 November 2017

### **a. Komunikasi**

Peneliti : “Bapak bhabinkamtibmas di daerah mana ya pak?”

Narasumber 1 : “Saya bhabinkamtibmas di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya. Tapi semenjak Kelurahan atau Kecamatan Tenayan Raya dimekarkan, jadi 13 kelurahan.

Peneliti : “Awalnya berapa pak?”

Narasumber 1 : “Awalnya 4 kelurahan.”

Peneliti : “Berarti sama di daerah Kecamatan Tampan ya pak?”

Narasumber 1 : “Iya di Tampan. Awalnya 4 kelurahan dan 4 bhabinkamtibmas. Nah sekarang sudah menjadi 13 kelurahan. Sedangkan anggota bhabinkamtibmas masih 4. Jadi masing-masing bhabinkamtibmas ada yang 4 ada yang 3. Kalau macam saya sendiri, saya 3 kelurahan. Tapi saya memegang yang induknya aja yang Kelurahan Rejosari.”

Peneliti : “Kalau yang lainnya?”

Narasumber 1 : “Yang lainnya bambu kuning dengan sialang sakti saya juga yang memegang. Karena adanya pemekaran itu.”

Narasumber 2 : “Tadinya kita memang 4 kelurahan dimekarkan jadilah 13 kelurahan. Sementara bhabinkamtibmas yang dibutuhkan disini belum cukup dan dananya pun belum ada anggaran belum ada, jadi kepegang lah setiap orang ada yang 3 keurahan ada yang 4 kelurahan, menjelang bhabinkamtibmas nya nanti ada.”

Peneliti : “Aktivitas bhabinkamtibmas secara umum seperti apa pak?”

Narasumber 1 : “Kalau aktivitas bhabinkamtibmas ini dia pada umumnya melekat di kelurahan.”

Peneliti : “*Staynya* di kelurahan?”

Narasumber 1 : “*Staynya* di kelurahan bisa. Seharusnya di kelurahan. Kebetulan saya ada pos di simpang BPG dan saya *staynya* di situ di pos BPG. Dan kadang-kadang saya main di kelurahan.”

Peneliti : “Program kerjanya apa aja pak?”

Narasumber 1 : “Kalau program kerja bhabinkamtibmas ini tentunya dia melekat ke masyarakat. Programnya ini seperti penyelesain di kelurahan. Seperti ada masalah misalnya di kelurahan itu, antar tetangga gitu kan masalah tanah. Tapi kita hanya sebatas memediasi. Kalau emang mediasi kita sama sekali tidak ee permasalahannya itu tidak selesai, saya bisa mengajukan untuk dilanjutkan ke penyelidikan. Saya hanya memediasi aja gitu.”

Narasumber 2 : “Siapa tau mungkin dimediasi mereka tidak puas, oh saya kurang puas oh ya silahkan, tidak ada larangan, tidak ada apa sama kita iya silahkan kalau memang dia tidak puas.”

Peneliti : “Di Kelurahan Rejosari ada yang namanya FKPM ya pak ya. Nah itu dibentuk oleh masyarakatnya sendiri atau memang dari polisinya juga tapi membutuhkan tangan dari masyarakatnya juga?”

Narasumber 1 : “Kalau FKPM ini dibentuk kita sendiri bhabinkamtibmas. Kita meminta sukarelawan dari kelurahan. Kita jelasin dulu FKPM ini apa gitu kan, karena pada dasarnya FKPM itu tidak digaji. Kita sama-sama dengan FKPM menyelesaikan masalah begitu.”

Narasumber 2 : “Samalah dengan ini perpanjangan tanggal. Jadi kita mempolisikan masyarakat itu. Jadi kalau kayak tugasnya bhabinkamtibmas ini itulah membina orang itu. Kalau misalkan bisa diselesaikan oleh FKPM, beliau ini sebagai apa aja, karena saksi kayak apa gitu. Cuma tidak digaji.”

Peneliti : “Untuk prosedur permasalahan ada namanya *problem solving*, apakah masyarakat harus melalui ketua FKPM/ ketua pemuda atau memang boleh langsung ke bhabinkamtibmasnya?”

Narasumber 1 : “Boleh langsung ke bhabinkamtibmasnya boleh. Nanti kita undang dulu kan misalnya yang punya masalah kita undang dulu, kita denger permasalahannya apa, kita bisa menyelesaikannya disitu secara mediasi kita selesaikan. Itu tidak perlu menunggu-menunggu dari FKPM. Dan FKPM biasanya akan melapor juga ke bhabinkamtibmas dulu. Dilibatkan. Pasti dilibatkan. Seperti itu.”

## **b. Sumber Daya**

Peneliti : “Untuk penempatan 1 bhabinkamtibmas 1 kelurahan itu, apakah efektif pak?”

Narasumber 1 : “Kalau 1 bhabinkamtibmas 1 kelurahan itu efektif.”

Peneliti : “Selesai tidak permasalahan masyarakat seperti itu?”

Narasumber 1 : “Itu selama saya, ada yang selesai ada yang tidak selesai. Ibaratnya kalau tidak selesai ini dia tidak puas gitu.”

Peneliti : “Masyarakatnya tidak puas?”

Narasumber 1 : “Masyarakatnya tidak puas dengan keputusan. Kalau kita kan manusia, tidak bisa mengambil keputusan dengan arif dan bijaksana kan begitu.”

Narasumber 2 : “Dan sebagiankan ada juga masyarakat mungkin pengennya dia yang kamu mediasi ah saya pengen dia dipenjara aja pak, dari situlah ya. Kita mah berusaha untuk memediasi ambil jalan yang terbaik secara kekeluargaan. Oke kalau memang dia ini ya udah silahkan hukum aja lagikan.”

Peneliti : “Permasalahan apa yang memang mesti bisa dimediasi dan memang ada yang tidak bisa dimediasi?”

Narasumber 1 : “Semua permasalahan itu kalau saya pribadi ya, semua permasalahan itu bisa semua dimediasi.”

Peneliti : “Contoh permasalahannya yang pernah bapak alami dilingkungan bapak?”

Narasumber 1 : “Kalau saya ya Insha Allah tidak pernah juga sampe tidak selesai. Selesai semua saya. Tapi kadang-kadang agak yang rumit ini, menyelesaikan orang yang bermasalah tanah. Jadi masalah tanah ini, saya juga undang orang kelurahan. Ha ini kadang-kadang yang kurang puas. Dan sampe ke laporan sana ke tingkat yang lebih tinggi masalah tanah gitu.”

Peneliti : “Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bhabinkamtibmas apa aja pak?”

Narasumber 1 : “Faktor pendukung... anggaran pertama, karena kita menggunakan kendaraan dinas.”

Peneliti : “Disini bhabinkamtibmasnya semua menggunakan kendaraan dinas?”

Narasumber 1 : “Iya semua.”

Narasumber 3 : “Faktor pendukungnya itu tadi kendaraan, BBM nya juga dikasih.”

Peneliti : “Pengaruhnya?”

Narasumber 1 : “Kalau pengaruhnya kita ini kalau dibilang anggarannya kurang sebenarnya, tapi faktornya sebenarnya kita bekerja ini tanpa pandang jam kerja. Kadang jam 4 subuh, kadang jam 5, dan kita harus pergi. Kendalanya kendala waktu.”

Narasumber 3 : “24 jam non stop. Kalau ada yang butuh silahkan. Jam berapa aja gak mikir. 24 jam ontime kita.”

Peneliti : “Kalau pemilihan anggota polisi untuk menjadi anggota bhabinkamtibmas itu apa aja pak? Ada kriteria khusus gak pak?”

Narasumber 1 : “Kriteria khusus, dia harus menguasai 5 bidang fungsi. Terutama bidang binmas, bidang serse, bidang lantas, bidang intel. Semua harus dikuasai. Itulah dia.”

Narasumber 3 : “Pangkatnya gimana? Kalau pangkatnya pimpinan yang ambil. Perwira ada. Tapi biasanya kalau bintara baru bripta briptu, itu gak bisa.”

Peneliti : “Tapi kalau brigadir katanya kebanyakan brigadir gitu?”

Narasumber 1 : “Iya itu masa dinasnya 10-19 tahun itu. Udah 3 pangkatnya. Sekarang udah 5 tahun baru bisa naik pangkat. Nyampai brigadir itu kalau gak ada masalah. Tapi pada umumnya yang namanya polisi, dia harus mengemban tugas bhabinkamtibmas. Karena polisi itu ya harus bisa ke lantas bisa, serse bisa, intel bisa, apalagi binmas sendiri. Kalau bhabinkamtibmas itu khusus lah buat orangnya. Kerjanya istilahnya pokok orang ini ya ke masyarakat. Apa permasalahan masyarakat.”

Peneliti : “Sumber daya yang dibutuhkan oleh bhabinkamtibmas apa aja pak?”

Narasumber 1 : “Kalau sumber dayanya ini kalau kita katakan 100% partisipasi masyarakat, ndak juga. Kadang yang itu yang kita tolong ya itu yang pro dengan kita, dan yang tidak puas tidak pro dengan kita gitu. Ibaratnya seperti itu. Tapi ya selama saya di rejosari saya belum pernah juga merasakan ada keluhan dari masyarakat. Ketidakpuasan gitu. Ya mudah-mudahan Insha Allah malah saya dirindukan oleh masyarakat itu. Kenapa sih ga main ke sini lagi. Datang lah ke rumah gitu kan bagi orang yang pernah kita selesaikan masalahnya dan mereka puas dengan pelayanan kita.”

Peneliti : “Untuk masa jabatannya berapa tahun?”

Narasumber 1 : “Untuk masa jabatannya gak ditentukan. Bisa sampe mau pensiun bisa sampe 58 tahun. Itu dari 0 tahun masuk polisi sampe umur 58 tahun.”

### c. Struktur Birokrasi

Peneliti : “Bhabinkamtibmas itu kan diatur oleh UU. Apakah dan bagaimana jika salah satu bhabinkamtibmas yang ada di Polsek Tenayan Raya, melanggar dari UU tersebut?”

Narasumber 1 : “Konsekuensinya tidak di bhabinkamtibmas lagi. Yang jelas dimutasi dia.”

Narasumber 3 : “Kita itu kan panutan sebenarnya. Panutan masyarakat. Kalau kita gak bisa jadi panutan, buat apa kita jadi bhabinkamtibmas gitu. Yang menentukan itu masyarakat sebenarnya. Yang menilai masyarakat, bukan pimpinan. Kalau pimpinan bilang gak bagus masyarakatnya bilang bagus,, bisa dipertahankan. Cuma jelas kalau kami tu bermasyarakat dalam menyelesaikan masalah tidak boleh berpihak. Itu aja. Kita tidak boleh berpihak. Kita kasih pandangan. Kalau berpihak pasti udah dikecewakan.

Peneliti : “Pelatihan khusus yang bapak rasakan sebelum menjadi anggota bhabinkamtibmas dan setelah menjadi anggota bhabinkamtibmas apa aja?”

Narasumber 1 : “Sebelum jadi bhabinkamtibmas kebetulan pelatihan-pelatihan umum. Setelah jadi bhabinkamtibmas, pelatihan kayak *pilot project*. Saya pernah ke bekasi. Waktu itu pelatihan peningkatan bhabinkamtibmas. Karena kebetulan kita tenayan raya ini dengan bukit raya jadi *pilot project*. Percontohan. Polisi jepang itu ke Riau, ke tenayan raya.

## 6. WAWANCARA POLSEK TENAYAN RAYA (bagian B)

Narasumber 1 : Bripka S. Bagus Kuncoro (Bhabinkamtibmas Kelurahan Tangkerang Timur, Pematang Kapau, dan Mentangor)

Narasumber 2 : Aiptu Hemamalini (Panit I Binmas Polsek Tenayan Raya)

Waktu Wawancara: 22 November 2017

### a. Komunikasi

Peneliti : “Bapak bhabinkamtibmas di daerah mana ya pak?”

Narasumber 1 : “Daerah tangkerang timur. Polsek Tenayan Raya.”

Narasumber 2 : “Ini dia tin (menunjuk nama pak bagus). Dia memegang 3 kelurahan tin. Kalau Zalman tadi memegang 3 kelurahan juga.”

Narasumber 1 : “Itu menyalahi. Seharusnya 1 bhabinkamtibmas makanya program ndak akan sesuai. Harusnya 1 bhabinkamtibmas 1 kelurahan. Tapi karena kita kekurangan personil, ya kita harus memegang 3 kelurahan. Sebenarnya itu salah tidak sesuai SOP. Mengapa saya katakan? Karena apa nanti tujuan dari maksud kerja kita tidak sampe.

Peneliti : “Bagaimana aktivitas bhabinkamtibmas secara umum menurut bapak?”

Narasumber 1 : “Aktivitas bhabinkamtibmas itu tidak ada yang khusus. Semua dilaksanakan. Kerjanya kan sehari-hari turun ada di masyarakat. Kita sebagai perwakilan negara yang ada di tengah masyarakat. Nah itulah kami. Dalam artian kami bisa aja kadang ikut gotong royong, kadang ikut ngobrol, kadang ikut ibu-ibu ngerumpi, nah itu memang tujuannya bhabinkamtibmas itu. Kerjanya yang sebenarnya itu. Dari situ kita bertujuannya apa? Memang yang pertama terjalin kedekatan antara polisi dengan masyarakat. Yang memisahkan polisi sama masyarakat apa selama ini? Misalkan apa? Jarak. Selama ini dengan kalau sekarang orang kasih paparan atau materi. Itu yang tidak boleh. Pemateri duduk diatas, pendengar duduk di bawah. Itu ada jarak.

Peneliti : “Jadi harus seimbang gitu ya pak?”

Narasumber 1 : “Kalau di kita di agama kita yang kalau orang ceramah, duduk ditengah asal dia nampak aja. Kalau duduk di tempat tinggi berarti kedudukannya lebih tinggi dari yang ada di bawah. Itu tidak boleh sebenarnya. Tidak boleh. Karena makanya dari situlah tercipta arogan. Weh kamu nunjuk ini ini ini. Kalau setara tidak. Makanya bhabinkamtibmas ini tugas kesehariannya ada di masyarakatnya itu. Antara pemisah masyarakat dan polisi tidak ada. Dulu aja nampak polisi, kayak mbak titin lah ya punya anak gak mau makan nampak polisi, hayo kalau gak makan ditangkap polisi, macam gitu kan. Pak polisi ini tangkap gak mau makan. Itu *mindset* masyarakat yang turun temurun yang kita coba rubah. Makanya kok ada pesta kok ada polisi, bhabinkamtibmas itu lah kita dekat. Ada orang yang meninggal kemalangan ulang tahun. Semua laporan masuk ke bhabinkamtibmas. Kalau saya kategorikan, kita itu udah masuk manusia yang sudah kerjanya sudah masuk. Orang yang nyuri lapor ke kita. Orang bertengkar lapor ke kita. Kita nangani. Orang kehilangan motor kehilangan dompet, pokoknya kehilangan. Yang kucingnya hilang lapor polisi. Kambingnya hilang lapor polisi. Ada hantu pun lapor polisi.”

Peneliti : “Di daerah mana pak?”

Narasumber 1 : “Ada di Daerah Kapau Sari. Ada orang telpon pak kami diteror. Kami diteror 3 malam ini pak diteror kuntilanak pak. Cuma kita kan ya itu gimana masyarakat ni gak perlu lapor pak kayak titin pak saya sendirian di rumah pak ada yang mencurigakan. Sebenarnya yang diharapkan titin itu di telpon adalah kecepatan polisi ke tempat titin biar merasa tenang. Mau merapok mau ketangkap terserahlah. Itu lah kecepatan. *Quick* respon kita. Tapi karena sekarang jamannya pencitraan, manusia lebih mencitrakan dirinya ke manusia ke pimpinannya, tidak mau mencitrakan ke atas. Ada yang kerja hanya untuk pimpinan menyenangkan pimpinan, ada yang kerja memang ikhlas. Masak kita mau nolong orang ini kita kasih duit dia ini ini foto krek krek kirim, tulis membantu janda kelaparan. Orang kita membantu tapi si yang kita bantu kita jelek-jelekan, dia tidak bisa menyekolahkan anaknya, dia tidak bisa makan sehari-hari, biaya hidupnya segini, kita kan menjelekan. Itu gak boleh. Kalau kita bantu bantu. Lillahita’ala. Yang tau saya sama yang di atas, kiri kanan malaikat. Itu aja.

Peneliti : “Berarti kalau kita laporan ke pimpinan kita membantu ini dah selesai?”

Narasumber 1 : “Boleh tulis misal kita membantu jumat barokah membantu kaum janda-janda ini dah. Bukan ini ini ini ini. Itulah namanya dilema kita. Seperti itulah sekarang.”

Peneliti : “Kalau untuk program kerja rutinnya apa aja pak?”

Narasumber 1 : “Kerja rutinnya kita wajib satu hari itu mendatangi warga. Dalam artian boleh kita ketemu di rumahnya, boleh ketemu di jalan. Itu aja.”

Peneliti : “Kalau untuk FKPM didaerah bapak itu pembentukannya itu memang dari bapak sendiri atau bapak membantu FKPM tersebut dan didukung oleh masyarakatnya juga?”

Narasumber 1 : “Saya cerita sebenarnya tanpa rekayasa. Dari sesuai prosedurnya FKPM itu harus dibentuk oleh masyarakat. Kita cuma memberikan support. Tapi di jaman sekarang, tidak bisa di paksa. Terpaksa kita yang membentuk dan kita dorong. Kalau gak kita bentuk susah. Budaya gootong royong aja sekarang udah susah. Kalau dikatakan FKPM secara prosedurnya harus terbentuk sendiri, tapi dalam pengamatan saya, kita yang merancang. Berawal dari polisi. Nah ini pak karena kita ada ini ini ini ya yok. Tapi disitu kelemahannya kita bentuk ini loh FKPM. Fungsinya ini tugasnya ini. Menang slogan aja.”

Peneliti : “Kalau untuk prosedur pengaduan itu misalnya di masyarakat adanya pengaduan *problem solving*, apakah itu harus ke ketua FKPM atau ketua pemuda ataupun bisa langsung ke bhabinkamtibmasnya?”

Narasumber 1 : “*Problem solving* itu salah satu tugas kita. Tugas utama bhabinkamtibmas itu satu kunjungan, dua *problem solving*. Karena pada kunjungan itu akan ada terima permasalahan dari masyarakat. Kita berkunjung ke rumah adek. Pasti ini pak ini pak. Akan ada curhat. Curhat itu *problem solving* kayak saya misalkan ada orang pak perpanjang SIM hari apa ya pak? Mana tempatnya pak. Oh tempatnya disitu. Dimana pak. Itu dijalan ini. Saya ada *problem solving*. Bukan dalam hanya bidangnya aja. Kesalahan orang-orang yang baru muncul di polres ya itu. *Problem solving* sesungguhnya ada kayu tumbang kita pindahkan itu *problem solving*. Yang ada dimasyarakat yang dirasakan masyarakat. Tapi sekarang kayu tumbang, foto dulu foto biar rame krek. Kalau kita gak kerja itu dia sekarang. *Problem solving* bukan hanya pidana aja. Ditelpon aja ini saya ada *problem solving* ini.

## **b. Sumber Daya**

Peneliti : “Kalau untuk penempatan 1 kelurahan 1 bhabinkamtibmas itu, apakah efektif?”

Narasumber 1 : “Kalau itu sebenarnya sangat efektif. Tapi akan lebih efektif lagi saya kaji lah saya kasih gambaran. Polisinya 1 warganya 30.000. Kalau saya 30.000 jiwa. Ya gimana. Kita pakai program prioritas. Kita pegang RT RW nya. RW nya aja kadang bosan. Ah langsung aja ke polisi gak usah ke saya. Kalau saya lebih *internnya* lebih setujunya kita jumlah 1 kelurahan berapa sih. Inikan adobsi kita adobsi Jepang. Jepang berapa. Gak ada RT RW disitu. Meskipun saya belum pernah ke Jepang, gak ada RT RW. Di Indonesia ini lah ada RT RW di Jepang gak ada. Mungkin 1 blok aja kan blok ini blok ini kamu polisinya. Kalau disini RT RW.”

Peneliti : “Harusnya ada berapa penempatannya biar efektif?”

Narasumber 1 : “Idealnya 500 warga 1 polisi itu standar PBB. Tapi kita kan anggota kurang. Tapi kalau bhabinkamtibmas ini berapapun ya asal kedekatan. Asal kita dekat. 10.000 pun kalau kita dekat ya makanya kalau saya warga saya ada 30.000 jiwa. Saya pakai program prioritas. Gak semuanya kita kenal. Jadi yang saya kenal siapa? Itu RT RW nya tokoh masyarakatnya tokoh-tokohnya itu. Kita bantu mereka yang menawarkan kita kepada warga.”

Peneliti : “Untuk faktor pendukung dan penghambat dalam bapak melaksanakan kegiatan bhabinkamtibmas apa aja pak?”

Narasumber 1 : “Kendala ya. Kalau saya pribadi gak ada hambatan. Yang namanya bekerja eskalasinya ada. Tapi kalau untuk kepentingan umum dengan tujuan utamanya

bermasyarakat. Percepatan yang dilengkapin 1 kelurahan 1 bhabinkamtibmas. Kalau kita masalah alat-alatnya perlengkapan dilapangan, saya rasa tergantung kitanya sendiri. Kalau memang niat ya udah kerja. Misalnya orang belum punya motor beli motor, belum punya mobil beli mobil. Saya tidak berpedoman dengan aturan-aturan UU, tapi saya menggunakan aturan agama di atas-Nya. Memang pondasinya ada, tapi saya apakan dengan yang di atas. Dalam agama kita, kita gak boleh muluk-muluk. Kalau kamu bisa laksanakan.”

Peneliti : “Kalau untuk pemilihan anggota polisi menjadi anggota bhabinkamtibmas itu ada kriteria khusus gak pak?”

Narasumber 1 : “Ada sih selama ini ada pernah dilakukan. Cuman perekrutan tu gimana ya. Secara silogis manusia ini kan, 1 jam aja gak bisa ditentukan. Ada dulu siapa yang mau dia berdomisili disana. Misalkan dia di Kelurahan Pematang Tapau, dia harus disana. Maksudnya biar dia lebih mengenal masyarakatnya. Cuman ya itu. Kita budayakan budaya arogan, etika, sopan santun masih kurang.

Peneliti : “Berarti kriteria khusus sampai saat ini belum ada ya pak?”

Narasumber 1 : “Kalau kata mantan kapolri Pak Badrodin Haiti, bhabinkamtibmas itu tak perlu orang yang pintar pandai, cukup orang yang sopan santun dan mengenal etika.”

Peneliti : “Masa jabatan bhabinkamtibmas?”

Narasumber 1 : “Masa jabatan bhabinkamtibmas bisa seumur hidup. Sampai pensiun.”

Peneliti : “Kalau untuk sumber daya yang bapak butuhkan dalam pelaksanaan bhabinkamtibmas apa aja pak?”

Narasumber 1 : “Ya perlunya ini sekolah-sekolah kami lebih spesialis lagi kan. Kasih sekolah. Jangan cuman penyuluhan-penyuluhan sini.”

### **c. Struktur Birokrasi**

Peneliti : “Kalau untuk bhabinkamtibmas kan diatur oleh UU. Bagaimana jika ada salah satu bhabinkamtibmas di polsek ini melanggar aturan tersebut?”

Narasumber 1 : “Kalau pemahaman setau saya tidak ada bhabinkamtibmas yang melanggar, karena kebanyakan bhabinkamtibmas ini orangnya gimana ya. Yang melanggar ada tapi sebenarnya bukan melanggar. Kita kan ada tindakan diskresi kita, kebijakan kami di lapangan ini ini. Cuman karena orang lain bukan UU ya, orang lain mengatakan itu salah karena dia ada kepentingan. Saya perjelas misalkan titin tabrakan dengan kawannya, yang salah anda, anda nuntut ini ini. Datanglah saya

menyelesaikan. Oh gak bisa. Udah kita berobat masing-masing aja. Cuman karena titin ngadu ke saudaranya, saudaranya ini punya jabatan gak terima. Padahal saya mengatakan udah kita damai aja disini itu salah satu tindakan diskresi saya. Cuman orang lain gak mau. Berarti bukan hukum yang nyalahkan bukan UU yang nyalahkan tapi orang lain yang nyalahkan yang punya jabatan.”

Peneliti : “Pelatihan khusus yang bapak rasakan sebelum menjadi anggota bhabinkamtibmas dan saat ini menjadi anggota bhabinkamtibmas itu apa aja pak?”

Narasumber 1 : “Kalau saya, saya pernah dinas di staf di lapangan.”

Peneliti : “Staf binmas?”

Narasumber 1 : “Bukan. Staf personil, personalia. Pernah dipelabuhan. Pernah di lantasi. Pernah di serse. Bhabinkamtibmas inilah yang enak, karena kita menyentuh lapangan langsung ke masyarakat. Langsung ke masyarakat kita tau.”

Peneliti : “Kalau untuk pelatihannya, pelatihan khusus gitu pak ada?”

Narasumber 1 : “Saya baru pulang maret kemaren. Dari pelatihan khusus di bongpes namanya di Semarang. Saya baru pak Ilham.”

Peneliti : “Berarti waktu itu bapak udah jadi bhabinkamtibmas ya pak?”

Narasumber 1 : “Iya udah.”

Peneliti : “Kalau sebelum menjadi bhabinkamtibmas?”

Narasumber 1 : “Sebelumnya ya di serse. Kalau pelatihan-pelatihan gitu sering di SPN sini. Banyak piagam saya pelatihan. Tapi bukan piagamnya tapi pelatihannya. Karena hasil dari sebuah pembelajaran itu bukan hanya ilmu tapi sebuah tindakan. Adek misalnya seorang dokter. Kalau seorang dokter tapi gak ada tindakannya gak ngobatin orang, itu ilmu ada tindakan gak ada. Saya belajar dari situ. Hasil dari sebuah ilmu adalah sebuah tindakan.

## 7. WAWANCARA POLSEK LIMA PULUH

Narasumber 1 : Aiptu Susetio Supriadi (Bhabinkamtibmas Kelurahan Cinta Raja)

Narasumber 2 : Brigadir Robby Yulianto (Bhabinkamtibmas Kelurahan Tanjung RHU)

Waktu Wawancara : 4 Desember 2017

### a. Komunikasi

Narasumber 1 : “Assalamu’alaikum warrohmatullohi wabbarokatuh. Kesempatan kali ini Insha Allah saya akan menjawab dengan setelitinya. Semoga berkah untuk skripsi untuk UII.”

Peneliti : “Wa’alaikumsalam warrohmatullahi wabbarokatuh. Amiiin. Bapak namanya siapa? Dan tugasnya dimana?”

Narasumber 1 : “Nama saya Susetio Supriadi. Bhabinkamtibmas Cinta Raja, Kelurahan Cinta Raja, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru.”

Peneliti : “Bagaimana aktivitas bhabinkamtibmas dalam bertugas pak?”

Narasumber1 : “Sebagai bhabinkamtibmas kami ada program namanya DDS, Door To Door System yang diwajibkan berkunjung ke rumah masyarakat minimal 4 rumah satu hari yang dimana dalam DDS itulah kita berinteraksi dengan masyarakat untuk memberikan pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat kamtibmas berupa penyuluhan, ajakan yang berhubungan dengan keamanan dan ketentraman.”

Peneliti : “Selain DDS, apa aja programnya pak?”

Narasumber 1 : “Ada program *problem solving*. Penyelesaian masalah diluar jalur hukum. Itu hanya bisa masalah-masalah kecil. Tindak pidana ringan. Misalnya anaknya masalah perkelahian, kita selesaikan antar warga dibantu oleh pemuka masyarakat setempat sebagai saksi bisa RT RW atau tokoh agama. Karena itulah gunanya bhabinkamtibmas. Karena semua persoalan dimuarakan ke proses hukum kan tentu akan apa banyak perkara yang harus dikerjakan, akhirnya kedua belah pihak akan terganggu aktivitasnya. Nanti dipanggil sebagai saksi atau tersangka, dipanggil sidangkan berulang-ulang kali. Kalau masalah kecil tu sebaiknya dimusyawarahkan ajalah misalnya mufakat supaya kayak budaya Indonesia dulukan kita gali. Sama *problem solving*, penyelesaian masalah. Suatu masalah itu tidak harus diselesaikan melalui jalur hukum. Tapi tidak semua masalah bisa di *problem solving* kan, seperti narkoba tidak, pembunuhan tidak, kayak-kayak tindak pidana ringan.”

Peneliti : “Kalau untuk FKPM dan BKPM sendiri tu di Kelurahan Cinta Raja dibentuk oleh masyarakatnya sendiri atau awal mulanya dibentuk oleh polisi?”

Narasumber 1 : “Awal mulanya ya itu keinginan dari masyarakat supaya terjalin komunikasi dan tuak badah, saling berkumpul dan bertukar pikiran, rapat sebulan sekali kan minimal. Wadah sesuatu tempat sebagai apa kantor sekretariatnya. Itulah setiap ada masalah diselesaikan disitu di balai FKPM tersebut.”

Peneliti : “Biasanya dimana pak? Di kantor lurah atau dimana?”

Narasumber 1 : “Kebanyakan di kantor lurah. Disediakan apa itu ada juga yang tidak di kantor lurah. Tergantung masyarakatnya. Ada mungkin masyarakat punya tanah kosong dipinjamkannya, gotong royong membangun kantor FKPM tersebut. Atau misalnya ada lurahnya bersedia membantu, disediakan ruangnya di kantor lurah aja juga atau dibangun disamping kantor lurah ada juga. Beda-beda tiap apa setiap kelurahan berbeda-beda. Ada yang disediakan masyarakat, ada yang disewakan masyarakat, ada yang disediakan lurah, nah itu. Ada apa ruangan kantor lurah yang dijadikan FKPM.”

Peneliti : “Kalau untuk prosedur pengaduan permasalahan atau *problem solving* masyarakat, sistemikanya itu mesti melewati ketua pemuda atau FKPM atau boleh langsung ke bhabinkamtibmasnya?”

Narasumber 1 : “Langsung ke bhabinkamtibmas atau apa melalui RT atau melalui RW atau melalui telpon ke bhabinkamtibmas. Selain program DDS tu diwajibkan membuat papan nama *door to door system* tadi yang 4 rumah 1 hari tu dan menyerahkan kartu nama tertera nomor hp kita. Jad sewaktu-waktu ita 24 jam ditelpon masyarakat, bersedia datang. Kebanyakan langsung karena udah kita kasih waktu DDS itu kartu nama tadi lengkap dengan no hp nya.”

## **b. Sumber Daya**

Peneliti : “Untuk penempatan bapak di Kelurahan Cinta Raja itu ada berapa warga disana pak?”

Narasumber 1 : “Jumlah warga 1 Kelurahan Cinta Raja 6623.”

Peneliti : “Kalau untuk penempatan bapak di Kelurahan Cinta Raja itu, bapak ngerasa ini efektif apa tidak dalam melaksana program DDS dan *problem solving*?”

Narasumber 1 : “Saya rasa efektif sekali dalam mengungkap tindak kejahatan. Ini merupakan informasi awal dari masyarakat. Pak ni ada yang kumpul-kumpul sampai tengah malam, ha kita kesana. Lalu kita suruh mereka untuk tidak mengulangnya lagi

dan bubar. Karena kumpul-kumpul inikan bisa pakai narkoba lah dia, bisa miras, atau suatu kegiatan preman-preman kumpul-kumpul di simpang-simpang ganggu orang lewat, ditelponnya juga kita. Dan juga selain DDS, kita juga berfungsi sebagai patroli. Masuk ke gang-gang, pelosok-pelosok. Itulah pak udah puluhan tahun kami tinggal disini belum pernah ada polisi yang masuk sini. Bersyukur sekali ada bapak yang masuk sini. Jangankan kerumah pak, masuk gang aja polisi gak mau patrol pak. Jadi berperan ganda DDS tu selain berkunjung ke rumah silaturahmi, menyampaikan informasi, kita juga sebagai patroli.”

Peneliti : “Berarti dengan penduduknya bapak 6.000 lebih, bapak 1 polisi bapak sendiri, bekerja efektif berarti? Dengan menyelesaikan semua perkara yang ada di masyarakat?”

Narasumber 1 : “Karena kebetulan sekali masyarakat kami ini kondusif orangnya. Masyarakatnya tentram damai. Tiap-tiap daerahkan berbeda-beda karakteristik masyarakatnya. Kalau di Indonesia Timur, mungkin gak sanggup. Ada orang yang berkelahi tiap hari. Ada orang pembunuhan. Atau di NTB sana. Kalau untuk daerah Pekanbaru yang adem ayem orang melayu yang tutur sapa sopan santun, efektif. Karakteristik kan berbeda-beda. Kalau untuk daerah apakah mungkin tidak sanggup mungkin di daerah Indonesia Timur sanakan.”

Narasumber 2 : “Kalau menurut saya, saya sih *enjoy* aja. Asalkan kita bisa memberdayakan RT RW untuk mengelola lingkungannya melalui petugas siskaming ronda. Karena bagian tugas dari kepolisian itu ada d pos ronda, diatur dalam UUD 1945, setiap warga negara berhak menjaga keamanan kamtibmas. Jadi setiap warga negara itu memang sudah dilibatkan untuk menjaga keamanan. Kita mensinergikan antara bhabinkamtibmas dan unsur-unsur yang ada dikelurahan kayak RT RW FKPM (Forum Kemitraan Polisi Masyarakat). Melalui mereka kita usahakan mereka membentuk petugas ronda agar petugas kepolisian bisa dilaksanakan dengan mereka. Karena tidak mungkin 1 polisi dia menjaga 24 jam daerah kelurahan itu. Gak mungkin. Jadi dia harus dibantu. Disitu fungsi kita pembinaan keamanan ketertiban. Kita yang membina mereka. Untuk efektif tugas di kelurahan itu sebenarnya gak perlu banyak. 1 asal bisa merangkul semua. Berjalan semua tugas bhabinkamtibmas itu.”

Peneliti : “Untuk faktor pendukung dan penghambat bapak dalam pelaksanaan tugas bhabinkamtibmas apa aja pak?”

Narasumber 1 : “Pertama ini tidak semua bhabinkamtibmas dapat sarana transportasi dinas. Anggarannya belum sesuai lagi. Ada anggaran tapi belum sesuai dengan apa kami. Karena kita keluar itu harus makan diluar. Karena kami makan pulang lagi

gak mungkin. Misal bhabinkamtibmasnya untuk tingkat yang lebih tinggi lagi lah. Kayak adik-adik lah. Itulah suara dari kami supaya pemerintah kan.”

Peneliti : “Kalau untuk pendukungnya bapak merasa *enjoy* gitu dalam melaksanakan tugas bhabinkamtibmas itu apa pak?”

Narasumber 1 : “Karena kita berinteraksi dengan masyarakat bersilaturahmi dengan masyarakat gitukan, dapat pengaduan dari masyarakat disitulah kita tau. Ya kalau kita bisa menyelesaikan kita juga merasa gembira. Masyarakat itu gembira masalahnya selesai kita bisa selesaikan suatu keberhasilan bagi kita juga.”

Peneliti : “Sumber daya yang bapak butuhkan dalam melaksanakan bhabinkamtibmas supaya efektif apa aja pak?”

Narasumber 1 : “Sumber dayanya kita ya itu lah pak RT RW, membantu kita, panjang tangan kita. Bantu dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat setempat, RT RW, karena *problem solving* permasalahan kita harus melibatkan. RT RW, tokoh agama, atau tokoh pemuda setempat. Kebetulan mereka semuanya aktif lah persuasif, mau ikut bekerjasama menjaga ketertiban masyarakat. Siapa saja yang membutuhkan mau dia ikut. Karena perlu juga masyarakat untuk menguatkan. Karena permasalahan inikan ada saksi, RT RW supaya lebih kuat.”

Peneliti : “Kalau untuk pemilihan polisi untuk menjadi anggota bhabinkamtibmas ada kriteria khususkah pak?”

Narasumber 1 : “Dia harus dapat rekomendasi dari masyarakat. Kita surat dari lurah, kalau desa dari balai desa. Dari masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, ada koordinasinya.”

Peneliti : “Itukan dari masyarakat, kalau dari kepolisian sendiri apa aja pak?”

Narasumber 1 : “Ee berupa kita dipanggil untuk wawancara. Gak mungkin lah kita tinggalnya jauh, jarak temuh kita ke situ berapa lama, kapan sampai. Kan kalau tengah malam kita dibutuhkan oleh masyarakat kan, harus bisa secepatnya kita sampai ke daerah tugas kita tu. Jadi diusahakan harus polisi yang tinggal di desa/ kelurahan tersebut yang jadi bhabinkamtibmasnya. Kalaupun tidak ada, kelurahan atau desa tetangga. Pokoknya jangan sampai kelurahan/ desa yang jauh butuh waktu lama, karena sewaktu-waktu dipanggil oleh masyarakat kan cepat sampainya.”

Peneliti : “Untuk masa jabatan bhabinkamtibmas berapa tahun pak?”

Narasumber 1 : “Tidak ada batasannya. Tergantung pimpinan. Nantikan pimpinan juga sering mengecek, menanyakan ke masyarakat, kenal bhabinkamtibmasnya, apakah aktif bhabinkamtibmasnya. Pimpinan sering kontrol ke daerah tugas bhabinkamtibmas

itu, bertanya ke masyarakat, bertanya ke tokoh pemerintahan tokoh pemuda kantor lurah kantor kepala desa bertanya apakah aktif bhabinkamtibmasnya. Bertanya ke masyarakat apakah kenal bhabinkamtibmasnya.”

Peneliti : “Berarti sampai pensiun polisi juga bisa ya pak?”

Narasumber 1 : “Ha ya. Selagi masih bagus aktif kerjanya.”

### **c. Struktur Birokrasi**

Peneliti : “Kan bhabinkamtibmas itu pak di atur oleh UU pak, bagaimana kita ada salah satu bhabinkamtibmas di Polsek Lima Puluh ini melanggar UU tersebut?”

Narasumber 2 : “Oh itukan ada propom suatu pembinaan dan pengawasan personil. Bhabinkamtibmas itu bisa diawasi. Provost kepolisian itu.”

Peneliti : “Itu dibagian binmas juga pak?”

Narasumber 2 : “Gak. itu terpisah dengan unit yang lain lagi. Tapi kalau bhabinkamtibmas itu melakukan suatu pelanggaran-pelanggaran kode etik kepolisian baik UU, diproses sesuai dengan pelanggaran dia. Kalau dia melanggar kode etik disiplin ya kode etik disiplin. Kalau dia mengarah ke kriminalitas, nanti dia ke pengadilan hukum juga ya. Sama seperti warga sipil lainnya.”

Peneliti : “Berarti ada konsekuensi tersendiri ya pak?”

Narasumber 2 : “Iya ada.”

Peneliti : “Sampai ada yang dimutasi itu kalau dia melanggar apa pak?”

Narasumber 2 : “Ee tergantung variasi dilapangan lah ya. Itu dia jadi provokator, menangani perkara masyarakat malah jadi provokator. Terlibat politik, itu bisa. Itu bisa diproses sesuai dengan kode etik disiplin kepolisian.”

Peneliti : “Kalau untuk pelatihan khusus sebelum bapak menjadi anggota babinkamtibmas dan saat ini menjadi anggota bhabinkamtibmas apa aja pak?”

Narasumber 2 : “Ada program-programnya tu pelatihan fungsi teknis. Da’I kamtibmas. Pelatihan negosiator.”

Peneliti : “Itu setelah jadi bhabinkamtibmas atau sebelum jadi bhabinkamtibmas?”

Narasumber 2 : “Setelah jadi bhabinkamtibmas. Kalau sebelum jadi bhabinkamtibmas itu gak ada. Itu berdasarkan pengalaman kerja. Fungsi bhabinkamtibmas ini kan mewakili

5 fungsi kepolisian. Dari binmasnya, dari reskrim/ serse, ada inter, ada lantasnya, ada shabara, 5 fungsi kepolisian ini pernah disebutkan oleh bang hakim yang mengemban tugas bhabinkamtibmas ini di masyarakat. Kalau ada acara-acara atau hajatan dilingkungan masyarakat, atau kayak ada pawai-pawai dikelurahan nanti yang mengawal itu kita. Proaktif di masyarakat. Itukan salah satu peranan fungsi lalu lintas. Ada juga sifatnya pos ronda, malam orang itu melaksanakan tugas keamanan keliling warga menemukan kriminalitas, tertangkap tangan kayak pencurian atau pesta-pesta shabu. Disitu kita terikat, karena melakukan upaya pendekatan hukum. Mengamankan pelaku, mengamankan barang bukti, itu salah satu tugas dan fungsi dari reserse. Kemudian yang ketiga unsur dari masyarakat. Kita dapat laporan adanya orang yang dicurigai datang seperti yang kita kenal selamanya ini ada sekumpulan teroris di pemukiman penduduk. Kita menerima informasi dan kita meneruskan ke pimpinan kita. Untuk diambil langkah-langkah hukum. Curanmor, narkoba, kita laporkan. Bhabinkamtibmas itu sebenarnya multi fungsi, bukan 1 fungsi yang ia lakukan di masyarakat itu. Semuanya berperan. Bahkan waktu tugasnya itu 24 jam dalam melayani masyarakat. Beda dengan fungsi teknis yang lain. Mungkin fungsi teknis yang lain diatur oleh sedemikian rupa, mereka diatur peregu atau perjam-jam. Tapi tidak sama dengan bhabinkamtibmas. Bhabinkamtibmas ini 24 jam dalam kata *dia on call* kapan dia dibutuhkan.”

## **8. WAWANCARA KETUA FKPM KELURAHAN TANGKERANG TENGAH**

### **Sikap Pelaksana**

Peneliti : “Menurut bapak, bagaimana aktivitas bhabinkamtibmas di wilayah Kelurahan Tangkerang Tengah?”

Narasumber : “Kalau bhabinkamtibmas di Tangkerang Tengah, inikan beliau inikan diutus oleh Polsek Bukit Raya dalam rangka menjaga kamtibmas di Tangkerang Tengah. Nah bhabinkamtibmas inikan jumlahnya luas, banyak 38.000 untuk wilayah Tangkerang Tengah ini. Kemudian ada 21 RW, 98 RT. Bhabinkamtibmas ini tidak bisa sendiri kerja di Tangkerang Tengah, maka dibentuk namanya FKPM. FKPM ini Forum Kemitraan Polisi Masyarakat. Nah itu mitra dari polisi, saya ketua umumnya. Anggota kita ada 35 orang. Setiap orang 1 RW ditentukan, tambah lagi pengurus dan pembina itu 35 orang. Nah bhabinkamtibmas setiap berkegiatan di Tangkerang Tengah, selalu bersinergi dengan FKPM. Beriringan itukan. Menyelesaikan semua kasus yang terjadi. Keamanan, ketertiban, kenyamanan, semua kasus yang menyangkut sosial masyarakat yang tipiring

(tindak pidana ringan). Jadi bersama-sama terus dengan bhabinkamtibmas. Tidak pernah pisah.”

Peneliti : “Apakah ada permasalahan yang tidak bisa ditangani oleh masyarakat?”

Narasumber : “Dia begini. Kenapa ditunjuk FKPM (Forum Kemitraan Polisi Masyarakat)? FKPM hadir ditengah-tengah masyarakat membantu bhabinkamtibmas itu untuk membantu masyarakat jangan sampai tipiring maju ke polsek. Contohnya permasalahan KDRT, perkelahian, pencurian ringan, kasus perselingkuhan, itu diselesaikan oleh FKPM. Tidak sampai ujuk-ujuk warga di tangkap polisi dikadukan.”

Peneliti : “Menurut bapak, apakah bhabinkamtibmas sudah menjalankan tugasnya dengan baik?”

Narasumber : “Beliau inikan pengamanan masyarakat dari polisi, berjalan dengan baik. Karena apa. Karena memang laporan-laporan itu langsung ke FKPM dan ke bhabinkamtibmas. Jadi setiap ada kegiatan langsung kita meluncur ke TKP, dan kita pelajari apa persoalannya, kemudian kita panggil pihak-pihak yang bermasalah. Jadi kerjanya sudah maksimal Alhamdulillah.”

Peneliti : “Untuk partisipasi masyarakat, apakah sudah maksimal atau belum dalam pelaksanaan tugas bhabinkamtibmas?”

Narasumber : “Tergantung dengan bhabinkamtibmasnya. Bhabinkamtibmas inikan artinya dia harus bersilaturahmi ya, disamping dia berdinas di polsek. Tindakan rutinnnya ya bermasyarakat. Mendatangi masyarakat, mendatangi pedagang, mendatangi orang-orang sedang beraktivitas gotong royong, mendatangi sekolah, itu berjalan dengan bagus. Karena bhabinkamtibmas ini terbantu dengan adanya FKPM. Karena bhabin sendiri dengan jumlah penduduk 38.000 itu tidak sanggup. Makanya Alhamdulillah dengan adanya FKPM, bhabinkamtibmas terbantu, dan terkadang kita juga menyelesaikannya sendiri. Kita buat laporan ke bhabinkamtibmas. Kita selesaikan sendiri baru selanjutnya kita laporkan. Persoalan sudah *clear*, sudah selesai, sudah berdamai, sudah tidak bersengketa lagi gitu.”

Peneliti : “Apa pelatihan khusus yang diberikan bhabinkamtibmas kepada FKPM?”

Narasumber : “Kita ada namanya tupoksi (tugas pokok dan fungsi FKPM), nah ini yang memberikan arahan itu dari yang pertama Binmas Polresta Pekanbaru, yang kedua binmas polsek disampingnya bhabinkamtibmas. Jadi anggota-anggota FKPM itu diberikan pengetahuan tentang bagaimana mengatasi persoalan dimasyarakat. Artinya kita bekerja kita menyesuaikan dengan prosedur aturan yang berlaku,

tidak kita sendiri yang menjalankannya. Pelatihan PBB, pelatihan kebangsaan, pelatihan kamtibmas bagaimana menangani konflik yang terjadi di masyarakat, bagaimana kita pisahkan pihak-pihak yang berselisih, itu diajari oleh polsek bhabinkamtibmas.”

Peneliti : “Berapa penilaian yang bapak berikan kepada bhabinkamtibmas dari angka 0 – 100? Dan alasannya kenapa?”

Narasumber : “Kalau saat sekarang karena bhabinkamtibmas ya ini di Pekanbaru ini yang paling muncul FKPM Tangkerang Tengah. Karena kita saya udah mendapatkan piagam ni. Penghargaan dari Kapolsek: Pelopor Penggiat Kamtibmas Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai. Itu satu. Yang kedua FKPM Tangkerang Tengah yang terbaik di Kota Pekanbaru, karena kita bina poskamling-poskamling dalam rangka kamtibmas. Bhabinkamtibmas kalau kita kasih rating nilai itu nilainya 85 dari FKPM. Itu sudah maksimal kerjanya karena memang kita gak ada yang sempurna kan. Karena masih banyak lagi harus kita perbaiki. Masih banyak lagi yang harus kita bangun untuk memberikan kesadaran ke masyarakat tentang badan kamtibmas.”

Peneliti : “Kalau untuk kebutuhan FKPM, apakah ada sarana dan prasarannya?”

Narasumber : “FKPM sosial masyarakat inilah persoalan kita. Kita sudah banyak membantu pihak kepolisian tapi memang sekarang kita gak ada anggarannya. Jadi kita semua sosial masyarakat, tidak dibayar, mulai dari baju itu kita pendanaan sendiri, operasional sendiri, semua sendiri tanpa bantuan. Jadi pihak kepolisian cuman dari perangkat kelurahan lah ada juga sekali-kali memberikan bantuan. Tidak ada anggaran kegiatan kita ini.”

Peneliti : “Jadi anggarannya dari mana pak? Dari sumbangan masyarakat kah atau bagaimana?”

Narasumber : “Itulah ya karena memang kita inikan kerja sosial, anggota-anggota saya mempunyai jiwa sosial, kami tidak meminta pamrih ataupun meminta imbalan dari polsek yang sedang berjalan ataupun juga dari kasus yang kita tangani kita tidak meminta apa-apa.”

Peneliti : “Dibanding dengan Bapak Ilham (Bhabinkamtibmas Kelurahan Sidomulyo Timur), bhabinkamtibmas terbaik, itu beda ya pak dengan FKPM terbaik?”

Narasumber : “Kalau bhabinkamtibmas terbaik penilaiannya kan dari polda, dari polres. Artinya bhabinkamtibmas ini bisa menciptakan sesuatu yang berbeda. Kenapa Bapak Ilham ditunjuk sebagai bhabinkamtibmas polresta? Karena mungkin dia itu ada suatu kegiatan yang lebih dari pada bhabinkamtibmas-bhabinkamtibmas yang

lain. tetapi Bapak Ilham tidak mempunyai FKPM. Bapak Marwan punya FKPM Bhabinkamtibmas Kelurahan Tangkerang Tengah disini. Tetapi yang kita inginkan, yang kita berikan keluar, kita diundang untuk wawancara dibagian informasi, kita diundang untuk bikin film dokumenter, kita juga diundang dek. Kita juga dilaksanakan pertemuan pemberdayaan perempuan dan anak, bagaimana mengatasi KDRT, bagaimana mengatasi seksual narkoba. Kita diundang juga. Nah itu program Tangkerang Tengah dibanding dengan di Sidomulyo Barat.”

Narasumber : “Artinya begini. Bhabinkamtibmas inikan perpanjangan polisi untuk ditempatkan di wilayah kelurahan. Mereka ditugaskan bagaimana menjaga keamanan, perpanjang tangan polsek atau polres, sehingga setiap kegiatan yang terjadi dimasyarakat, menyangkut masalah tipiring (tindak pidana ringan) kecuali masalah pembunuhan pemerkosaan tidak bisa diatasi, itu langsung ke polsek, itu bhabinkamtibmas yang meredam. Dekat dengan masyarakat, mempelajari pergaulan dengan masyarakat, kemudian mencerna kebutuhan di masyarakat.”

**UNIT BINMAS POLSEK SUKAJADI**

NO	A K S I	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	KET
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menguatkan Program satu Polisi satu (Bhabinkamtibmas) satu desa untuk memperoleh informasi masyarakat serta menyampaikan kebijakan pemerintah dan program Polri kedepan kepada masyarakat</li> <li>- Mengajak masyarakat untuk menjadi Polisi bagi diri nya sendiri demi terjaganya kamtibmas di tengah masyarakat</li> </ul>	Kapolsek Sukajadi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intansi samping Yang ada ;</li> <li>- Pihak Kelurahan</li> <li>- Pihak Kecamatan</li> <li>- Koramil</li> <li>- Bhabinsa</li> <li>- Komunitas di masyarakat</li> <li>- Tokoh Masyarakat</li> <li>- Tokoh Adat</li> <li>- Tokoh Pemuda</li> <li>- Tokoh Agama</li> <li>- LSM yang ada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Polsek Sukajadi dalam hal ini memberikan penyuluhan tentang Sosialisasi Penerimaan anggota Polri ke sekolah – sekolah</li> <li>- Membuat Spanduk ( Himbauan ) untuk sosialisasi penerimaan polri</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Banyak nya animo para Pelajar Yang datang baik ke Kantor Polsek maupun Yang bertemu dengan anggota Polri di jalan menayakan persyaratan menjadi anggota Polri</li> <li>2. Dengan banyak nya para calon Polisi Yang mendaftar tentu sangat antusiasnya masyarakat terhadap polri ke depan dan masa yang akan datang</li> </ol>	

**UNIT BINMAS POLSEK SUKAJADI**

NO	A K S I	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	KET
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menguatkan Program satu Polisi satu (Bhabinkamtibmas) satu desa untuk memperoleh informasi masyarakat serta menyampaikan kebijakan pemerintah dan program Polri ke depan kepada masyarakat</li> <li>- Mengajak masyarakat untuk menjadi Polisi bagi diri nya sendiri demi terjaganya kamtibmas di tengah masyarakat</li> </ul>	Kapolsek Sukajadi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intansi samping Yang ada ;</li> <li>- Pihak Kelurahan</li> <li>- Pihak Kecamatan</li> <li>- Koramil</li> <li>- Bhabinsa</li> <li>- Komunitas di masyarakat</li> <li>- Tokoh Masyarakat</li> <li>- Tokoh Adat</li> <li>- Tokoh Pemuda</li> <li>- Tokoh Agama</li> <li>- LSM yang ada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apabila adanya kejadian suatu tindak pidana di tegah masyarakat dan dilakukan penangkapan atau tertangkap tangan oleh masyarakat</li> <li>- Ada nya permasalahan yang timbul di tengah masyarakat tentang gangguan kamtibmas</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dengan tertangkapnya pelaku atau tersangka oleh masyarakat , Sebelum anggota Bhabinkamtibmas datang ke tempat tersebut masyarakat tidak akan memberikan tersangka tersebut kepada siapapun juga tetap menunggu anggota Bhabinkamtibmas</li> <li>2. Setiap permasalahan yang terjadi maupun yang akan terjadi , masyarakat tetap menghubungi pihak polri terutama Bhabinkamtibmas / Polmas .</li> </ol>	

UNIT BINMAS POLSEK SUKAJADI

NO	A K S I	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	KET
1.	- Mengiatkan program sistim Pengamanan di tengah masyarakat maupun	Kapolsek Sukajadi	- Intansi samping Yang ada ; - Pihak Kelurahan - Pihak Kecamatan - Koramil - Bhabinsa  - Komunitas di masyarakat  - Tokoh Masyarakat - Tokoh Adat - Tokoh Pemuda - Tokoh Agama - LSM yang ada	- Polsek Sukajadi dalam hal ini Mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi untuk membangun Pos Kamling .	1. Dengan adanya himbuan tersebut masyarakat sangat berterima kasih dan sangat antusias untuk membuat pos siskamling demi menjaga keamanan di tengah masyarakat	

UNIT BINMAS POLSEK SUKAJADI

NO	A K S I	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	KET
1.	- Mengiatkan program sistim Pengamanan Swaskarsa Security ( Satpam )	Kapolsek Sukajadi	- Intansi samping Yang ada ; - Pihak Kelurahan - Pihak Kecamatan - Koramil - Bhabinsa  - Komunitas di masyarakat  - Tokoh Masyarakat - Tokoh Adat - Tokoh Pemuda - Tokoh Agama - LSM yang ada	- Polsek Sukajadi dalam hal ini melaksanakan pendataan dan pembinaan terhadap Security / Satpam	1. Banyak nya para Security / Satpam yang membuat kartu identitas , ke pihak Polri , dan juga semakin melekatnya kerja sama di bidang memelihara kamtibmas secara keseluruhan	

LAPORAN HASIL PEMBINAAN KELURAHAN JADIREJO  
BULAN JANUARI 2017

NO	HARI / TANGGAL	NAMA BHABINKAMTIBMAS PANGKAT /NRP	DESA / KELURAHAN	HASIL YANG DICAPAI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	SENIN 02 JANUARI 2017	SYAFRUDDIN AIPDA / 60010334	JADIREJO	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan kunjungan ketempat jualan MILIK Sdri JAMIAH sekira Pukul 09.00s/d 10.00 Wib di Jl.Pepaya Rt 05 Rw 02 kel.Jadirejo menyampaikan pesan Kamtibmas.</li> <li>Melaksanakan kunjungan ketempat jualan Sdri Mbak YULI MAY SUSANTI sekira Pukul 14.00 s/d 15.00 Wib, di Jl.Pepaya Kel Jadi rejo Kecamatan Sukajadi Pekanbaru menyampaikan pesan kamtibmas..</li> </ol>	 
2	SELASA 03 JANUARI 2017	SYAFRUDDIN AIPDA / 60010334	JADIREJO	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pengaturan lalulintas sekira Pukul 06.00s/d 07.00 Wib di Jl.Pepaya Kel Jadirejo dan menyampaikan pesan kamtibmas.</li> <li>Melaksanakan kunjungan SDN 06 sekira Pukul 08.00 s/d 09.00 Wib, di Rt/Rw 03/04 kelurahan Jadi Rejo dan menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas.</li> </ol>	 

148

3	RABU 04 JANUARI 2017	SYAFRUDDIN AIPDA / 60010334	JADIREJO	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan kunjungan ke tempat jualan mainan Sdri RADINI sekira Pukul 09.00 s/d 12.00 Wib di Jl.Kesuma Gg Sepakat Rt/Rw 04/03 Kel. Jadi Rejo dan menyampaikan .</li> <li>Melaksanakan kunjungan ketempat jualan bakso milik sdri EDWARNI jam 13.00 s/d 15.00 Wib,Di Jl.Nenas Kel Jadirejo Kecamatan Sukajadi Pekanbaru.</li> </ol>	 
4	KAMIS 05 JANUARI 2017	SYAFRUDDIN AIPDA / 60010334	JADIREJO	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan Kunjungan ketempat Jualan mainan Sdri RITA sekira Pukul 08.00 s/d 12.00 Wib, di Rt/Rw 07/02 Jl.Mangga Gg Buntu kel.Jadirejo Kec. Sukajadi dan menyampaikan himbauan / pesan Kamtibmas.</li> <li>Melaksanakan kunjungan ke tempat jualan minuman sdri NIDAR sekira Pukul 14.00 s/d 16.00 Wib di Jl.Cutnyakdien Rt/Rw 02/01 Kel.Jadi Rejo Kec.Sukajadi Pekanbaru dan menyampaikan himbauan / pesan-pesan Kamtibmas.</li> <li>Melaksanakan kunjungan ketempat jualan HARDIANSYAH sekira Pukul 08.00 s/d 11.00 Wib, di Jl.Pepaya Gg Koperasi Rt/Rw 03/04 Kel. Jadirejo Kec.Sukajadi Pekanbaru</li> </ol>	  

149

**FORMAT KUNJUNGAN KEPADA PENDUDUK**

Format Kunjungan ini berguna bagi Anda karena akan dipergunakan apabila ada yang mencari lokasi rumah anda, atau pada Saat darurat misalnya terjadi kasus kriminal / kecelakaan lalu lintas yang menimpa keluarga / kerabat anda dan perlu Menghubungi anda, Data yang tertera pada Format ini tidak akan diberikan kepada Pihak lain selain Petugas Kepolisian tanpa alasan yang semestinya. Format yang sudah diisi akan disimpan di Kepolisian.

Kepala keluarga	Nama		( L - P )	Tempat & Tanggal lahir		
	Suku / warga Negara		No. Telp. rumah	No. HP		
	Alamat Rumah	Jln.	RT/ RW/		Kel. Jadi Rejo Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru	
	Pekerjaan	Tempat kerja	No. Telp. Tmpt. kerja			
Alamat Tmpt kerja						
Anggota Keluarga Dan Penghuni Rumah lainnya	Nama		Hub. Keluarga	Tempat & Tanggal lahir		Tempat kerja / Sekolah, dll
	1.	( L - P )				
	2.	( L - P )				
	3.	( L - P )				
	4.	( L - P )				
Pihak yang dihubungi dalam keadaan darurat	Nama		Alamat			
	Hubungan		No.Telp.			
Catatan :						
Catatan pelaksanaan kunjungan	Yang Menerima	Tanggal		Nama		Tanda tangan
	Pelaksana			AIPDA SYAFRUDDIN		

150

**FORMAT KUNJUNGAN KE TEMPAT USAHA / KANTOR**

Format kunjungan ini berguna bagi tempat usaha anda, karena akan dipergunakan apabila ada yang mencari lokasi tempat usaha/kantor anda, atau pada saat darurat misalnya terjadi kasus kriminal / kecelakaan lalu lintas yang menimpa karyawan / pegawai tempat usaha / Kantor dsb. Data yang tertera pada format ini tidak akan diberikan kepada pihak lain selain petugas Kepolisian tanpa alasan semestinya, Format yang sudah diisi akan disimpan di Kepolisian.

Nama Tempat Usaha / Kantor		Jenis Usaha / Bidang		Jam Kerja / Operasional		
Alamat Lengkap						
Penanggung Jawab Usaha / Kantor	Nama	( L - P )	No. Telp.	Tempat & Tgl. Lahir		
	Alamat		No. HP.	Tempat & Tgl. Lahir		
Penanggung Jawab Keamanan	Nama	( L - P )	No. HP.	Tempat & Tgl. Lahir		
	Alamat		No. HP.			
Cara untuk dihubungi dalam keadaan darurat						
Jumlah karyawan / Pegawai, dll.	Jumlah :	Orang.	( termasuk WNA : Orang )	Asrama	ADA / TIDAK ADA	
Data Karyawan / Pegawai * Untuk tempat Usaha / Kantor Yang berskala Besar cukup diisi Manager / Kepala Bagian	Nama		Tempat & Tanggal Lahir		Jabatan / Bagian	No. HP.
	1.	( L - P )				
	2.	( L - P )				
	3.	( L - P )				
	4.	( L - P )				
Catatan :						
Catatan Pelaksanaan Kunjungan	Yang Menerima	Tanggal		N a m a		Tanda Tangan
	Pelaksana			AIPDA SYAFRUDDIN		

151